

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah sampah di Indonesia masih menjadi polemik. Jumlah dan jenis sampah terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Namun laju solusi pengelolaan sampah masih tertinggal. Hal ini terbukti dengan produksi sampah yang mencapai 67,8 juta ton per tahun. Sampah organik-lah yang mendominasi jenis sampah di Indonesia hingga mencapai 60% dan disusul sampah plastik 14%. Berbagai TPA di wilayah Indonesia pun melebihi kapasitas, seperti TPA Bantar Gebang (Bekasi), TPA Piyungan (Yogyakarta), TPA Sarimukti (Bandung), TPA Terjun (Medan), dan TPA Suwung (Denpasar) (Saraswati, 2022).

Penyebab tingginya produksi sampah organik yaitu tingginya sampah sisa makanan (*food waste*). Berdasarkan data UNEP *Food Waste Index Report 2021*, sampah sisa makanan yang dihasilkan di dunia sebesar 931 juta ton per tahun 2019. 61% sampah tersebut berasal dari sektor rumah tangga, 26% dari industri makanan dan 13% dari retail (Forbes et al., 2021). Di Indonesia pun didominasi oleh sampah sisa makanan yang produksinya mencapai 23-48 juta ton tiap tahunnya (KemenLHK, 2022; Saraswati, 2022) Dampak sampah sisa makanan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan gas rumah kaca, pemborosan lahan, air bersih, dan energi. Gas metana yang dihasilkan dapat meningkatkan produksi rumah kaca yang jauh lebih berbahaya dari CO₂ dan klorofluorokarbon (CFC), yang dapat memicu peningkatan penyerapan

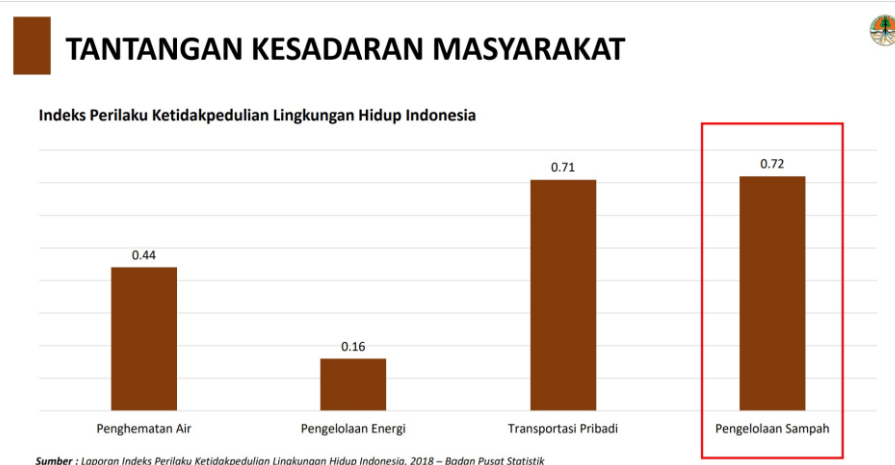
radiasi inframerah dan kenaikan suhu bumi yang memperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global.

Dengan demikian, peningkatan volume sampah yang terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk pesat dan perubahan pola konsumsi penduduk di daerah perkotaan, maka sampah masih menjadi masalah penting di perkotaan. Hal ini dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia (Suryani, 2014). Setiap kota memiliki strategi pengelolaan sampahnya masing-masing. Pengelolaan sampah merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan asri (Dwiyanto, 2011). Pengelolaan sampah juga merupakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No.18, 2008).

Tumpukan dan penanganan sampah yang tidak baik secara tidak langsung berkontribusi terhadap bencana banjir dan sumber penyakit. Bencana yang disebabkan oleh melubernya sampah pada dasarnya dapat ditekan asalkan ada kesadaran masyarakat untuk peduli pada lingkungan, diantaranya dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Kepedulian sampah dapat dilihat melalui perlakuan mengelola sampah, paling tidak yang dilakukan di rumah, namun data masih menunjukkan masyarakat belum sepenuhnya sadar lingkungan (Wulansari et al., 2020)

Berdasarkan catatan *Greeneration Foundation* dalam (Iqbal, 2019), sebuah lembaga non-pemerintah yang perhatian pada permasalahan sampah, rata-rata masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan memproduksi sekitar 0,5kilogram sampah per hari. Hal ini menandakan bahwa peningkatan populasi pada sebuah kota atau kawasan akan berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan.

Catatan ini didukung oleh data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2018 menunjukkan bahwa sekitar 8,75 persen rumah tangga memilah sampah dan sebagian dimanfaatkan, 10,09 persen memilah sampah lalu dibuang, dan sisanya persentase lebih banyak yang tidak memilah sampah. Hasil Survey Sosial Ekonomi Sosial (SUSENAS) BPS pun memperlihatkan hanya 1,2 persen rumah tangga yang mendaur ulang sampah. Hal ini pun didukung oleh data Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup di Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPS, 2018) sebanyak 0,72% kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah lebih tinggi dibanding pengelolaan energi (0,16%), penghematan air (0,44%), dan transportasi pribadi (0,71%).



Gambar 1. 1 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia

Mengelola sampah bukan hanya persoalan teknis tentang bagaimana mengumpulkan dan kemudian mengirimkan sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pemrosesan akhir (TPA), namun kegiatan pengelolaan sampah juga melibatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam mengelola sampah (Hendra, 2016; Sidiq & Prawira, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota atau Kabupaten (Qodriyatun, 2015)

Kelembagaan, kebijakan, operasional, keuangan, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk terwujudnya pengelolaan sampah terpadu. Kelembagaan terkait dengan adanya lembaga yang membidangi pengelolaan sampah (Siswantini & Mahestu, 2018). Kebijakan terkait ketersediaan aturan pengelolaan sampah di tingkat nasional, kabupaten, dan kota. Operasional mengacu pada ketersediaan sistem pengelolaan sampah yang didukung oleh sarana dan prasarana untuk mengoperasikan sistem yang baru dibangun. Pembiayaan merupakan komitmen kesesuaian anggaran pengelolaan sampah, dan keterlibatan masyarakat, serta situasi dan kondisi yang memungkinkan terlaksananya peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Puspa, 2017).

Tantangan untuk menjadi kawasan perkotaan sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal dan mewujudkan kota yang bersih dan hijau merupakan isu global yang harus dipikirkan solusinya ke depan oleh semua pihak. Berdasarkan riset (Purbani, 2017), aspek fisik lingkungan perkotaan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah meliputi: (1) Pengelolaan Sampah Lingkungan Kota; (2) Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah; (3) Pencemaran

Udara; (4) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); sementara aspek non-fisik lingkungan, meliputi: (1) Manajemen dan Kelembagaan; (2) Penegakan Hukum dan Peraturan.

Sejumlah kota metropolitan di Indonesia menjadi penyumbang sampah terbesar. Upaya kota mengurangi sampah, tak sebanding dengan produksi sampah yang dihasilkan (Rosalina et al., 2020) Kota metropolitan dan kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, merupakan kontributor penyumbang sampah terbesar di Indonesia (CIMBNiaga, 2018; Rosalina et al., 2020). Data ini didukung oleh SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) pada 2020 tentang pengurangan sampah setiap Kabupaten dan Kota yang diunggah ke SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK, 2022), sebanyak 58 daerah yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak, produksi sampahnya besar pula. Daerah ini memiliki peran signifikan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk pada aspek pengurangannya.

Merujuk pada temuan (Rosalina et al., 2020), diantara kota-kota penyumbang sampah sejumlah metropolitan besar yang tercatat pada SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) KemenLHK telah mengurangi sampah diatas rata-rata nasional, yaitu Kota Bandung, pada 2020 tercatat telah mengurangi 8% sampah, sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dudy Prayudi, bahkan mengklaim sudah mencapai 20%, menurutnya hal ini didukung oleh aktivitas dan peran stakeholder termasuk kelompok-kelompok pegiat lingkungan yang bergerak mendampingi kewilayahan (Wawancara, 15 Desember 2022). Pada tahap awal riset ini pun, peneliti

mengkonfirmasi data dukung dengan mewawancarai Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar, dikatakan bahwa:

“Kota Bandung punya masalah sampah, Bandung kan gak punya TPA, tapi memang kita lihat punya banyak program, gerakan-gerakan seperti KangPisMan itu ya, sama seperti Kota Surabaya yang udah lebih dulu melibatkan partisipasi publik waktu sama Bu Tri Risma, nah Bandung ini saya lihat walaupun kepemimpinannya berganti, tapi ada green movement-nya, ada banyak kelompok-kelompok pegiat lingkungan yang ngumpul bareng mikirin masalah sampah di Bandung.” (Wawancara, 16 Juni 2022)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai aksi *green-movement* (meminjam istilah yang disampaikan Novrizal Tahar, 2022) dari kelompok-kelompok pegiat lingkungan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Terlebih saat pemerintah daerah mulai memikirkan dan merancang berbagai program dan kebijakan dalam upaya pengurangan, penanganan sampah dari hulu dan juga gerakan partisipasi masyarakat.

Bandung, sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (2018) berjumlah hampir 2.490.622 jiwa dengan wilayah Kota Bandung yang berkisar 167 km². Kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, membuat Bandung tumbuh menjadi kota metropolitan, tujuan wisata dan urbanisasi, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi serta wisatawan yang banyak, aktifitas di Bandung menjadi kurang kondusif. Kondisi Bandung semakin lama semakin kotor, banyaknya sampah menjadi persoalan serius yang dihadapi Kota Bandung (Sembiring, 2015). Sampah menjadi salah satu “pekerjaan rumah” permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung.

Jika dilihat dari hasil evaluasi DLHK Kota Bandung terkait isu lingkungan hidup di Kota Bandung menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu ditangani, diantaranya adalah (1) masalah kualitas air Kota Bandung, (2) kualitas udara Kota Bandung masih berada pada status “kurang”, (3) cakupan sampah yang dikelola secara *Landfill* masih sangat tinggi, (4) cakupan sampah yang diubah menjadi energi masih sangat rendah, (5) emisi GRK (gas rumah kaca) terlihat ada penurunan tetapi emisi dari sektor pengolahan sampah dan limbah belum teridentifikasi dengan baik (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, 2018).

Memang secara historis, Bandung yang dijuluki sebagai Kota Kembang, nyatanya pernah menyandang status sebagai kota Sampah, karena banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik dan berserakan di mana-mana dengan volume yang besar. Dampaknya, lingkungan menjadi bau dan kotor, penurunan kesehatan masyarakat, banjir, serta hilangnya keindahan kota. Tepatnya pada tahun 2005, Bandung pernah memiliki pengalaman buruk yakni saat TPA meledak dan Bandung menjadi lautan sampah, tentu hal ini jangan sampai terulang. Namun saat ini bom waktu TPA yang semakin penuh akan mungkin terjadi lagi manakala pengelolaan sampah tidak ditangani dengan serius. Berita terkait tragedi longsor sampah TPA Leuwigajah pada tahun 2005 dapat dilihat pada gambar berikut:

dengan visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota dalam setiap periodenya, khususnya pada periode tahun 2018-2023 ini visinya adalah “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung memiliki fungsi membantu Wali Kota dalam menjalankan misi untuk mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, dalam hal ini adalah urusan lingkungan hidup dan persampahan. Beranjak dari visi misi tersebut diperlukan adanya kolaborasi yang baik dalam menangani berbagai permasalahan diantaranya adalah komunikasi yang efektif antar stakeholder sebagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan lingkungan hidup ini, yakni Pemerintah Kota Bandung bersama elemen masyarakat sebagai pemerhati lingkungan hidup dan sampah.

Permasalahan sampah yang dialami Kota Bandung menunjukkan angka yang tidak sedikit yaitu mencapai 1500 ton/hari (Data PD Kebersihan Kota Bandung, 2020). Merujuk pada riset peneliti sampah dari ITB, Enri Damanhuri, masyarakat Kota Bandung memproduksi sampah 0,6 kg/orang, artinya pengangkut sampah membuang sisa residu ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sarimukti berkisar 240 sampai 260 truk setiap hari atau sama dengan 1200 hingga 1400 ton per hari, padahal TPA Sarimukti sudah melebihi kapasitas ini pun akan tutup di tahun 2024 dan akan dialihkan ke TPA Legoknangka di daerah Nagrek Kab.Bandung yang direncanakan mulai beroperasi pada 2025. Namun pengalihan

ini akan menghadapi berbagai hambatan. Humas PD Kebersihan Kota Bandung menyatakan secara administratif TPA Legoknangka masuk dalam kewenangan Pemprov Jawa Barat, artinya Kota Bandung dan kota/kabupaten lainnya hanya sebagai pengguna, selain juga adanya kendala letak geografis, sosial dan ekonomi, yaitu jarak menuju TPA Legoknangka yang jauh akan menyedot APBD hanya sekedar urusan sampah.

Permasalahan lain adalah banjir yang seringkali masih terjadi di sejumlah titik di Kota Bandung di setiap musim penghujan. Salah satu faktor penyebabnya disinyalir karena sampah yang memenuhi saluran air. Sebagaimana pernyataan Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana, dalam tulisan (Riyadi, 2020) bahwa upaya meminimalisir sudah dilakukan Pemkot Bandung dengan membangun sejumlah embung air atau danau retensi. Namun ternyata perilaku membuang sampah ke sungai masih tetap dilakukan, hal ini menyebabkan seolah pembangunan danau retensi ini menjadi sia-sia.

Hingga saat ini Pemkot Bandung masih terus berupaya dan melakukan inovasi untuk mencari solusi penanganan sampah. Permasalahan ini menjadi krusial sebab ada kemungkinan terulang kembali Bandung “kota sampah”. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh (Surakusumah, 2008), beberapa permasalahan sampah di Kota Bandung yang masih belum terselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat Bandung akan sampah yang masih rendah.
2. Kemampuan pelayanan PD Kebersihan Kota Bandung yang masih belum optimal.

3. Masyarakat tidak memilah sampah organik dengan non-organik, padahal sampah organik inilah yang merupakan komposisi terbesar dari sampah Kota Bandung, hal ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efisien dibanding yang sudah terpilah.
4. Keterbatasan lahan TPA, sehingga diperlukan ekspansi melalui kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak.
5. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak konsisten, sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah beserta sanksi bagi pelanggar.

Kembali ke awal bahwa permasalahan sampah tidak terlepas dari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menyelamatkan bumi. Hal ini memerlukan kesadaran kolektif untuk secara bersama-sama menjaga lingkungan hidup, dalam hal ini melihat realitas permasalahan sampah di Kota Bandung di atas. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih serius dalam membangun dan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup agar tidak terus terjadi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Disinilah pentingnya peran dan strategi pemerintah dalam mengomunikasikan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Sebenarnya berbagai kebijakan lingkungan telah dikeluarkan Kota Bandung dalam mengatasi masalah sampah, antara lain Bandung Berhiber (Bersih Hijau Berbunga), *Waste to Energy* (WTE)-PLTs, Gerakan Sejuta Biopori, Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS), Gerakan Pungut Sampah (GPS), Selamat Tinggal

Styrofoam, Kawasan Bebas Sampah (KBS), KangPisMan, Buruan SAE, Bayar PBB dengan Sampah, Nabung Sampah Dapat Emas, dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara pra-riset kepada salah seorang pegiat lingkungan yang juga merupakan kolaborator gerakan KangPisMan, Tini Martini (wawancara pra-riset, 2020), dikatakan bahwa capaian target pengurangan sampah di tahun 2025 masih jauh, target pengurangan sampah baru mencapai 4 persen saja. Kalau dilihat dari signifikansi dengan program KangPisMan, hal ini belum mengurangi timbulan sampah di Kota Bandung secara maksimal, butuh proses panjang agar mendekati target 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen pengolahan sampah pada tahun 2025 nanti.

Sejumlah studi dan literatur pengelolaan sampah mendukung perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan karena akan menguntungkan warga dan pemerintah (Stavchuk, 2005). Kebijakan dan program diadopsi untuk kepentingan warga dan dianggap sebagai keputusan mereka sendiri. Program pengelolaan sampah dikembangkan bersama dengan publik, tidak hanya memperoleh dukungan dalam implementasi yang berhasil, tetapi juga menghilangkan kemungkinan konflik (Takis, 2003). Sisi lain dari partisipasi publik adalah membawa minat pada isu penanganan sampah, dan memastikan bahwa informasi diberikan untuk warga sehingga warga akan mencari lebih banyak informasi atau pengetahuan tentang penanganan sampah.

Eden, 1996 dalam (Fenech, 2002) menyatakan bahwa salah satu cara menata partisipasi publik dilakukan melalui prosedur dengar atau jajak pendapat (*public hearing*) yang dilakukan antara Dinas Kota dengan masyarakat setempat untuk

membahas sistem pengumpulan sampah, infrastruktur dan mengembangkan kampanye komunikasi dimana warga sendiri mau merekomendasikan informasi mana yang akan mempengaruhi perilaku mereka. Namun memang melibatkan warga dalam prosedur seperti ini dipandang sebagai tantangan karena hanya sedikit warga yang mau berpartisipasi di dalamnya (SustainableCityDevelopment, 2005).

Perjalanan Kota Bandung menuju *Zero Waste City (ZWC)* atau Kawasan Bebas Sampah tidak dapat dilepaskan dari upaya bersama kelompok pegiat lingkungan (NGO), yaitu YPBB dan kelompok Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) yang merupakan forum para pegiat lingkungan di Kota Bandung, terdiri dari akademisi, konsultan, dan juga komunitas. Pada 2013, YPBB merintis ZWC di Kelurahan Sukaluyu-Cibeunying Kaler, Kelurahan Sukamiskin-Arcamanik, dan Kelurahan Babakan Sari-Kiaracondong. Konsep ini dijalankan dengan model pendampingan penuh bersama Pemerintah/DLH, dan Neglasari yang didampingi YPBB tanpa pengawalan DLH. Sama halnya Cibunut pendampingan GSSI dan DLH.

Hal ini menunjukkan adanya gerakan akar rumput yang mulai merintis berbagai aksi perubahan perilaku penanganan sampah di masyarakat. Sebagaimana wawancara pra riset (Gungun Saptari Hidayat, 2020) diketahui bahwa gerakan KangPisMan pun merupakan program yang ditawarkan saat jelang pemilihan Walikota-Wakil Walikota di tahun 2018 yang merupakan bagian dari penanganan isu lingkungan hidup dan sampah di Kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, ide yang digagas oleh Forum Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) yang terdiri dari beberapa kelompok aktivis lingkungan di

Kota Bandung ini diantaranya YPBB, GSSI, Sahabat Kota, Hijau Lestari, dan Walhi, disampaikan kepada pasangan kandidat Calon Walikota-Wakil Walikota, ternyata mendapat respon kuat dari pasangan yang ketika itu terpilih sebagai Walikota-Wakil Walikota Bandung periode 2018-2023 (Oded-Yana). Sejak saat itulah di awal program 100 hari kerja Walikota Bandung terpilih, KangPisMan menjadi salah satu program unggulan yang hingga saat ini dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dalam berbagai kegiatan pemerintahan dengan selalu mengucapkan salam KangPisMan dan mengacungkan simbol KangPisMan (salam 3 jari 3R versi kedaerahan/Sunda); KangPisMan (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) = 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Inilah yang menjadi daya tarik dan keunikan, simbol KangPisMan sebagai ikon penanganan sampah di Kota Bandung yang tidak dimiliki oleh Pemerintahan Kota lainnya yang ada di Indonesia pada umumnya.

Program KangPisMan ini memprioritaskan pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah di 8 kelurahan sebagai Kawasan percontohan di tahap awal, yang kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan ditetapkan pada 16 Oktober 2018. Peraturan daerah ini menguatkan kerja-kerja rintisan YPBB, GSSI, Greeneration, Waste4Change yang tergabung dalam Forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah) untuk terus mendorong dan mengawal berbagai kebijakan persampahan di Kota Bandung dengan menegaskan penanganan sampah melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Penanganan sampah secara terintegrasi pada prinsipnya memerlukan penguatan terlebih dahulu di sisi pemerintahan itu sendiri, agar tujuan dan komitmennya jelas dalam menentukan langkah atau upaya-upaya yang komunikatif. Disinilah memunculkan “kegemasan” dari beberapa komunitas kelompok peduli lingkungan tersebut untuk melakukan relasi dan berkomunikasi dalam mendorong (*supporting*) dan mengawal pemerintah agar dapat mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang pro-lingkungan secara berkelanjutan.

Komunikasi diyakini dapat memberikan platform yang menjembatani proses pertukaran pesan, informasi, ide, gagasan dan kebijakan. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar teoritis untuk mengkaji isu-isu lingkungan melalui komunikasi untuk mencapai kesepahaman diantara pemangku kepentingan, yakni melalui pendekatan komunikasi kolaboratif dan partisipatoris.

Hal ini senada dengan asumsi ekologi politik (Robbins, 2012) yang mana perlu menginformasikan pembuat kebijakan dan organisasi tentang kompleksitas lingkungan sekitar dan pembangunan, sehingga berkontribusi pada tata kelola lingkungan yang lebih baik, memahami keputusan yang diambil masyarakat tentang lingkungan alam dalam konteks politik lingkungan dan peraturan sosial mereka, kemudian melihat bagaimana hubungan yang tidak setara dalam dan antar masyarakat yang akan mempengaruhi lingkungan alam, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah.

Sebutan lain dari ekologi politik (ekopolitik) yaitu *green politics*, adalah sebuah perspektif politik yang bertujuan untuk mendorong masyarakat

berkelanjutan yang secara ekologis berakar pada lingkungan hidup, non-kekerasan, keadilan sosial, dan demokrasi akar rumput (Wall, 1994). Hal ini didukung oleh (Paterson, 2001) bahwa *green politics* sebenarnya bermakna ideologi politis yang sangat kental dengan nuansa ekologis, kelestarian lingkungan hidup, dan demokrasi partisipatoris.

Pemikiran *green politics* ini memberi peluang pada berbagai lapisan masyarakat untuk mendorong pemerintah melalui aktivitas atau gerakan peduli lingkungan yang berorientasi pada pembuatan atau menghasilkan dan melaksanakan kebijakan politik pemerintah yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Disinilah pada akhirnya muncul berbagai aktivitas komunikasi dari kelompok-kelompok komunitas pemerhati lingkungan yang mendorong (*supporting*) dan mengawal pemerintah untuk dapat mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang pro-lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sepadan dengan hasil riset dalam Laporan KangPisMan 2019 menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Bandung tentang program KangPisMan pun merupakan gerakan dan pendampingan dari berbagai komunitas pegiat lingkungan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan sampah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, 2019).

Disinilah komunikasi dalam perspektif *green politics* berperan, dalam hal ini pemerintah sudah memiliki kebijakan yang pro lingkungan, dan juga adanya gerakan partisipasi masyarakat atau *stakeholder* yang pro lingkungan, namun bagaimana kebijakan penanganan sampah ini dikomunikasikan oleh pemerintah,

bagaimana proses komunikasi dalam perumusan kebijakan penanganan sampah, seperti apa komunikasi kebijakannya, siapa saja yang terlibat dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, kemudian bagaimana peran *stakeholder* (pemangku kepentingan), bagaimana dialog yang terjadi, bagaimana partisipasi dan kolaborasi *stakeholder* dalam penanganan sampah di Kota Bandung.

Karena, pada dasarnya regulasi atau kebijakan dapat dibuat secara bergantian sama halnya dengan teknologi dan *management tools*, yang membedakan adalah pada penyesuaian atau adaptasi yang tergantung pada adanya keinginan dan penerimaan masyarakat (Edrus, 2011). Kesadaran masyarakat (*public awareness*) inilah merupakan kunci keberhasilan dari partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam penanganan sampah secara kelembagaan pun Pemerintah Kota Bandung perlu didukung oleh peran dan keterlibatan atau partisipasi *stakeholder*.

Brulle dalam *Journal of Nature and Culture* (Brulle, 2010) menyebutkan salah satu poin dalam mewujudkan pergerakan sosial lingkungan adalah adanya restorasi proses komunikasi satu arah menuju ke partisipasi masyarakat secara keseluruhan, juga menetapkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Artinya disini upaya komunikasi lingkungan diperlukan agar mampu melibatkan partisipasi *stakeholder*, salah satunya melalui cara *deliberative democracy*—sebagaimana pendekatan *green politics* (Dryzek, 1995), yang mementingkan adanya kesepakatan melalui konsultatif (musyawarah) antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dan unsur masyarakat lainnya. Senada dengan (Depoe, Stephen P.; Delicath, John W.;

Elsenbeer, 2004), (Kamil et al., 2020) bahwa penentuan kebijakan lingkungan perlu melibatkan pemangku kepentingan dan aktor non-pemerintah secara formal dengan proses kolektif konsultatif. Kolaborasi yang baik akan mendorong komunikasi yang sinergis dan multi-arah.

Beranjak dari uraian di atas, penting kiranya untuk melakukan penelitian tentang komunikasi yang bersifat kolaboratif dan partisipatoris yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani sampah sebagai salah satu isu lingkungan hidup, dalam hal ini peneliti menyebutnya sebagai komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan mengkaji sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang diolah melalui penggalan pertanyaan mengapa dan bagaimana, hingga dapat menemukan realitas dan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Disinilah kebaruan (*novelty*) yang peneliti tawarkan dalam penelitian ini, yaitu mengungkap bagaimana komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* melalui realitas komunikasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dan partisipasi *stakeholder* secara kolaboratif dalam menangani sampah. Hal ini menarik karena pada penelitian sebelumnya seringkali ditemukan bahwa pemerintah mengkomunikasikan kebijakan secara sentralistik tanpa melibatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada “*Komunikasi lingkungan dalam perspektif green politics (Studi kasus komunikasi kebijakan dan partisipasi stakeholder dalam penanganan sampah di Kota Bandung)*”.

1.2.2. Pertanyaan penelitian

- 1) Mengapa permasalahan sampah selalu menjadi isu strategis Kota Bandung?
- 2) Bagaimana proses komunikasi dalam perumusan kebijakan tentang penanganan sampah di Kota Bandung?
- 3) Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang penanganan sampah di Kota Bandung?
- 4) Bagaimana partisipasi *stakeholder* dalam penanganan sampah di Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

- 1) Mengungkap dan mengkaji permasalahan sampah sebagai isu strategis Kota Bandung.
- 2) Mengungkap dan mengkaji proses komunikasi dalam perumusan kebijakan tentang penanganan sampah di Kota Bandung.
- 3) Mengungkap dan mengkaji proses komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang penanganan sampah di Kota Bandung.

- 4) Mengungkap dan mengkaji partisipasi *stakeholder* dalam penanganan sampah di Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori-teori dan konsep ilmu komunikasi, khususnya kajian komunikasi lingkungan, komunikasi politik dan kebijakan pemerintah melalui perspektif *green politics*, sehingga dapat dijadikan model acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah khasanah atau pengetahuan bagi komunikasi pemerintah dalam membuat regulasi yang pro lingkungan demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Hasil penelitian ini bermanfaat tidak hanya bagi kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, namun juga bagi para praktisi media, aktivis lingkungan, pihak swasta atau perusahaan yang bersama-sama turut menjaga kelestarian bumi, dan juga dapat menjadi rekomendasi dan evaluasi produk kebijakan yang sudah ditetapkan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Ketika sampah dikelola dengan baik, maka pencemaran lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim pun dapat dikendalikan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Literatur

2.1.1. Review Hasil Penelitian Sejenis

Penelitian terdahulu terkait kajian *green politics* maupun komunikasi lingkungan memiliki beragam sudut pandang. Diawali dengan tesis (Guedes, 1996) tentang *Green Politics, Ideology and Communication*, menganalisis secara terperinci tentang media massa Brasil, melihat bagaimana pandangan tentang isu lingkungan dikonstruksi dan dipelihara oleh media. Penelitian ini menganalisis produksi berita lingkungan melalui kombinasi analisis konten, studi kasus dan wawancara semi-terstruktur secara mendalam.

Penelitian Guedes (1996) menunjukkan bahwa liputan media terkait isu lingkungan hidup telah dipolitisasi, padahal secara umum dibentuk oleh perspektif teknosentris, yaitu adanya kepercayaan dan nilai-nilai tradisional, yang menekankan pada teknologi, produksi dan materialisme, dan menekankan pada perkembangan media secara ilmiah yang berbeda dari politik. Pada akhirnya temuan studi ini menunjukkan media adalah aktor kunci dalam definisi, artikulasi dan popularisasi masalah lingkungan hidup di Brasil. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian *green politics*, namun riset Guedes ini melalui pendekatan analisis isi media massa di Brazil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji *green politics* dengan fokus pada komunikasi partisipatoris dan kolaborasi pemerintah bersama masyarakat dalam menangani sampah di Kota Bandung.

Penelitian sejenis lainnya yang terkait dengan riset yang akan dilakukan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari fokus kajian, metode, maupun objek penelitian, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini akan diuraikan review penelitian terdahulu sejenis yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. John S. Dryzek. Judul: Political and Ecological Communication.

Dipublikasikan: *Journal of Environmental Politics*, volume 4, 1995, Pages 13-30, published online 8 Nov 2007. Terindeks Scopus Q1. (Dryzek, 1995)

Literatur ini membahas tentang komunikasi politik dan ekologi melalui prinsip demokrasi ekologis, adanya rasionalitas komunikatif, demokrasi tanpa batas, dan koordinasi melalui tatanan spontan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi adalah masalah komunikasi yang efektif, bukan hanya agregasi preferensi. Biasanya hanya komunikasi antar manusia tentang kepentingan manusia yang menjadi masalah. Tetapi demokrasi juga bisa ada atau disangkal dalam hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, demokratisasi ekologi merupakan masalah integrasi yang lebih baik antara komunikasi politik dan ekologi. Prinsip demokrasi ekologis dapat digunakan baik untuk mengkritik pengaturan kelembagaan yang ada, dan untuk menginspirasi pencarian lembaga alternatif yang akan mengintegrasikan politik dan ekologi dengan lebih baik.

Kesamaan studi ini terletak pada adanya aspek demokrasi ekologis, yang dikatakan sebagai teori demokrasi deliberatif. Hanya saja penelitian ini akan lebih fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* yang melihat

aspek partisipatoris melalui pendekatan demokrasi deliberatif ini diantara pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah di Kota Bandung.

2. **J. Burgess, C.M. Harrison. Judul: Environmental Communication and the Cultural Politics of Environmental Citizenship. Dipublikasikan: *Journal Environment and Planning A*, 1998, volume 30, issue 8, pages 1445 -1460. Terindeks Scopus Q1. (Burgess & Harrison, 1998)**

Paper ini menyajikan analisis komparatif tentang bagaimana perwakilan dari sektor publik, swasta, dan sukarela dari dua kota, Nottingham (Inggris) dan Eindhoven (Belanda) menanggapi tantangan komunikasi yang lebih efektif dengan warga tentang masalah keberlanjutan (*sustainability*). Analisis diatur dalam konteks literatur tentang perlunya memperluas partisipasi dalam penentuan 21 kebijakan Agenda Lokal, dan dorongan untuk bentuk komunikasi yang lebih inklusif dalam perencanaan dan politik. Anggota lokakarya mendiskusikan hasil survei dan kelompok diskusi mendalam dengan penduduk setempat yang telah mengungkapkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap komunikasi lingkungan dan keahlian lingkungan. Tiga tema dieksplorasi. Pertama, ada konsensus dalam mengaitkan tanggung jawab untuk keterasingan publik dan perlawanan terhadap komunikasi lingkungan dengan konten dan gaya pelaporan media. Kedua, ada konstruksi diskursif yang kontras dari 'publik, yang mencerminkan budaya politik yang berbeda dengan kajian Nottingham mendukung strategi untuk berbagi kekuasaan dan pengetahuan lebih luas dari sebelumnya, sedangkan strategi Eindhoven mengusulkan kekakuan, kejelasan, dan otoritas yang lebih besar dari negara bagian. Ketiga, menanggapi bukti resistensi publik terhadap seruan untuk

praktik yang lebih berkelanjutan, peserta lokakarya di kedua kota berfokus pada apa yang dapat dan harus dilakukan oleh lembaga itu sendiri untuk memajukan tujuan lingkungan. Peserta lokakarya di kedua negara mengakui kebutuhan mendesak bagi organisasi sektor publik, swasta, dan sukarela untuk mencocokkan praktik mereka sendiri dengan retorika lingkungan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan perlunya memperluas partisipasi dalam penentuan 21 kebijakan Agenda Lokal, dan dorongan untuk bentuk komunikasi yang lebih inklusif dalam perencanaan dan politik. Anggota lokakarya mendiskusikan hasil survei dan kelompok diskusi mendalam dengan penduduk setempat yang telah mengungkapkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap komunikasi lingkungan dan keahlian lingkungan.

Perbedaan studi ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu studi komparatif yang lebih menekankan pada perlunya partisipasi publik sebagai bentuk komunikasi inklusif melalui 21 kebijakan Agenda Lokal di Nottingham dan Eindhoven. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* dengan melihat aspek partisipatoris dan deliberatif dalam menangani sampah di Kota Bandung.

3. Gregg B. Walker. Judul: Public Participation as Participatory Communication in Environmental Policy Decision-Making: From Concepts to Structured Conversations. Dipublikasikan: *Journal Environmental Communication* Vol. 1, No. 1, May 2007, pp. 99-110. (Terindeks Scopus Q1)
(Walker, 2007)

Penelitian ini bertujuan untuk membedakan antara pengertian tradisional tentang partisipasi publik dan komunikasi partisipatif, terutama seperti yang dilakukan di lingkungan non-Amerika Serikat. Selain itu alat/tools untuk memfasilitasi komunikasi partisipatif diidentifikasi dan dibahas. Tulisan ini didasarkan pada pengalaman luas penulis sebagai mediator konflik dan konsultan dan ahli partisipasi publik. Selama 15 tahun terakhir, penulis telah melakukannya menjabat sebagai konsultan masalah penyelesaian konflik lingkungan, partisipasi publik, dan kolaborasi berbasis komunitas untuk badan federal dan negara bagian dan LSM, termasuk Dinas Kehutanan USDA, Biro Pengelolaan Lahan USDI, Korps Insinyur Angkatan Darat AS, Departemen Ikan dan Margasatwa Washington, Departemen Kualitas Lingkungan Oregon, dan Konservasi Alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif sebagai pendekatan partisipasi publik yang penting. Dalam pengambilan kebijakan lingkungan hidup perlu mencari partisipasi publik pluralistik, strategi dan alat partisipatif komunikasi tampaknya penting melalui worksheet percakapan yang meliputi dialog dan pembelajaran.

Kesamaan penelitian ini terletak pada pendekatan teori yang digunakan yaitu komunikasi partisipatoris, yang berbeda adalah pendekatan melalui studi literatur, sementara penelitian ini pendekatan studi kasus dengan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* yang melihat aspek partisipatoris dan deliberatif dalam menangani sampah di Kota Bandung.

- 4. Kaveri Kala, Nomesh B. Bolia, Sushil. Judul: Waste Management Communication Policy for Effective Citizen Awareness. Dipublikasikan: *Journal of Policy Modeling*, Volume 42, Issue 3, May-June 2020, Pages 661-678. Terindeks Scopus Q2. (Kala et al., 2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja dalam merumuskan Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang mengidentifikasi masalah warga dan saluran (komunikasi) yang tepat untuk membuat kesadaran. Pengelolaan Sampah Kota memiliki implikasi yang jelas pada kelayakan hidup kota dan kesehatan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah kota seringkali dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah saja. Di sisi lain, ada kesepakatan di seluruh dunia bahwa pemangku kepentingan perlu melibatkan warganya dalam proses ini karena mereka penghasil utama limbah perkotaan. Namun kekurangannya adalah kesadaran warga negara dan komunikasi antara Pemerintah dan warga merupakan hambatan utama dalam pengelolaan sampah kota. Oleh karena itu, diperlukan beberapa inisiatif kebijakan yang menjembatani komunikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan model Multinomial Logistic Regression (MLR) berbasis ekonometrika dikembangkan untuk mengidentifikasi saluran komunikasi yang sesuai berdasarkan kategori sosial-ekonomi dari warga. Model dan analisisnya memberikan wawasan untuk dapat ditindaklanjuti dalam merencanakan kampanye yang ditargetkan untuk kesadaran pengelolaan sampah kota.

Kesamaan penelitian ini terletak pada perlunya komunikasi dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat dalam pengelolaan sampah kota. Namun perbedaannya terletak pada model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui model *multinomial logistic regression* berbasis ekonometrika terutama saat mengidentifikasi saluran komunikasi yang tepat untuk warga, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis kualitatif dengan menerapkan komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* melalui partisipatoris dan kolaboratif.

5. Sadie Hundemer, Martha C. Monroe. Judul: A Co-orientation Analysis of Producers' and Environmentalists' Mental Models of Water Issues: Opportunities for Improved Communication and Collaboration. Dipublikasikan: *Journal Environmental Communication*, Vol.14 2020. Terindeks Scopus Q1. (Hundemer et al., 2020)

Penelitian ini melihat bahwa produsen pertanian dan pemerhati lingkungan memiliki kepentingan bersama dalam memelihara sumber air sehat; namun komunikasi dan kolaborasi pada langkah-langkah *sustainability* dapat terhalang oleh perbedaan persepsi dalam etika air. Sehingga studi ini adalah untuk memahami bagaimana setiap kelompok berpikir tentang tantangan (isu) air melalui mental models dan juga menerapkan model koorientasi untuk membandingkan secara kualitatif dan kuantitatif perspektif lintas kelompok dan peta komposit model untuk memahami bagaimana setiap kelompok berpikir tentang tantangan air satu sama lain.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengalaman persepsi yang tampaknya tidak sesuai antara peran produsen dalam pasokan air regional. Perspektif produsen secara operasional memungkinkan untuk melihat langsung praktik kepengurusan, sementara perspektif pencinta lingkungan menyoroti kondisi lingkungan dari industri pertanian. Temuan penelitian menyarankan bahwa bingkai, topik, dan pilihan kata dapat membantu komunikator menjembatani kesenjangan kognitif antara kelompok pemangku kepentingan.

Kesamaan penelitian ini terletak pada aspek perlunya kesepahaman persepsi antara produsen sebagai pengguna manfaat air dengan pecinta lingkungan sebagai kelompok pemangku kepentingan. Disinilah peran komunikasi yang mampu menjembatani kesenjangan persepsi tersebut. Perbedaannya ada pada objek kajiannya yaitu pada isu air, sementara penelitian ini pada isu sampah, walaupun tidak dipungkiri sama-sama permasalahan lingkungan hidup. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada metode pendekatannya, artikel ini melakukan *mix methode* dengan model koorientasi dan *mental models* dengan analisis *Conseptual Content Cognitive Mapping (3CM)*, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada komunikasi lingkungan dalam perperspektif *green politics* melalui partisipatoris dan kolaboratif dan jenis penelitian studi kasus pada penanganan sampah di Kota Bandung.

6. Ivan Zwart. Judul: A Greener Alternative? Deliberative Democracy Meets Local Government. Dipublikasikan: *Journal Environmental Politics* Volume 12, 2003, Issue 2, pages 23-48. Terindeks Scopus Q1. (Zwart, 2003)

Penelitian ini menganalisis hasil konsultatif publik yang dilakukan oleh pemerintah lokal Australia untuk menginformasikan review pengelolaan sampah. Artikel ini berpendapat adanya mekanisme partisipatif dalam kasus ini dipahami sebagai sifat yang konsultatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga demokrasi penghijauan telah diikuti oleh beberapa ahli teori melalui bentuk demokrasi konsultatif yang terinspirasi oleh konsep ruang public (*public sphere*) Habermasian, rasionalitas komunikatif dan situasi speech yang ideal. Pertahanan ekologis dari konsultatif pada dasarnya bertumpu pada kemampuannya untuk mendorong pengakuan dan dukungan kepentingan lingkungan yang dapat digeneralisasikan, dan selanjutnya melegitimasi lembaga perwakilan. Artikel ini siap untuk diuji kegunaan praktis dari ide-ide ini, melalui struktur partisipatif di tingkat lokal, melalui konsultasi/musyawarah publik dan pengelolaan sampah.

Perbedaan studi ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu studi literatur untuk melihat model pemerintah lokal sebagai '*Real Deliberation*', dalam arti artikel ini membahas tentang alternatif yang lebih "*greener*" bisa dilihat dari adanya demokrasi konsultatif melalui pemerintah lokal. Sedangkan kesamaan dengan penelitian ini terletak pada teori yang dijadikan landasan adalah *deliberative democracy*, artinya teori ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian ini melalui pendekatan studi kasus dengan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* yang melihat aspek partisipatoris dan kolaboratif dalam menangani sampah di Kota Bandung.

7. Chris Ansell, Alison Gash. Judul: Collaborative governance in theory and practice. Dipublikasikan: *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543-571. (Terindeks Scopus Q1). (Ansell & Gash, 2008)

Artikel ini melakukan studi meta-analitis dari literatur tentang tata kelola kolaboratif dengan tujuan mengelaborasi model kontingensi dari tata kelola kolaboratif, kemudian mengidentifikasi variabel kritis yang mempengaruhi apakah model tata kelola ini akan menghasilkan atau tidaknya kolaborasi yang sukses, dan juga mengidentifikasi faktor penting dalam proses kolaboratif tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dikenal dapat menyatukan pemangku kepentingan publik dan swasta secara kolektif, forum dengan badan publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Faktor penting dalam proses kolaboratif terdiri dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan pengembangan komitmen dan pemahaman bersama. Studi ini menemukan bahwa siklus kolaborasi berkembang ketika forum kolaboratif berfokus pada 'keuntungan kecil' tapi memperdalam kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Artikel ini diakhiri dengan diskusi tentang implikasi model kontingensi untuk praktisi dan untuk penelitian di masa mendatang tentang tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*).

Perbedaan studi ini terletak pada pendekatannya melalui studi literatur dengan meta-analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kesamaan studi ini adalah dalam hal memandang perlunya kolaborasi diantara pemangku kepentingan dalam tata kelola apapun,

termasuk dalam menangani berbagai isu, diperlukan dialog tatap muka, membangun kepercayaan dan komitmen kesepahaman dalam memahami sebuah masalah/isu. Disinilah penelitian ini bergerak untuk fokus melihat komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* melalui aspek kolaborasi dan partisipatoris menangani sampah di kota Bandung.

8. Robert J. Brulle. Judul: From Environmental Campaigns to Advancing the Public Dialog: Environmental Communication for Civic Engagement. Dipublikasikan: *Journal Environmental Communication*, Volume 4, Issue 1, 2010, page 82-98. Terindeks scopus Q1. (Brulle, 2010)

Artikel ini membahas klaim kampanye identitas lingkungan tentang masalah perubahan iklim. Kampanye identitas didasarkan pada ide yang lebih efektif pesan lingkungan melalui penerapan kognitif yang dapat mempengaruhi opini publik dan mendukung tindakan legislatif dalam mengatasi *global warming*. Berdasarkan tinjauan sosiologis dan literatur psikologis tentang perubahan sosial dan mobilisasi, walaupun pendekatan ini mungkin menawarkan keuntungan jangka pendek, namun kemungkinan besar tidak mampu mengembangkan mobilisasi skala besar yang diperlukan pemberlakuan sosial masif dan perubahan ekonomi yang diperlukan untuk mengatasi pemanasan global. Secara khusus, teoritis dan penelitian empiris tentang peran ruang publik, masyarakat sipil, dan gerakan sosial menunjukkan adanya keterlibatan sipil yang demokratis adalah inti dari upaya perubahan sosial yang berhasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye identitas fokus pada proses komunikasi yang berpusat pada elit yang memimpin komunikasi satu arah, tentunya hal ini memerlukan adanya bentuk keterlibatan sipil dan dialog publik. Komunikasi yang berpusat pada elit hanya akan merongrong terciptanya proses perubahan yang demokratis dan memperkuat profesionalisasi wacana politik, dan mengarah pada melemahnya kapasitas mobilisasi untuk mengatasi masalah pemanasan global ini. Esai diakhiri dengan garis besar proses komunikasi lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan warga negara dan pengambilan keputusan yang demokratis. Model komunikasi partisipatif melibatkan pengembangan kemampuan warga untuk bertindak secara kolektif dalam kontes framing. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi komunikasi lingkungan mulai dari kampanye identitas hingga keterlibatan masyarakat. Berikut tiga dimensi proses komunikasi: (1) identitas menuju tantangan kampanye, (2) mengalihkan proses komunikasi satu arah ke keterlibatan masyarakat (3) masyarakat sustainable secara ekologis.

Walaupun sama-sama membahas kajian komunikasi lingkungan, namun artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan tinjauan sosiologis dan literatur psikologis melalui model *participatory communication* dan konsep "*communication for civic engagement*". Konsep dan model dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis, namun artikel ini lebih fokus pada kampanye identitas lingkungan yang sama-sama melibatkan dialog publik dan keterlibatan masyarakat. Perbedaannya penelitian ini fokus pada komunikasi dalam perspektif *green politics* penanganan sampah di Kota Bandung

sebagai isu lingkungan hidup yang perlu ditangani bersama dan kesepahaman melalui partisipatori dan kolaborasi dengan teori *deliberative democracy*.

- 9. Markus Holdo. Judul: Sincerity as Strategy: Green Movements and the Problem of Reconciling Deliberative and Instrumental Action. Dipublikasikan: *Journal Environmental Politics*, Volume 28, 2019, issue 4, pages 595-614. Terindeks scopus Q1. (Holdo, 2019)**

Penelitian ini mengungkap tentang gerakan hijau dapat melakukan tindakan strategis dalam memperluas deliberasi untuk menanggapi tiga risiko wacana publik: komersialisasi, politisasi dan idealisasi. Studi ini fokus pada kasus gerakan perubahan iklim, dengan melihat konsep kesukarelaan sebagai sebuah strategi dalam menangkap bagaimana gerakan itu ada atau ditemukan.

Hasil studi menunjukkan bahwa gerakan sosial dapat mempengaruhi pandangan tentang masalah lingkungan dan tekanan bagi pembuat kebijakan di berbagai bidang terkait. Hal tersebut dapat menciptakan ruang untuk deliberasi secara sukarela tentang kebutuhan transformasi sosial. Fokus studi ini pada gerakan sosial mengenai komunikasi kesukarelaan strategis melalui teori demokrasi yang menunjukkan deliberasi 'otentik', dimana aktor benar-benar berusaha untuk memahami pandangan masing-masing dalam ruang publik. Sebagaimana diilustrasikan oleh gerakan hijau (*green movement*), konsep tersebut menangkap bagaimana aktivis dapat menangani tiga risiko dalam wacana publik: komersialisasi, politisasi dan idealisasi.

Kesamaan penelitian ini terletak pada model *deliberative demokrasi* yang digunakan, melalui pendekatan studi literatur artikel ini ini mengkonseptualisasikan tentang prinsip kesukarelaan sebagai strategi *deliberative* dalam ruang publik sebagaimana gerakan hijau menanggapi masalah perubahan iklim. Sementara penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus akan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* yang melihat aspek kolaborasi dan partisipatoris menangani sampah di kota Bandung.

10. Indriyati Kamil, Oekan S. Abdoellah, Herlina Agustin, Iriana Bakti.
Judul: Dialectic of Environmental Communication in Indonesian Conservation Area. Dipublikasikan: *Journal Environmental Communication* Vol.14 2020. Published online: 28 Oct 2020. Terindeks Scopus Q1. (Kamil et al., 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dialektika komunikasi mengenai konflik yang terjadi antara pemerintah dan aktivis lingkungan di Kawasan Konservasi Indonesia. Aktivis tersebut menolak kebijakan pemerintah tentang perubahan fungsi Cagar alam Kamojang yang telah mencadangkannya menjadi taman wisata alam. Tradisi komunikasi transaksional menekankan pada kesamaan makna, sudut pandang, dan kerangka referensi untuk membangun landasan yang sama di antara para pelaku lingkungan tentang pentingnya mengelola kawasan konservasi dan pentingnya menciptakan komunikasi lingkungan yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dan kerangka acuan ditemukan dalam melestarikan kawasan cagar alam menimbulkan konflik dan hambatan komunikasi. Konflik kebijakan lingkungan bisa dikurangi dengan negosiasi, pendekatan non-litigasi, dialog, dan komunikasi yang intensif, juga terbuka dan pengambilan keputusan secara interaktif. Penentuan kebijakan lingkungan perlu dilakukan melibatkan pemangku kepentingan dan aktor non-pemerintah secara formal dan proses kolektif konsultatif. Kolaborasi yang baik akan mendorong komunikasi yang sinergis dan multi-arah.

Kesamaan penelitian terletak selain pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus, juga adanya pandangan tentang penentuan kebijakan lingkungan perlu melibatkan pemangku kepentingan dan aktor non-pemerintah melalui proses konsultatif dan kolaborasi yang sinergis. Disinilah penelitian ini akan bergerak menentukan kesepakatan dalam menjalankan komunikasi melalui penanganan sampah di Kota Bandung. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam landasan teori yang dijadikan rujukan adalah teori dialektika relasional dan juga objek isu yang diangkat yaitu di Kawasan Konservasi Kamojang yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, sedangkan penelitian ini merujuk pada teori *deliberative democracy* dan konsep komunikasi partisipatoris.

- 11. April Clark, Florian Justwan, Juliet E. Carlisle, Michael Clark. Judul: Polarization politics and hopes for a green agenda in the United States. Dipublikasikan: *Journal Environmental Politics*, Volume 29, 2020, Issue 4, Pages 719-745. Terindeks scopus Q1. (Clark et al., 2020)**

Studi ini berkontribusi pada pemahaman skala besar perubahan sikap terhadap lingkungan, dan sejauh mana identifikasi partisan dan ideologi politik menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap lingkungan dan upaya untuk mempromosikan agenda hijau. Di masa lalu, dukungan untuk perlindungan lingkungan di Amerika Serikat adalah relatif non-partisan, dalam arti tidak mendekati diri dan berpartisipasi secara regular maupun irregular dalam aktivitas sebuah kelompok, golongan dan kekuatan sosial, ekonomi dan politik manapun. Namun situasi itu mulai berubah pada akhir 1970an dengan keberpihakan memainkan peran yang meningkat dalam sikap dan perilaku lingkungan hidup. Terlepas dari semakin pentingnya masalah lingkungan, Republikan, terutama Republikan konservatif, mengekspresikan skeptisisme yang lebih besar tentang perubahan iklim, pemanasan global, dan lingkungan hidup secara umum. Dalam hal ini riset ini memanfaatkan metode estimasi baru untuk mengukur derajat variabilitas partisan dan ideologis dalam kepedulian lingkungan di seluruh kelahiran kohort dan waktu, sekaligus menguji peran komposisi dan kontekstual penyebab variabilitas ini. Untuk melihat kepedulian lingkungan melalui sumber perubahan sosial ini, riset ini menggunakan metode *general social survey* (GSS) sejak tahun 1973 hingga 2014 di 28 titik waktu.

Hasil penelitian memperjelas bahwa orientasi politik memang secara signifikan terkait sikap tentang lingkungan pada tingkat individu dan juga menjelaskan perubahan lintas tahun tetapi tidak di seluruh kelompok. Komponen varians periode dalam model terpisah oleh partisan dan preferensi ideologis menunjukkan perkiraan yang cukup besar dan signifikan bahwa adanya dukungan

dalam pengeluaran lingkungan. Seperti yang diharapkan, kaum liberal atau Demokrat mengekspresikan dukungan yang lebih besar untuk pengeluaran nasional dalam melindungi lingkungan. Namun, analisis menunjukkan peningkatan berbasis periode dalam dukungan untuk pendanaan perlindungan lingkungan sejak awal akhir 1980an dan berlangsung hingga awal 1990an. Selain itu, karena tren pendukung sebanding dengan kaum liberal / Demokrat dan konservatif / Republik, tidak ada bukti peningkatan polarisasi mengenai dukungan pengeluaran lingkungan.

Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian agenda hijau dan bentuk dukungan pada kepedulian lingkungan, perbedaannya tidak hanya pada lokus penelitian yaitu di Amerika Serikat dengan fokus pada polarisasi politik yang terbentuk antara non-partisan dan ideologi dukungan sikap peduli lingkungan, tapi juga pada pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey sosial dalam beberapa dekade, mulai tahun 1970-an hingga 1990an, sedangkan penelitian yang akan dilakukan disini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkonstruksi komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* melalui penanganan sampah yang menjadi isu lingkungan hidup di Kota Bandung.

12. **Gill Seyfang, Adrian Smith. Judul penelitian: Grassroots Innovations for Sustainable Development: Towards a New Research and Policy Agenda. Dipublikasikan: *Journal of Environmental Politics*, Vol. 16, No. 4, 584 – 603, August 2007. Terindeks scopus Q1. (Seyfang & Smith, 2007)**

Penelitian ini membahas pentingnya inovasi dan aksi komunitas dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Namun penelitian ini melihat 2 hal tersebut belum terhubung. Aksi komunitas diabaikan, padahal berpotensi penting, sebagai tempat atau situs aktivitas inovatif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, studi ini menawarkan pendekatan teoritis untuk mempelajari tindakan tingkat komunitas untuk sustainability. Hal ini merupakan peluang yang ditunjukkan oleh inovasi akar rumput (grassroot) dibahas, begitu pula tantangannya menghadapi aktivitas di tingkat ini, dan agenda baru bagi riset dan kebijakan level komunitas pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan grassroot innovation berusaha mendeskripsikan jaringan aktivis dan organisasi yang menghasilkan solusi bottom-up baru untuk pembangunan berkelanjutan; solusi yang menanggapi situasi lokal dan untuk kepentingan dan nilai-nilai komunitas yang terlibat. Artinya, di inovasi akar rumput inovasi, masyarakat memiliki kendali atas proses dan hasil yang terlibat. Temuan menunjukkan bahwa komitmen dan kepercayaan antara para aktor yang terlibat dalam inovasi akar rumput sangat penting untuk keberhasilannya. Penelitian ini mengidentifikasi dua elemen penting: pengenalan baru komponen identitas dalam organisasi yang berpartisipasi dan pembentukan rasa bersama komunitas yang dibangun di sekitar tujuan kolektif. Komitmen kebijakan resmi untuk inovasi berkelanjutan dan aksi komunitas setidaknya menyediakan sumber retorik. Dukungan negara untuk inisiatif akar rumput harus berdasarkan simbolis dan lokal. Diperlukan analisis kualitatif yang mendalam untuk memahami kondisi perkembangan proses inovatif di akar rumput, dan kondisi untuk difusi yang sukses,

memeriksa peran jaringan sosial dan gerakan, komersialisasi, peningkatan skala, reproduksi, dan kebijakan.

Kesamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang memerlukan solusi dalam pembangunan berkelanjutan yaitu melalui inovasi akar rumput yang bersifat *bottom-up*, sama halnya dengan penelitian yang akan dilakukan melihat gerakan yang dilakukan diantaranya oleh para aktivis lingkungan dan forum Bandung Juara Bebas Sampah, dan elemen masyarakat lainnya yang bersama memikirkan penanganan sampah di Kota Bandung secara *bottom-up* dan pendekatan partisipatoris. Namun yang membedakan, artikel ini menggunakan penelitian survei dalam memetakan luasan, karakteristik, dampak dan hasil inovasi akar rumput. Diperlukan analisis kualitatif yang mendalam sebagaimana penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan studi kasus.

13. Iriana Bakti, Feliza Zubair, Yustikasari, Priyo Subekti. Judul Penelitian:

Android-Based Waste Management Information System.

Dipublikasikan: *Library Philosophy and Practice (e-journal)*. 2020.

<https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3997/> (Terindeks Scopus Q3)

(Bakti et al., 2020)

Penelitian ini melihat bahwa bank sampah merupakan salah satu institusi yang berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar lebih bermanfaat bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen yang mumpuni dan memungkinkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengumpulan, penarikan, dan transaksi sampah. Penyelenggara Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung,

mencoba menawarkan Sistem Informasi Penghasil Sampah (SISAPU) melalui sosialisasi kepada masyarakat sebagai solusi terhadap penanganan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan sosialisasi SISAPU, sosialisasi SISAPU proses, dan tujuan sosialisasi SISAPU.

Hasil penelitian ini menunjukkan alasan sosialisasi SISAPU adalah mudah digunakan dan mempercepat proses pengumpulan sampah, serta mampu menghasilkan uang atau menukarnya dengan pulsa seluler/token listrik, atau sayuran hidroponik. Proses sosialisasi SISAPU dilakukan secara interpersonal pada saat pengumpulan sampah dan bagi hasil, atau secara berkelompok di tempat pertemuan forum desa. Selain itu tujuan sosialisasi SISAPU adalah untuk menambah pengetahuan, menyamakan persepsi, dan membangun partisipasi dengan pengelolaan sampah berbasis android.

Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam hal penanganan sampah sebagai bagian untuk membenahi permasalahan lingkungan hidup. Hanya saja yang membedakan adalah dalam hal penggunaan media, metode penelitian, maupun fokus yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini berbasis android dalam melakukan sosialisasi sistem informasi manajemen sampah melalui bank sampah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih pada komunikasi secara komprehensif dalam melihat penanganan sampah, baik bermedia maupun komunikasi secara langsung secara kolaboratif dan partisipatoris sebagai bentuk komunikasi dalam perspektif *green politics* yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat.

- 14. Tatik Fidowaty, Olih Solihin, Poni Sukaesih Kurniati. Judul: Government Communication Strategy of Bandung City in Socialization of Regulation Concerning Administrative Sanctions of Littering. Dipublikasikan: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 225. International Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities (ICOBEST) 2018. (Fidowaty et al., 2018).**

Penelitian ini membahas strategi komunikasi pemerintah Kota Bandung dalam penyebaran peraturan tentang administrasi sanksi untuk sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive untuk aparat pemerintah dan tidak disengaja bagi masyarakat Kota Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai sanksi administrasi untuk pembuangan limbah sewenang-wenang belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak berkelanjutan dan penerapan sanksi administrasi yang tidak ketat sehingga masyarakat menjadi acuh tak acuh dengan peraturan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama sehingga masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dalam melindungi lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan banjir dan bencana lainnya. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam sosialisasi sanksi administrasi untuk menciptakan sampah sembarangan belum dilakukan secara efektif karena kendala jumlah anggaran dan sumber daya manusia yang

masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kesamaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian yaitu di Kota Bandung dengan objek pada strategi komunikasi penanganan sampah oleh pemerintah Kota Bandung, namun fokusnya lebih khusus pada penyebaran peraturan administrasi sanksi untuk sampah, dengan tujuan agar masyarakat lebih peduli dan sadar untuk mengurangi membuang sampah sembarangan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan akan lebih fokus pada tindakan pemerintah Kota Bandung bersama pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan lingkungan hidup agar masyarakat mau berpartisipasi dan berkolaborasi dalam menangani sampah dan persoalan lingkungan hidup lainnya.

15. Novieta Hardeani Sari. Judul: Penerapan Manajemen Komunikasi Strategik Pada Model Demokrasi Deliberasi Dalam Menciptakan Kebijakan Publik Yang Tepat. Dipublikasikan: *Journal Communication Spectrum*, Vol. 3 No. 1 Februari Juli 2013. ISSN: 2087-8850. Terakreditasi SINTA 3. (Sari, 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan demokrasi yang terdiri dari informasi, pemahaman dan argumentasi dari Undang-undang Ormas Nomor 17 tahun 2013 dari kelompok FGD, akademisi, NGO (Kementerian, konsil, LP3S), organisasi massa dan pemerintahan—kesbangpol, kemendagri, divisi ormas—dalam menyiapkan program kegiatan sebuah kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah terbesar yang perlu segera ditangani adalah pedoman, kesenjangan pemahaman, realita, sumber daya, aplikasi dan dampak yang tidak memenuhi keperluan LSM melalui pengembangan

kapasitas (*capacity building*). Tujuan model deliberasi demokrasi ini untuk menginformasikan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya, dan juga mempunyai hak untuk menyampaikan ide, pikiran, dan kesetaraan secara bebas.

Kesamaan penelitian terletak pada model demokrasi deliberasi yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan sebuah kebijakan. Selain juga secara metodologi menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif dan paradigma konstruktivis. Perbedaan penelitian selain objek dan fokus penelitiannya, studi yang akan peneliti lakukan akan mencari bentuk komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* melalui pendekatan partisipatoris dan demokrasi deliberasi, sehingga semua elemen masyarakat dan pemerintah bersama pemangku kepentingan bersama-sama turut mendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi bahkan berkolaborasi dalam penanganan sampah di Kota Bandung.

16. Yusran, Afri Asnelly. Judul: Kajian *Green Politics Theory* dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing. Dipublikasikan: *Indonesian Journal of International Relations*, Vol.1 No.2, Tahun 2017. ISSN online 2548-4109.

Penelitian (Yusran & Asnelly, 2017) tentang kajian *Green Politics Theory* dalam upaya menangani krisis ekologi laut di Indonesia melalui aktifitas *illegal fishing*. Menurutnya, cara pandang yang sesuai untuk membenahi krisis lingkungan laut adalah menggunakan pandangan ekosentrisme yang menjadikan kelestarian ekologi sebagai sasaran utama. Strategi berikutnya yaitu restrukturisasi politik yang berorientasi pada keberlangsungan ekologi. Kemudian perlu memperluas

desentralisasi dan pemberdayaan kearifan lokal. Disinilah letak cara pandang *green politics theory* yang dapat dijadikan pilihan solusi dalam mengatasi krisis lingkungan laut di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani krisis lingkungan laut yaitu melalui cara pandang ekosentrisme yang fokus pada pelestarian ekologi. Pemerintah Indonesia perlu membuat riset perbandingan negara yang mengaplikasikan *Green Politic Theory* sebagai konstitusi dan landasan politik. Restrukturisasi politik yang berorientasi pada keberlangsungan ekologi diperlukan dalam menangani *illegal fishing* melalui pemberdayagunaan *local wisdom*.

Kesamaan penelitian ini terletak pada cara pandang *green politics* dalam upaya menangani krisis lingkungan, hanya saja riset yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada penanganan sampah sebagai bagian dari isu lingkungan hidup di Kota Bandung, melalui komunikasi dalam perspektif *green politics* ini diharapkan dapat menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup yang memerlukan peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mengkomunikasikan kebijakan secara partisipatoris.

17. Edy Suyanto, Endriatmo Soetarto, Sumardjo, Hartrisari Hardjomidjojo.

Judul: Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi

“Green Community” Mendukung Kota Hijau. Dipublikasikan: *Jurnal Mimbar*, Volume 31 No.1, Juni 2015, pp 143-152. Terakreditasi SINTA 2.

(E. Suyanto et al., 2015)

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah selama ini kurang melihat faktor lingkungan dan kearifan lokal. Dorongan masyarakat sangat dibutuhkan, berupa *goodwill* dan juga *political will*. Penelitian ini membahas instrument dalam pembangunan kota hijau yakni *green community* dalam menangani sampah *green waste*, melalui pola *kerigan* sebagai kearifan lokal. Hal ini penting karena sekalipun teknologi dan manajemen pengelolaan sampahnya modern, jika tidak didukung partisipasi masyarakat tentu tidak akan berjalan dengan baik. Penelitian mengidentifikasi masalah pada sejauhmana partisipasi *green community* dalam penanganan sampah sebagai wujud dari kota hijau Purwokerto, kemudian melihat model kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya perwujudan kota hijau Purwokerto.

Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi pengelolaan sampah *green community* berbasis pola kerigan meliputi kelembagaan, pemberdayaan, aktivitas pelaksanaan, kerjasama, pendanaan belum maksimal. Model kebijakan pengelolaan sampah hijau berbasis *green community* mendukung kota hijau. Hasil analisis hierarki proses memperlihatkan adanya partisipasi *green community* sebagai prioritas pertama yang perlu diperhatikan. Strategi kebijakan yang harus dilakukan adalah melibatkan *green community*, revitalisasi kearifan lokal pola kerigan, menambah jumlah bank sampah, taman kota, bank pohon, revitalisasi manajemen, sosialisasi gerakan “pungut sampah”, revitalisasi manajemen, deposit sampah, asuransi sampah dengan mengedepankan ekoliterasi dan ekodesain serta revolusi mental.

Ada banyak kesamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dilihat dari sudut objek permasalahan yaitu penanganan sampah yang memerlukan partisipasi masyarakat terlebih berbasis kearifan lokal. Namun penelitian ini akan lebih fokus pada komunikasi yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari tindakan komunikasi kebijakan dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup sebagai *green politics* terutama sampah. Selain juga perbedaan penelitian terletak pada metode dan pendekatan teori, artikel ini menggunakan mix metode, sementara penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis untuk menemukan model komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* secara partisipatoris dan kolaboratif.

18. Yeni Sri Lestari. Judul penelitian: Environmentalism dan Green Politics: Pembahasan Teoritis. Dipublikasikan: Jurnal Community: Pengawas Dinamika Sosial. Volumer 2 Nomor 2, April 2016. ISSN: 2477-5746. Terakreditasi SINTA 4. (Sri Lestari, 2016)

Artikel ini membahas kajian teori tentang gerakan lingkungan hidup dan hubungan dengan politik hijau (*green politics*). Pembahasan tentang kedua teori ini sangat penting untuk dilakukan studi terkait arus sosial dan politik yang dibayangi oleh fenomena Gerakan lingkungan hidup yang berkembang di banyak negara yang kemudian menyumbangkan gagasan dalam pemikiran politik, sehingga dikenal sebagai *green politics*. Namun, pergerakan berubah oleh kelompok *green politics* di banyak negara seringkali tidak seaktif *environmentalism* gerakan yang terdiri dari kelas-kelas non partai. Berdasarkan hal ini, masalah tersebut akan ditinjau di pembahasan artikel ini adalah apakah definisi *environmentism*? bagaimana tentang

pembentukan awal lingkungan hidup? apa hubungan antara gerakan lingkungan hidup dengan green politik? Apa manfaat dari pembentukan green politik?

Studi ini menemukan bahwa lingkungan hidup adalah kontributor utama dari bentuk faktor politik ideologi hijau di banyak negara seperti di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Asia. Hal ini dikarenakan pentingnya peran aparat yang berasal dari partai politik untuk merealisasikan agenda gerakan lingkungan hidup menjadi peraturan dan keputusan negara yang mengikat semua warga di dalamnya. Di akhir analisis, artikel ini menjelaskan bahwa gerakan lingkungan hidup environmentalism memegang peranan penting dalam pencegahan keserakahan kelompok penguasa dan kepentingan ekonomi global (kapitalisme dan neoliberal) sumber daya terbatas dan berkontribusi besar pada fokus bentuk pemikiran green politics dan komitmen terhadap pembentukan sistem pemerintahan baru yang lebih arif dalam mengelola lingkungan global.

Kesamaan artikel ini terletak pada sudut pandang dan konseptual *green politics* yang dijadikan landasan berpikir untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini lebih lanjut. Dengan berbagai kebijakan yang pro lingkungan dan didukung dengan berbagai gerakan yang diinisiasi komunitas pemerhati lingkungan tentunya turut membentuk komunikasi *green politics* di Kota Bandung. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu studi literatur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melalui studi kasus akan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* melalui komunikasi kebijakan dan partisipasi masyarakat yang dijalankan pemerintah Kota Bandung bersama pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat.

Poppy Yuanita, Yeremias Torontuan Keban. Judul: Evaluasi Efektivitas Program KangPisMan di Kelurahan Sukaluyu dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Dipublikasikan: *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* Volume 4 | Nomor 2 ISSN [e]: 2579-4264 | Juli 2020. Terakreditasi SINTA 5. (Yuanita & Keban, 2020)

Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu permasalahan yang jamak terjadi di kota-kota. Sampah yang dihasilkan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah konsumsi, dan gaya hidup masyarakat yang tidak diimbangi oleh penanganan sampah ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian diperlukan upaya pengurangan, pemisahan, dan pemanfaatan sampah. Melalui program KangPisMan yang dikenalkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai konsep menangani permasalahan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program KangPisMan dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana program KangPisMan ini hasilnya sudah tercapai sesuai target awal perencanaan atau belum. Metode penelitian menggunakan deskripsi kuantitatif melalui instrument pengumpulan data berupa kuesioner terhadap 98 rumah yang menjadi sample. Penelitian efektivitas program KangPisMan ini menjadi penting sebagai bahan masukan pembuat kebijakan terkait pelaksanaan program.

Penelitian ini menghasilkan skoring variable efektivitas yang membuktikan program KangPisMan ada pada level cukup efektif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas program dianalisis melalui regresi linear berganda dengan 6 variabel bebas, adalah komitmen pemerintah, kemudahan menjalankan

program, kinerja petugas pelaksana, ketersediaan sarana prasarana, peran LSM (Lembaga swadaya masyarakat) dan persepsi masyarakat. Faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap efektivitas yaitu persepsi masyarakat dan kemudahan dalam menjalankan program.

Penelitian yang dilakukan Yuanita dan Keban (2020) ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya terutama dalam penelitian ini. Program KangPisMan sebagai salah satu program kebijakan lingkungan hidup di Kota Bandung dalam hal penanganan sampah tentunya menjadi bagian dari komitmen pemerintah, evaluasi dari efektivitas program KangPisMan disebutkan masih perlu ditingkatkan peran LSM dan persepsi masyarakat agar memiliki kesepahaman dalam memandang sampah dan berbagai isu lingkungan hidup di Kota Bandung sehingga dapat bersama-sama menjaga dan lebih peduli pada kondisi Kota Bandung sebagaimana fokus penelitian ini.

Tabel 2. 1 Matriks Review Penelitian Sejenis Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode /Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	John S. Dryzek (Dryzek, 1995)	Political and Ecological Communication	Journal of Environmental Politics, volume 4, 1995, Pages 13-30, published online 8 Nov 2007. https://doi.org/10.1080/09644019508414226 (Terindeks Scopus Q1)	Literatur ini membahas tentang komunikasi politik dan ekologi melalui prinsip demokrasi ekologis, adanya rasionalitas komunikatif, demokrasi tanpa batas, dan koordinasi melalui tatanan spontan.	- Kajian pustaka - Literature review - Teori deliberative democracy	Demokrasi adalah masalah komunikasi yang efektif, bukan hanya agregasi preferensi. Biasanya hanya komunikasi antar manusia tentang kepentingan manusia yang menjadi masalah. Tetapi demokrasi juga bisa ada atau disangkal dalam hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, demokratisasi ekologi merupakan masalah integrasi yang lebih baik antara komunikasi politik dan ekologi. Prinsip demokrasi ekologis dapat digunakan baik untuk mengkritik pengaturan kelembagaan yang ada, dan untuk menginspirasi pencarian lembaga alternatif yang akan mengintegrasikan politik dan ekologi dengan lebih baik.	- Pendekatan berbeda - Teori dapat dijadikan rujukan - Studi ini lebih menekankan pada aspek demokrasi ekologis, yang dikatakan sebagai demokrasi deliberatif. - Sedangkan penelitian ini akan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris melalui pendekatan demokrasi deliberatif ini diantara pemangku kepentingan dalam menangani sampah di Kota Bandung.

2	J Burgess, C M Harrison (Burgess and Harrison, 1998)	Environmental communication and the cultural politics of environmental citizenship	Journal Environment and Planning A, volume 30 issue 8 pages 1445-1460, 1998 (Terindeks Scopus Q1)	Paper ini menyajikan analisis komparatif tentang bagaimana perwakilan dari sektor publik, swasta, dan sukarela dari dua kota, Nottingham (Inggris) dan Eindhoven (Belanda) menanggapi tantangan komunikasi yang lebih efektif dengan warga tentang masalah <i>sustainability</i> .	- Studi Literatur - Pendeka tan analisis kompara tif	Perlunya memperluas partisipasi dalam penentuan kebijakan Agenda21 Lokal, dan dorongan untuk bentuk komunikasi yang lebih inklusif dalam perencanaan dan politik. Anggota lokakarya mendiskusikan hasil survei dan kelompok diskusi mendalam dengan penduduk setempat yang telah mengungkapkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap komunikasi lingkungan dan keahlian lingkungan.	- Pendekatan berbeda - Studi komparatif ini lebih menekankan pada perlunya partisipasi publik sebagai bentuk komunikasi inklusif melalui 21 kebijakan Agenda Lokal di Nottingham dan Eindhoven. - Sedangkan penelitian ini melalui pendekatan studi kasus akan fokus pada komunikasi dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris dan deliberative dalam menangani sampah di kota Bandung.
---	--	---	---	---	--	---	---

3	Gregg B. Walker (Walker, 2007)	Public Participation as Participatory Communication in Environmental Policy Decision-Making: From Concepts to Structured Conversations	Journal Environmental Communication Vol. 1, No. 1, May 2007, pp. 99-110 https://doi.org/10.1080/17524030701334342 (Terindeks Scopus Q1)	Esai ini mencoba untuk membedakan antara pengertian tradisional tentang partisipasi publik dan komunikasi partisipatif, terutama seperti yang dilakukan di luar AS.	- Studi Literatur - Teori Participatory Communication	Esai ini menampilkan komunikasi partisipatif sebagai pendekatan partisipasi publik yang penting. Dalam pengambilan kebijakan lingkungan hidup perlu mencari partisipasi publik pluralistik, strategi dan alat partisipatif komunikasi tampaknya penting melalui worksheet percakapan yang meliputi dialog dan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan berbeda - Teori dapat dijadikan rujukan - Tulisan atau essay ini baru sebatas kajian pustaka atau studi literatur, perlu dilakukan riset mendalam untuk memahami studi ini. - Sedangkan penelitian ini melalui pendekatan studi kasus akan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris dan kolaborasi dalam menangani sampah di kota Bandung
---	---------------------------------------	--	---	---	--	---	--

4	Kaveri Kala, Nomesh B. Bolia, Sushil (Kala et.al, 2020)	Waste management communication policy for effective citizen awareness	Journal of Policy Modeling, Volume 42, Issue 3, May-June 2020, Pages 661-678 https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.01.012 (Terindeks Scopus Q2)	Studi ini mengembangkan kerangka kerja untuk merumuskan Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang mengidentifikasi masalah warga dan saluran (komunikasi) yang tepat untuk membuat kesadaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Mix methode - Pendekatan studi kasus - Data analysis - Model Multinomial Logistic Regression (MLR) berbasis ekonometrika 	Pengelolaan sampah kota seringkali dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah saja. Di sisi lain, ada kesepakatan di seluruh dunia bahwa pemangku kepentingan perlu melibatkan warganya dalam proses ini karena mereka penghasil utama limbah perkotaan. Namun kekurangannya adalah kesadaran warga negara dan komunikasi antara Pemerintah dan warga merupakan hambatan utama dalam pengelolaan sampah kota. Oleh karena itu, diperlukan beberapa inisiatif kebijakan yang menjembatani komunikasi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode berbeda - Jenis penelitian berbeda - Artikel ini mengkaji tentang pengelolaan sampah berbasis kesadaran warga melalui pendekatan ekonometrika - Sedangkan penelitian ini melalui pendekatan studi kasus akan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris dan kolaborasi menangani sampah di kota Bandung dengan model deliberative democracy.
---	--	---	--	--	---	---	---

5	Sadie Hundemer, Martha C. Monroe. (Hundemer & Monroe, 2020)	A Co-orientation Analysis of Producers' and Environmentalists' Mental Models of Water Issues: Opportunities for Improved Communication and Collaboration	Journal Environmental Communication Vol.14 2020 Published online: 30 Oct 2020 https://doi.org/10.1080/17524032.2020.1828128 (Terindeks Scopus Q1)	Produsen pertanian dan pemerhati lingkungan memiliki kepentingan bersama dalam memelihara sumber air sehat; namun komunikasi dan kolaborasi pada langkah-langkah sustainability dapat terhalang oleh perbedaan persepsi etika air. Sehingga studi ini adalah untuk memahami bagaimana setiap kelompok berpikir tentang tantangan (isu) air melalui mental models.	- Mix methode - Model koorientasi - Mental Models - Analisis Conseptual Content Cognitive Mapping (3CM)	Hasil menunjukkan adanya perbedaan pengalaman persepsi yang tampaknya tidak sesuai antara peran produsen dalam pasokan air regional. Perspektif produsen secara operasional memungkinkan untuk melihat langsung praktik kepengurusan, sementara perspektif pencinta lingkungan menyoroti kondisi lingkungan dari industri pertanian. Temuan penelitian menyarankan bahwa bingkai, topik, dan pilihan kata dapat membantu komunikator menjembatani kesenjangan kognitif antara kelompok pemangku kepentingan.	- Metode dan objek berbeda - Teori dan model berbeda - Artikel ini mengkaji perspektif produsen pertanian dan pemerhati lingkungan melalui pemetaan 3CM. - Sedangkan penelitian ini melalui pendekatan studi kasus akan fokus pada komunikasi dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris menangani sampah di kota Bandung dengan model deliberative democracy.
---	--	--	---	---	--	--	---

6	Ivan Zwart (Zwart, 2003)	A Greener Alternative? Deliberative Democracy Meets Local Government	Journal Environmental Politics Volume 12, 2003, Issue 2, pages 23-48. https://doi.org/10.1080/09644010412331308174 (Terindeks Scopus Q1)	Artikel ini menganalisis hasil konsultatif publik yang dilakukan oleh pemerintah lokal Australia untuk menginformasikan review pengelolaan sampah. Artikel berpendapat adanya mekanisme partisipatif dalam kasus ini dipahami sebagai sifat yang konsultatif.	<ul style="list-style-type: none"> - Studi literatur - Teori deliberative democracy - Model pemerintah lokal sebagai ‘Real Deliberation’ 	Lembaga demokrasi penghijauan telah diikuti oleh beberapa ahli teori melalui bentuk demokrasi konsultatif yang terinspirasi oleh konsep ruang public (<i>public sphere</i>) Habermasian ruang, rasionalitas komunikatif dan situasi speech yang ideal. Pertahanan ekologis dari konsultatif pada dasarnya bertumpu pada kemampuannya untuk mendorong pengakuan dan dukungan kepentingan lingkungan yang dapat digeneralisasikan, dan selanjutnya melegitimasi lembaga perwakilan. Artikel ini telah siap untuk diuji kegunaan praktis dari ide-ide ini, melalui struktur partisipatif di tingkat lokal, melalui konsultasi/musyawarah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan berbeda - Teori dapat dijadikan rujukan - Artikel ini membahas tentang alternatif yang lebih “greener” bisa dilihat dari adanya demokrasi konsultatif melalui pemerintah lokal. - Sedangkan penelitian ini melalui penelitian studi kasus dengan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris dalam menangani sampah di kota Bandung dengan model deliberative democracy
---	-----------------------------	--	--	---	---	---	---

						publik dan pengelolaan sampah.	
7	Chris Ansell, Alison Gash. (Ansell & Gash, 2008)	Collaborative governance in theory and practice.	<i>Journal of Public Administration Research and Theory</i> , Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543-571. https://doi.org/10.1093/jpart/mum032 Terindeks Scopus Q1.	- Artikel ini melakukan studi meta-analisis dari literatur tentang tata kelola kolaboratif dengan tujuan mengelaborasi model kontingensi dari tata kelola kolaboratif. - Mengidentifikasi konsensus kritis yang mempengaruhi apakah model tata kelola ini akan menghasilkan atau tidaknya	- Studi Literatur - Meta-analysis - Teori collaborative governance	- Tata kelola kolaboratif dikenal dapat menyatukan pemangku kepentingan publik dan swasta secara kolektif, forum dengan badan publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. - Faktor penting dalam proses kolaboratif terdiri dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan pengembangan komitmen dan pemahaman bersama. - Studi ini menemukan	- Pendekatan berbeda - Teori dan model dapat dijadikan rujukan - Artikel ini menjelaskan secara komprehensif tentang teori dan praktik Collaborative Governance diantara pemangku kebijakan. - Sedangkan penelitian ini melalui penelitian studi kasus dengan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris dan kolaborasi dalam menangani sampah di kota Bandung dengan

				kolaborasi yang sukses. - Mengidentifikasi faktor penting dalam proses kolaboratif tersebut.		bahwa siklus kolaborasi berkembang ketika forum kolaboratif berfokus pada 'keuntungan kecil' tapi memperdalam kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. - Artikel ini diakhiri dengan diskusi tentang implikasi model kontingensi untuk praktisi dan untuk penelitian di masa mendatang tentang pemerintahan kolaboratif (collaborative governance)	model deliberative democracy.
8	Robert J. Brulle (Brulle, 2010)	From Environmental Campaigns to Advancing the Public Dialog: Environmental Communication for Civic Engagement	Journal of Environmental Communication, Volume 4, Issue 1, 2010, page 82-98. https://doi.org	Artikel ini membahas klaim kampanye identitas lingkungan tentang masalah perubahan iklim. Kampanye identitas didasarkan pada ide yang lebih efektif	- Studi literatur menggunakan tinjauan sosiologis dan literatur psikologis. Model participatory communication	Studi ini menyimpulkan tentang outline proses komunikasi lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan warga dan pengambilan keputusan yang demokratis. Model komunikasi partisipatif ini melibatkan	- Pendekatan berbeda - Teori berbeda - Artikel ini membahas kampanye identitas lingkungan dengan melibatkan dialog publik dan keterlibatan masyarakat - Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan

			/10.1080/17524030903522397 (Terindeks Scopus Q1)	pesan lingkungan melalui penerapan kognitif yang dapat mempengaruhi opini publik dan mendukung tindakan legislative dalam mengatasi global warming.	on Konsep "communication for civic engagement"	pengembangan kemampuan warga untuk bertindak secara kolektif dalam kontes framing. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi komunikasi lingkungan mulai dari kampanye identitas hingga keterlibatan masyarakat. Berikut tiga dimensi proses komunikasi: (1) identitas menuju tantangan kampanye, (2) mengalihkan proses komunikasi satu arah ke keterlibatan masyarakat (3) masyarakat sustainable secara ekologis	studi kasus dengan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris dan kolaborasi dalam menangani sampah di kota Bandung dengan model deliberative democracy
9	Markus Holdo (Holdo, 2018)	Sincerity as Strategy: Green Movements and the Problem of Reconciling Deliberative and Instrumental Action	Journal Environmental Politics, Volume 28, 2019, issue 4, pages 595-614. https://doi.org/10.1080/096	Gerakan hijau dapat melakukan tindakan strategis dalam memperluas deliberasi untuk menanggapi tiga risiko wacana publik: komersialisasi, politisasi dan	- Studi Literatur - Habermas's : Teori deliberative dan social movement	Gerakan sosial dapat mempengaruhi pandangan tentang masalah lingkungan dan tekanan bagi pembuat kebijakan di berbagai bidang terkait. Hal tersebut dapat menciptakan ruang untuk deliberasi secara sukarela tentang kebutuhan	- Pendekatan berbeda - Teori dan konsep dapat dijadikan rujukan - Artikel ini mengkonseptualisasikan tentang prinsip kesukarelaan sebagai strategi deliberative dalam ruang publik sebagaimana gerakan

			44016.2018.1457294 (Terindeks Scopus Q1)	idealisasi. Studi ini fokus pada kasus gerakan perubahan iklim, dengan melihat konsep kesukarelaan sebagai sebuah strategi dalam menangkap bagaimana gerakan itu ada atau ditemukan.	transformasi sosial. Fokus studi ini pada gerakan sosial mengenai komunikasi kesukarelaan strategis melalui teori demokrasi yang menunjukkan deliberasi 'otentik', dimana aktor benar-benar berusaha untuk memahami pandangan masing-masing dalam ruang publik. Sebagaimana diilustrasikan oleh gerakan hijau (green movement), konsep tersebut menangkap bagaimana aktivis dapat menangani tiga risiko dalam wacana publik: komersialisasi, politisasi dan idealisasi	hijau menanggapi masalah perubahan iklim. Sedangkan penelitian ini melalui penelitian studi kasus dengan fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> yang melihat aspek partisipatoris dan kolaborasi dalam menangani sampah di kota Bandung dengan model deliberative democracy
--	--	--	---	--	---	--

10	Indriyati Kamil, Oekan S. Abdoellah, Herlina Agustin and Iriana Bakti. (Kamil et al., 2020)	Dialectic of Environmental Communication in Indonesian Conservation Area	Journal Environmental Communication Vol.14 2020 Published online: 28 Oct 2020 https://doi.org/10.1080/17524032.2020.1819362 (Terindeks Scopus Q1)	Untuk mengidentifikasi dialektika komunikasi mengenai konflik yang terjadi antara pemerintah dan aktivis lingkungan di Kawasan Konservasi Indonesia. Aktivis tersebut menolak kebijakan pemerintah tentang perubahan fungsi Cagar alam Kamojang yang telah mencadangkannya menjadi taman wisata alam.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kualitatif - Jenis penelitian studi kasus - Wawancara mendalam, focus group discussion, observasi, dan studi dokumentasi - Teori Dialektika Relasional 	Temuan menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dan kerangka acuan ditemukan dalam melestarikan kawasan cagar alam menimbulkan konflik dan hambatan komunikasi. Konflik kebijakan lingkungan bisa dikurangi dengan negosiasi, pendekatan non-litigasi, dialog, dan komunikasi yang intensif, juga terbuka dan pengambilan keputusan secara interaktif. Penentuan kebijakan lingkungan perlu dilakukan melibatkan pemangku kepentingan dan aktor non-pemerintah secara formal dan proses kolektif konsultatif. Kolaborasi yang baik akan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan sama - Teori berbeda - Artikel ini mengkaji dialektika komunikasi lingkungan di Kawasan konservasi Kamojang - Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang <i>green politics</i> dengan fokus pada komunikasi kolaborasi dan partisipatoris masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menangani sampah di Kota Bandung.
----	--	--	---	---	--	---	--

						mendorong komunikasi yang sinergis dan multi-arah.	
11	April Clark, Florian Justwan, Juliet E. Carlisle, Michael Clark. (Clark, et al., 2020)	Polarization politics and hopes for a green agenda in the United States	Journal Environmental Politics, Volume 29, 2020, Issue 4, Pages 719-745. https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1654238 (Terindeks scopus Q1)	Untuk melihat pemahaman pada skala besar perubahan sikap terhadap lingkungan, dan sejauh mana identifikasi partisan dan ideologi politik menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap lingkungan dan upaya untuk mempromosikan agenda hijau. Dengan kata lain riset ini untuk melihat tingkat	- metode survey sosial, atau <i>General Social Survey (GSS)</i> dalam kurun waktu 1973 hingga 2014, di 28 titik waktu.	Hasil penelitian menunjukkan adanya orientasi politik secara signifikan terkait sikap terhadap lingkungan pada level individu dan juga menjelaskan perubahan lintas tahun tetapi tidak di seluruh kelompok. Komponen varians periode dalam model terpisah oleh partisan dan preferensi ideologis menunjukkan perkiraan yang cukup besar dan signifikan bahwa adanya dukungan dalam pengeluaran lingkungan. Tren pendukung sebanding dengan kaum	- Perbedaannya tidak hanya pada lokus penelitian yaitu di Amerika Serikat dengan fokus pada polarisasi politik yang terbentuk antara non-partisan dan ideologi dukungan sikap peduli lingkungan, tapi juga pada pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey sosial dalam beberapa dekade, mulai tahun 1970-an hingga 1990an, - Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

				kepedulian lingkungan melalui sumber perubahan sosial ini.		liberal/Demokrat dan konservatif/Republik, tidak ada bukti peningkatan polarisasi mengenai dukungan pengeluaran lingkungan.	disini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkonstruksi komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> melalui penanganan sampah yang menjadi isu lingkungan hidup di Kota Bandung.
12	Gill Sefyang, Adrian Smith. (Sefyang, Smith, 2007)	Grassroots Innovations for Sustainable Development: Towards a New Research and Policy Agenda	Journal of Environmental Politics, Vol. 16, No. 4, 584 – 603, August 2007. https://doi.org/10.1080/09644010701419121 (Terindeks scopus Q1)	Untuk melihat pentingnya inovasi dan aksi komunitas dalam pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Namun penelitian ini belum melihat 2 hal tersebut saling terhubung. Aksi komunitas diabaikan, padahal berpotensi penting, sebagai tempat atau situs aktivitas inovatif.	- Metode survey - Grassroot innovations - Niche theory	Hasil penelitian menunjukkan inovasi akar rumput berusaha mendeskripsikan jaringan aktivis dan organisasi yang menghasilkan solusi <i>bottom-up</i> baru untuk pembangunan berkelanjutan; Artinya, di inovasi akar rumput, masyarakat memiliki kendali atas proses dan hasil yang terlibat. Temuan menunjukkan bahwa komitmen dan kepercayaan antara para aktor yang terlibat dalam inovasi akar rumput	- Metode dan teori berbeda - Ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu melihat gerakan yang dilakukan diantaranya oleh para aktivis lingkungan dan forum Bandung Juara Bebas Sampah, dan pemangku kepentingan lainnya yang sama-sama memikirkan penanganan sampah di Kota Bandung secara <i>bottom-up</i> dan

				<p>Untuk menjembatani kesenjangan ini, studi ini menawarkan pendekatan teoritis untuk mempelajari tindakan tingkat komunitas untuk sustainability. Karena dapat menjadi peluang bagi inovasi akar rumput (<i>grassroot</i>).</p>		<p>sangat penting untuk keberhasilannya. Penelitian ini mengidentifikasi dua elemen penting: pengenalan baru komponen identitas dalam organisasi yang berpartisipasi dan pembentukan rasa bersama komunitas yang dibangun di sekitar tujuan kolektif. Komitmen kebijakan resmi untuk inovasi berkelanjutan dan aksi komunitas setidaknya menyediakan sumber retorik.</p>	<p>pendekatan partisipatoris. - Perbedaannya, artikel ini menggunakan penelitian survei dan teori yang digunakan dalam memetakan luasan, karakteristik, dampak dan hasil inovasi akar rumput. Diperlukan analisis kualitatif yang mendalam sebagaimana penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan studi kasus ini.</p>
13	<p>Iriana Bakti, Feliza Zubair, Yustikasari, Priyo Subekti (Bakti, et al. 2020)</p>	<p>Android-Based Waste Management Information System</p>	<p>Library Philosophy and Practice (e-journal), digitalcommons@university of Nebraska-Lincoln ISSN 1522-0222</p>	<p>Penelitian ini melihat bank sampah sebagai salah satu institusi yang berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar lebih bermanfaat bagi lingkungan,</p>	<p>- Metode deskriptif - Komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan alasan sosialisasi SISAPU adalah mudah digunakan dan mempercepat proses pengumpulan sampah, serta mampu menghasilkan uang atau menukarnya dengan pulsa seluler / token listrik, atau</p>	<p>- Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menangani sampah sebagai bagian untuk membenahi permasalahan lingkungan hidup.</p>

			(Terindeks Scopus Q3)	<p>kesehatan, dan ekonomi. Sehingga diperlukan sistem manajemen yang mumpuni memungkinkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengumpulan, penarikan, dan transaksi sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan sosialisasi SISAPU sebagai sistem informasi penanganan sampah berbasis android, sosialisasi SISAPU proses, dan tujuan sosialisasi SISAPU.</p>		<p>sayuran hidroponik. Sosialisasi SISAPU Prosesnya dilakukan secara interpersonal pada saat pengumpulan sampah dan bagi hasil, atau secara berkelompok di tempat pertemuan forum desa. Tujuan Sosialisasi SISAPU adalah untuk menambah pengetahuan, menyamakan persepsi, dan membangun partisipasi dengan pengelolaan sampah berbasis android.</p>	<p>- Perbedaannya ada pada penggunaan media, metode penelitian, maupun fokus yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini berbasis android dalam hal melakukan sosialisasi sistem informasi manajemen sampah melalui bank sampah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih pada komunikasi secara komprehensif dalam melihat penanganan sampah, baik bermedia maupun komunikasi secara langsung secara kolaboratif dan partisipatoris sebagai bentuk komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>greenpolitics</i> yang dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan.</p>
--	--	--	-----------------------	---	--	---	---

14	(Fidowaty et al., 2019) (Fidowaty, et al., 2018.	Government Communication Strategy of Bandung City in Socialization of Regulation Concerning Administrative Sanctions of Littering.	Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 225. International Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities (ICOBEST) 2018.	Penelitian ini membahas strategi komunikasi pemerintah Kota Bandung dalam penyebaran peraturan tentang administrasi sanksi untuk sampah.	- Kualitatif deskriptif - Analisis AIDDA	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai sanksi administrasi untuk pembuangan limbah sewenang-wenang belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak berkelanjutan dan penerapan sanksi administrasi yang tidak ketat sehingga masyarakat menjadi acuh tak acuh dengan peraturan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama sehingga masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dalam melindungi lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan banjir dan	- Pendekatan dan analisis berbeda. - Kesamaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian yaitu di Kota Bandung dengan objek pada strategi komunikasi penanganan sampah oleh pemerintah Kota Bandung, - Namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> pemerintah Kota Bandung dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan lingkungan hidup agar masyarakat mau berpartisipasi dan berkolaborasi dalam menangani sampah sebagai persoalan lingkungan hidup di
----	---	--	---	--	---	---	---

						bencana lainnya. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam sosialisasi sanksi administrasi untuk menciptakan sampah sembarangan belum dilakukan secara efektif karena kendala jumlah anggaran dan sumber daya manusia yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas.	Kota Bandung.
15	Novieta Hardeani Sari. (Sari, 2013)	Penerapan Manajemen Komunikasi Strategik Pada Model Demokrasi Deliberasi Dalam Menciptakan Kebijakan Publik Yang Tepat	Journal Communication Spectrum, Vol. 3 No. 1 Februari Juli 2013. ISSN: 2087-8850 Terakreditasi SINTA 3.	Untuk menganalisa relevansi dari demokrasi terkait dengan informasi, pemahaman, dan argumentasi terhadap UU ormas No. 17/2013 berdasarkan kelompok FGD, akademisi, NGO	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan studi kasus - Jenis penelitian kualitatif - Paradigma konstruktivis - Teori konstruksi sosial 	Hasil penelitian menunjukkan problem terbesar yang perlu diselesaikan yaitu masalah pedoman atau panduan, kesenjangan dalam definisi, tujuan, realitas, sumber daya, penerapan dan dampak yang belum sesuai dengan kebutuhan LSM dapat dilalui menggunakan pengembangan kapasitas. Model deliberasi demokrasi ini menunjukkan bahwa	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan penelitian selain objek dan fokus penelitiannya, studi yang akan peneliti lakukan akan mencari bentuk komunikasi lingkungan dalam perspektif <i>green politics</i> melalui model partisipatoris dan demokrasi deliberasi, sehingga semua elemen masyarakat dan pemerintah bersama

				(kementerian, konsil, LP3S), organisasi massa dan pemerintahan (kesbangpoal kemendagri divisi ormas) untuk menyiapkan program kerja untuk mencapai kebijakan.		masyarakat sebagai pelaksana kebijakan memiliki hak dalam menyampaikan ide, pikiran, kesetaraan secara bebas.	pemangku kepentingan bersama-sama turut melaksanakan kebijakan dan program penanganan sampah sebagai bagian dari isu lingkungan hidup di Kota Bandung.
16	Yusran & Afri Asnelly. (Yusran dkk, 2017)	Kajian <i>Green Politics Theory</i> dalam upaya menangani krisis ekologi laut Indonesia terkait aktifitas illegal fishing	Indonesian Journal of International Relations, Vol.1 No.2, Tahun 2017. ISSN online 2548-4109. https://doi.org/10.32787/ijir.v1i2.29	Untuk menganalisis permasalahan <i>illegal fishing</i> di Indonesia melalui pemikiran <i>Green Politics Theory</i>	- Pendekatan kualitatif - analisis deskriptif - Teori green politics	Untuk menangani krisis lingkungan laut perlu menggunakan pendekatan ekosentrisme karena menjadikan kelestarian ekologi sebagai sasaran utama. Pemerintah Indonesia perlu melakukan studi banding kepada negara yang sudah menerapkan GPT dalam landasan politik dan konstitusinya. Dalam hal ini perlu merestrukturisasi	Ada kesamaan penelitian pada cara pandang <i>green politics</i> dalam upaya menangani krisis lingkungan, hanya saja riset yang akan dilakukan dalam riset ini objeknya adalah <i>illegal fishing</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada penanganan sampah sebagai bagian dari isu lingkungan hidup di Kota Bandung, melalui komunikasi lingkungan

						politik yang berorientasi pada kesinambungan ekologi, memperluas desentralisasi, upaya penanganan illegal fishing dilakukan dengan pemberdayaan kearifan lokal.	dalam perspektif <i>green politics</i> diharapkan dapat menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup yang memerlukan peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan dan partisipasi masyarakat yang berorientasi pada kesinambungan ekologi.
17	Edy Suyanto, Endriatmo Soetarto, Sumardjo, Hartrisari Hardjomidjojo. (Suyanto dkk, 2015)	Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi “Green Community” Mendukung Kota Hijau	Jurnal Mimbar, Volume 31 No.1, Juni 2015, pp 143-152. Terakreditasi SINTA 2.	Riset ini mengkaji partisipasi green-community dalam pengelolaan sampah <i>green waste</i> dan membangun model alternatif kebijakan dan strategi pengelolaan sampah domestic berbasis partisipasi green community	- Mix methode, kualitatif dan kuantitatif menggunakan Survey Analisisi Hierarki Proses	Riset ini mengemukakan bahwa partisipasi green community yang berbasis pola kerigan dalam mengelola sampah meliputi kelembagaan, pemberdayaan, aktivitas pelaksanaan, kerjasama, pendanaan yang belum maksimal. Model ini mendukung kota hijau. Hasil analisis hierarki proses membuktikan bahwa partisipasi green community merupakan priorotas utama yang perlu diperhatikan. Strategi	- Metode dan pendekatan analisis berbeda - Kesamaannya terletak pada sudut objek permasalahan yaitu penanganan sampah yang memerlukan partisipasi masyarakat terlebih berbasis kearifan lokal. Namun penelitian ini akan lebih fokus pada komunikasi yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari komitmen politik

				dalam upaya mewujudkan kota hijau.		kebijakan yang harus dilakukan adalah melibatkan green community, revitalisasi kearifan lokal pola kerigan dengan mengedepankan ekoliterasi dan ekodesain juga revolusi mental.	dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup sebagai green politik terutama sampah. Perbedaanya penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan mix methode dan survey, namun akan menggunakan paradigma konstruktivis untuk menemukan model komunikasi greenpolitic melalui teori deliberative democracy dengan pendekatan studi kasus.
--	--	--	--	------------------------------------	--	---	--

18	Yenni Sri Lestari. (Lestari, 2016).	Environment alism dan Green Politics: Pembahasan Teoritis.	Jurnal Community: Pengawas Dinamika Sosial, Volume 2 No.2, April 2016. ISSN: 2477-5746. https://doi.org/10.35308/jcpd.s.v2i2.137 Terakreditasi SINTA 4.	Artikel ini membahas kajian teori tentang gerakan lingkungan hidup dan hubungan dengan politik hijau (green politic). Pembahasan tentang kedua teori ini sangat penting untuk dilakukan studi terkait arus sosial dan politik yang dibayangi oleh fenomena gerakan lingkungan hidup yang berkembang di banyak negara yang kemudian menyumbangkan gagasan dalam pemikiran politik, sehingga dikenal sebagai <i>green politics</i> .	Studi literatur	Studi ini menemukan bahwa lingkungan hidup adalah kontributor utama dari bentuk faktor politik ideologi hijau di banyak negara seperti di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Asia. Hal ini dikarenakan pentingnya peran aparat yang berasal dari partai politik untuk merealisasikan agenda gerakan lingkungan hidup menjadi peraturan dan keputusan negara yang mengikat semua warga di dalamnya. Di akhir analisis, artikel ini menjelaskan bahwa gerakan lingkungan hidup <i>environmentalism</i> memegang peranan penting dalam pencegahan keserakahan kelompok penguasa dan kepentingan ekonomi global (kapitalisme dan neoliberal) sumber daya	Kesamaan artikel ini terletak pada sudut pandang dan konseptual green politic yang dijadikan landasan berpikir untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini lebih lanjut. - Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu studi literatur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melalui studi kasus akan fokus pada komunikasi green politic yang dijalankan pemerintah Kota Bandung bersama pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat.
----	--	--	--	--	-----------------	--	--

						terbatas dan berkontribusi besar pada fokus bentuk pemikiran green politics dan komitmen terhadap pembentukan sistem pemerintahan baru yang lebih arif dalam mengelola lingkungan global.	
19	Poppy Yuanita, Yermias T. Keban. (Yuanita dkk, 2020)	Evaluasi efektivitas program KangPisMan di Kelurahan Sukaluyu dan faktor yang mempengaruhinya	Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, vol.4 no.2, e-ISSN: 2579-4264, Juli 2020. DOI: https://doi.org/10.26760/jrh.Y4i2.93-108 Terakreditasi SINTA 5.	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program KangPisMan dan faktor yang mempengaruhinya.	- Pendekatan deduktif - Jenis penelitian kuantitatif deskriptif - Analisis Efektivitas	Penelitian menunjukkan hasil penilaian skoring variabel efektivitas bahwa program KangPisMan ada pada level cukup efektif. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas program dilakukan analisis regresi linier berganda dengan enam variable bebas, yaitu komitmen pemerintah, kemudahan menjalankan program, kinerja petugas pelaksana, ketersediaan sarana prasarana, peran LSM, dan persepsi masyarakat.	- Teori dan pendekatan berbeda - Namun riset ini dapat menjadi acuan dalam penelitian ini. Program KangPisMan sebagai salah satu program kebijakan lingkungan hidup di Kota Bandung dalam hal penanganan sampah tentunya menjadi bagian dari komitmen pemerintah, evaluasi dari efektivitas program KangPisMan disebutkan masih perlu ditingkatkan peran LSM dan persepsi masyarakat agar

							memiliki kesepahaman dalam memandang sampah dan berbagai isu lingkungan hidup di Kota Bandung sehingga dapat bersama-sama menjaga dan lebih peduli pada kondisi Kota Bandung sebagaimana fokus penelitian ini.
--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Landasan Teoritis

2.2.1. Deliberative Democracy

Demokrasi, menurut (Habermas, 1982) harus memiliki dimensi deliberatif, yaitu posisi ketika kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu melalui diskursus publik, artinya demokrasi deliberatif ingin membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga negara. Fishkin menjelaskan bahwa demokrasi memberikan “suara” kepada masyarakat dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menemukan penyelesaian masalahnya (Fishkin, 2009). Hal ini merupakan sesuatu yang esensial dalam demokrasi, namun terkadang dalam penerapannya dimaknai berbeda. “Suara dalam demokrasi diartikan sebagai kesempatan bagi setiap warga negara sebagai individu dalam mengarahkan kebijakan negaranya sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut John Gastil (Gastil, 2008) teori demokratik deliberatif terdiri dari berbagai macam pendekatan dan pandangan tentang *demokrasi deliberatif*, yakni ide bahwa warga negara berkontribusi langsung pada diskusi dan debat publik yang substantif dan inklusif dan berusaha mencapai konsensus yang masuk akal mengenai kebaikan publik. Teori demokratik deliberatif juga menekankan kebutuhan deliberasi di dalam pemerintahan itu sendiri dan khususnya dalam praktik pemerintahan dimana pejabat publik dan warga bekerja sama. Karya dalam bidang ini berisi pandangan dari berbagai sumber—dari filsafat moral atau politik hingga ke hipotesis empiris baru. Teori ini berakar pada kritik terhadap praktik politik, dan kemudian berkembang menjadi bidang intelektual lintas-disiplin, lintas-metodologis, dan kajian akademis praktis

Karya kontemporer tentang deliberasi sering menelusuri akar hingga ke tulisan teoritis social Jerman, Jurgen Habermas, yang berpendapat bahwa *ruang publik* yang hidup, ruang dimana berbagai macam anggota masyarakat bebas berinteraksi dan membahas perhatian bersama di luar institusi publik formal. Dalam *situasi pembicaraan ideal*, orang dapat memperdebatkan isu berdasarkan kekuatan argumennya, tanpa dipengaruhi oleh ketimpangan dalam kedudukan sosial, ekonomi atau hukum para partisipan.

Meski disajikan sebagai abstraksi filosofis (dan latar belakang asumsi yang mendasari diskursus legal dan politik demokratis), teori deliberatif awal yang ditulis atau diinspirasi oleh Habermas mendapat kritik karena dipandang kurang realis. Secara khusus beberapa kritik mengatakan bahwa deliberatif yang bebas adalah tidak mungkin, karena adanya ketimpangan yang luas diantara warga di dalam masyarakat mana pun. Menurut pendapat ini, mempromosikan cita-cita deliberatif berarti mengabaikan perbedaan dan memberikan legitimasi politik yang lemah bagi institusi publik. Norma diskursus publik seharusnya tidak mempromosikan deliberasi dengan mengesampingkan bentuk pembicaraan alternatif lain, seperti testimoni personal dan advokasi khususnya di dalam dan diantara sub-sub publik yang tidak memiliki kepentingan yang sama. Tetapi, meski dikritik, beberapa teoritis terus mengembangkan dengan penuh konsep demokrasi yang diilhami oleh cita-cita deliberatif.

Sejak akhir 1990-an, banyak teori dan riset demokratik deliberatif fokus pada praktik aktual dari percakapan politik, diskusi politik, debat dan dialog politik, serta praktik komunikasi yang terkadang dapat mempresentasikan aspek dari gagasan

deliberatif. Teori-teori empiris bervariasi dalam mendefinisikan deliberasi, namun umumnya memahami deliberasi sebagai proses diskursif dalam mempertimbangkan argumen tentang bentuk tindakan paling tepat untuk mengatasi problem publik. Deliberasi membutuhkan pengetahuan latar belakang dan mengeksplorasi solusi-solusi alternatif, yang semuanya menghargai kesetaraan kesempatan berbicara dan diversitas sudut pandang dan pengalaman partisipan.

Konsep deliberasi ini berakar dalam *praktik* deliberasi aktual. Dimulai dengan juri warga dan sel perencanaan pada tahun 1970-an, sedangkan desain deliberatif dikembangkan dengan melibatkan warga biasa di pemerintahan, debat publik, dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam beberapa hal, ini mempresentasikan kebangkitan kembali gerakan forum di awal abad ke-20 di Amerika Serikat, namun model deliberatif modern sering memberi warga negara peran lebih langsung dalam pembuatan kebijakan dan mengambil pelajaran dari eksperimen internasional dengan konferensi, jajak pendapat nasional, forum isu nasional, penganggaran partisipatif, lingkaran studi, pertemuan kota abad 21, dan proses lain.

Banyak karya empiris tentang deliberasi meneliti efek dari praktik deliberatif ini (atau simulasinya). Secara khusus, para teoritis telah mencurahkan banyak perhatian pada bagaimana para partisipan dalam peristiwa deliberatif mengubah kualitas dan arah dari sikap yang berkaitan dengan kebijakan. Hipotesis umum dalam banyak riset deliberatif menyatakan bahwa partisipan memperbaiki opini non-reflektif mereka dengan memberikan penilaian yang berdasarkan pertimbangan pengalaman mendengar dan mengajukan argumen yang terkait dengan pengalaman personal dan informasi umum. Dalam beberapa kasus, teoritis

berpendapat bahwa partisipan kemungkinan mengubah pandangan dasar mereka pada suatu isu, bergeser dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya. Secara agregat, ini dapat menghasilkan sesuatu yang mendekati cita-cita konsesus publik umum.

Tetapi temuan sejumlah studi menunjukkan bahwa peristiwa deliberatif hanya mengkristalisasikan opini publik di seputar penilaian bersama dalam situasi khusus. Studi percakapan politik, diskusi dengan struktur longgar, dan pengalaman deliberatif dengan mediasi, seperti menonton program berita tentang suatu isu, lebih mungkin mempertajam kejernihan dan konsistensi pandangan orisinal partisipan, khususnya ketika aktivitas itu melibatkan partisipan yang berpikiran maju, yang dapat mengenali orang-orang yang berbagi pandangan. Sebaliknya, konsesus yang luas sering muncul dalam kejadian yang didesain secara hati-hati untuk mempertahankan deliberasi di antara berbagai kelompok publik.

Teori deliberatif lainnya yang sedang dikembangkan adalah teori yang mengeksplorasi bagaimana deliberasi dalam juri pengadilan, forum dan tempat lainnya membentuk sikap dan perilaku kewarganegaraan partisipan. Karya lain berusaha menjelaskan situasi dimana deliberasi publik mempengaruhi kebijakan publik atau kemampuan warga komunitas lokal di masa depan dan keinginan akan pendekatan deliberatif untuk politik secara umum.

Riset kualitatif maupun kuantitatif juga meneliti apa jenis komunikasi yang terjadi selama kejadian deliberatif tatap muka dan online. Temuan awal menunjukkan bahwa deliberasi melibatkan banyak cerita dan pembicaraan semi-naratif. Argumen formal dan kontra-argumen tampak tidak sering terjadi, kecuali

sengaja dibangun dalam stuktur peristiwa itu sendiri. Temuan awal ini merumitkan teori deliberatif empiris, dengan menunjukkan pentingnya penjelasan secara tepat apa jenis perilaku komunikasi (dan kognisi) yang beroperasi dalam deliberasi dan dampak behavioral dan sikap dari perbedaan ini terhadap partisipan, pembuat kebijakan dan politik komunitas.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitanya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan pada tahap mengidentifikasi masalah, mencari pemecahan masalah, sampai melaksanakan berbagai kegiatan. Partisipasi lebih menekankan pada partisipatori daripada demokrasi representative. Hal ini dikarenakan partisipasi melibatkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini pun akan menunjukkan keterkaitan adanya dialog dan ruang publik secara konsultatif dan deliberatif sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama menangani permasalahan sampah minimal di lingkungan tinggalnya demi kenyamanan kota dan lingkungan hidup pada umumnya. Apalagi jika sebuah kebijakan maupun program yang dirumuskan pemerintah ini kemudian dikomunikasikan dengan berbagai cara yang deliberatif melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, tentu akan merasakan andil dalam pengambilan keputusan terkait penanganan sampah secara bersama.

2.2.2. Komunikasi Partisipatoris

Partisipasi merupakan prinsip dalam pembangunan dengan dukungan yang datang dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, donatur, masyarakat sipil, dan warga negara biasa (Tufte & Mefalopulos, 2009). Partisipasi dan komunikasi adalah istilah-istilah yang sebenarnya memiliki konotasi yang luas dan beragam. Menurut Tufte dan Mefalopulos (2009) dikatakan sebagai komunikasi partisiporis, yang merupakan pendekatan berbasis dialog, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, persepsi dan opini di antara berbagai pemangku kepentingan sehingga memudahkan pemberdayaan mereka. Komunikasi partisipatoris bukan hanya pertukaran informasi dan pengalaman, namun juga eksplorasi dan menambah pengetahuan baru dengan tujuan untuk mengatasi situasi yang perlu ditingkatkan.

Istilah *Participatory Communication* dicetuskan pertama kali dalam seminar yang disponsori oleh *Center for Advanced Studies and Research for Latin America* pada 1978 (Huesca, 2002). Sebagaimana disampaikan (Thomas, 2002) komunikasi partisipatoris berhubungan dengan akses terhadap pembangunan dan pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan yang merujuk dari teori Paulo Freire (ahli pendidikan di Brazil).

Menurut Robert Huesca, Freire mendekonstruksi dan tidak menerima paradigma komunikasi pembangunan dengan sifat vertical, *top-down*, dan searah atau linier (Huesca, 2002). Lebih lanjut, Freire menegaskan bahwa untuk menyuarakan kata-kata secara individu maupun bersama-sama merupakan hak semua orang, bukan hanya diperuntukkan bagi beberapa orang saja (Freire, 1985).

Pendekatan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam berkomunikasi sangatlah penting demi keberhasilan setiap program atau pembangunan, hal ini memerlukan kesadaran untuk melibatkan masyarakat dalam membangun dan mengelola diri (Thomas, 2002)). Paulo Freire sebenarnya lebih fokus pada kajian Pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed*. Namun ia turut berkontribusi dalam memaknai komunikasi sebagai proses penyadaran dan “penemuan diri” melalui dialog yang bebas.

Demikian pula menurut Bordenave, 1972, dalam (White & Ascroft, 2004) mengungkap bahwa komunikasi partisipatoris diartikan sebagai proses komunikasi yang memberikan kebebasan, hak dan akses yang sama dalam memberikan pandangan, perasaan, keinginan, pengalaman dan menyampaikan informasi ke masyarakat untuk menyelesaikan sebuah masalah.

Fokus komunikasi partisipatoris, menurut (Tuftte & Mefalopulos, 2009) adalah pada adanya dialog, suara, media didik, aksi refleksi, dijelaskan dalam artikelnya yang berjudul “*A Practical Guide Participatory Communication*” adalah sebagai berikut:

1. *Dialog*; dialog adalah bagian dari prinsip komunikasi partisipasi, dalam dialog peserta akan mengungkap usulan dengan prinsip aksi-refleksi-aksi dan komunikasi horizontal. Melalui dialog, proses dimulai dengan memahami program yang terdapat kesenjangan informasi. Jenis masalah yang terjadi dapat berupa sosial dan ekonomi masyarakat atau isu sampah atau lingkungan dll. Strategi komunikasi yang dikembangkan adalah merangkum isu general untuk memperoleh gambaran yang terjadi dan dapat merangkum solusi atau pemecahan sebuah masalah.
2. *Suara*; suara menjadi hal yang utama dalam komunikasi dialogis, yaitu adanya kesadaran dalam hubungan antar manusia. Fokus Freire ada pada pergantian kekuasaan, menyuarakan kelompok marjinal, waktu dan ruang dalam mengartikulasikan keprihatinannya, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan bertindak.

3. *Media*; peran media dalam proses komunikasi partisipatif memiliki kepedulian yang sama. Media merupakan akses penting membuka ruang komunikasi dan dialog, media ini membuka akses sebagai langkah dalam penilaian komunikasi partisipatif, namun yang sering tidak dibuat eksplisit dalam pendekatan komunikasi partisipatif adalah peran penting dari akses media, peliputan dan pemakaian di seluruh dunia, jadi komunikasi partisipatif juga menyangkut suara dalam lingkup publik yang dimediasi. Strategi yang lebih partisipatif menekankan media yang memungkinkan lebih banyak dialog, seperti media berbasis masyarakat, dimana media sebagai saluran komunikasi.
4. *Aksi Refleksi*; Aksi refleksi dan aksi merupakan suatu penegasan yang dilakukan oleh masyarakat setelah melakukan dialog dan menghasilkan konsensus bersama. Sehingga dilakukanlah proses pemberdayaan yang didasarkan pada masalah yang ada. Dari aksi-aksi tersebut menjawab rumusan masalah yang terjadi pada masyarakat.

Pada hakikatnya, menurut (Hardinata, 2010), partisipasi mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom-up*), dengan pendekatan memperlakukan masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan.

The World Bank, 1994 dalam (Purbani, 2017) mendefinisikan partisipasi adalah sebuah proses yang meliputi pengaruh stakeholders dan pembagian kewenangan dalam inisiatif pembangunan, pengambilan keputusan, dan sumber daya yang berdampak terhadapnya. Partisipasi dapat memiliki bentuk berbeda-beda, mulai dari berbagi informasi dan metode konsultasi, hingga mekanisme untuk kolaborasi dan penguatan (*empowerment*) yang memberikan stakeholders lebih banyak pengaruh dan kontrol.

Sutoro, 2003, dikutip oleh (Hardinata, 2010), menjelaskan bahwa secara substantif partisipasi mencakup tiga hal, yaitu:

1. Pendapat; setiap individu mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya (*voice*) dalam proses pemerintahan.
2. Akses; setiap individu mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik.
3. Kontrol; setiap individu mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Keterlibatan warga sebagai bentuk partisipasi warga memiliki tingkatan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Empat Tingkat Keterlibatan Warga

Tingkat	Penjelasan	Tujuan	Strategi Komunikasi	Metode/Teknik/Alat
<u>Information Exchange:</u> warga menyampaikan dan memperoleh informasi	Pertukaran informasi untuk mengkondisikan partisipasi warga	Penyadaran warga. mengumpulkan opini publik. Membangun momentum bagi penyusun kebijakan.	Komunikasi tertulis. Komunikasi elektronik. Komunikasi lisan. Komunikasi visual.	<i>Opinion poll survey.</i> Komentar publik. Dengar pendapat. Poster dan media kampanye.
<u>Consultation:</u> warga dimintai masukannya dalam menganalisis, menyusun alternative dan mengambil keputusan	Penggunaan alat-alat untuk proses informasi. Adanya forum atau Lembaga yang memproses masukan	Pendidikan warga. Mendorong debat publik. Menjabarkan nilai-nilai. Memperluas ketersediaan informasi. Memperbaiki keputusan.	Pertemuan tatap muka, atau pertemuan online dengan warga.	Pertemuan warga (<i>public meeting</i>). Konsultasi online (<i>e-Consultation</i>).
<u>Engagement:</u> Pemerintah bekerja dengan warga dalam keseluruhan	Penggunaan alat-alat untuk memperoleh informasi, kadang	Melibatkan warga dalam penyelesaian masalah dan pengambilan	Pertemuan tatap muka dengan warga. Pertemuan	Musyawarah warga (<i>public deliberation</i>). Musyawarah online (<i>online deliberation</i>).

proses penyusunan kebijakan agar aspirasi warga selalu dipertimbangkan	pengambilan keputusan bersama.	keputusan. Mengembangkan kapasitas dalam melaksanakan kebijakan. Memperbaiki hasil pelaksanaan.	online dengan warga. Pendelegasian kewenangan.	
<u>Collaboration:</u> Pemerintah dan warga menjadi mitra/partner dalam proses penyusunan kebijakan.	Proses penguatan kapasitas untuk membangun kerjasama berkelanjutan di antara berbagai kelompok kepentingan dan pelaksanaan kebijakan.	Mewakili berbagai pemangku kepentingan. Melibatkan pakar. Mengurangi konflik kepentingan. Memperbaiki kebijakan. Mengembangkan kapasitas dalam pelaksanaannya.	Membangun komite penasihat. Merancang proses pengambilan keputusan bersama (<i>share decision making</i>).	Perundingan multipihak. Proses konsensus kebijakan.

Sumber: *Local Government Support Program, 2009 dalam (Purbani, 2017).*

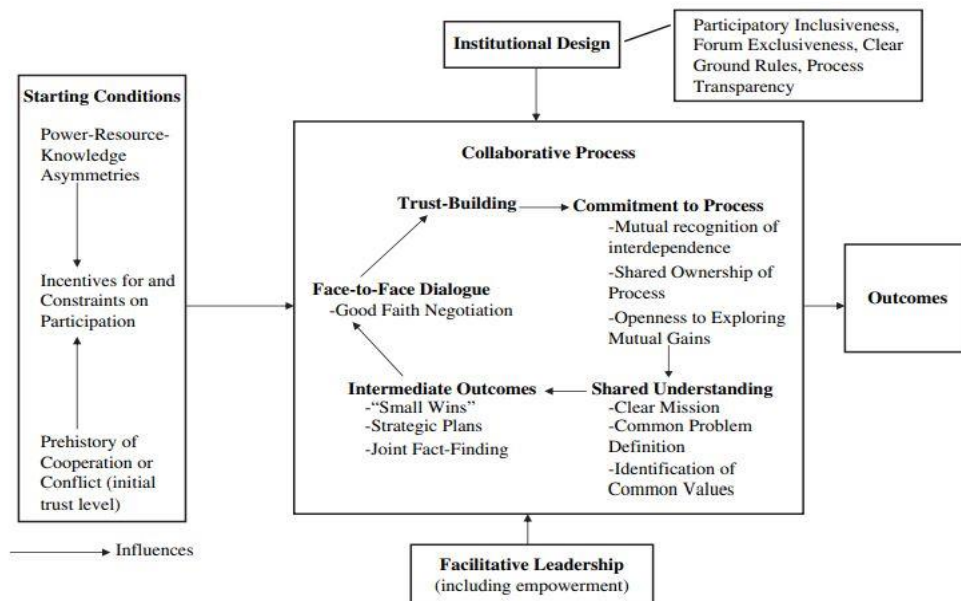
Selanjutnya, model tata kelola pemerintahan yang partisipatif menurut Fung, Wright (2001) dijelaskan bahwa penguatan pemerintahan partisipatif dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu: (1) Berorientasi praktis, artinya fokus pada persoalan praktikal dan nyata; (2) Partisipasi *bottom-up* dengan target aktor yang secara langsung terkena dampak dari suatu program pemerintah, umumnya adalah masyarakat dan SKPD/Dinas. Tenaga ahli memegang peranan penting dalam memfasilitasi pengambilan keputusan, namun tidak memiliki kewenangan eksklusif dalam memutuskan hal penting; (3) Musyawarah solusi, hal penting dari proses musyawarah ini adalah bahwa peserta menemukan alasan mengapa mereka dapat menerima tindakan kolektif, yang tidak harus berasal dari

pilihan atau pihak yang benar-benar mereka dukung atau yang menurut mereka paling menguntungkan, namun mereka dapat menerima hal tersebut.

2.2.3. Collaborative Governance

Collaborative governance atau tata kelola kolaborasi merupakan suatu pengaturan yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga publik, yaitu pemerintah dan melibatkan aktor non-negara sebagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan secara bersama/kolektif dan formal, berorientasi pada konsensus dan deliberatif dengan tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, atau pengelolaan aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Pengertian *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Chris Ansell dan Gash tersebut meliputi 6 (enam) parameter, diantaranya: (1) adanya musyawarah *collaborative governance* yang diinisiasi oleh lembaga publik; (2) terdapat aktor non-negara sebagai partisipan di dalam forum *collaborative governance*; (3) proses pembuatan keputusan tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik, tapi juga harus melibatkan partisipan secara langsung; (4) forum ini diorganisir secara formal dan terdapat pertemuan kolektif secara intensif; (5) forum menghasilkan keputusan yang diperoleh melalui kesepakatan atau konsensus; dan (6) proses kolaborasi difokuskan kepada kebijakan publik maupun manajemen publik.



Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007)

Gambar tersebut memperlihatkan situasi awal dikarenakan adanya *starting condition* berupa kewenangan atau ketidakseimbangan sumber daya, hal ini menyebabkan dorongan atau penghambat munculnya partisipasi dan adanya sejarah konflik serta kerjasama sebelumnya. Kolaborasi adalah suatu proses yang selalu berulang. Melalui kepercayaan yang dibangun oleh para pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dalam menjalankan suatu proses, membagi ilmu dan pemahaman untuk mendapatkan solusi sementara dan juga diadakan suatu komunikasi bersama antar pihak untuk bernegosiasi dalam memutuskan sesuatu. Dialog tatap muka pun merupakan bagian dari sarana membangun kepercayaan. Siklus ini akan terjadi secara berulang dalam kolaborasi.

Kolaborasi pun memerlukan rancangan atau desain kelembagaan, yang meliputi adanya partisipasi yang inklusif (terbuka), aturan dan proses yang transparan, serta keterbukaan. Dalam rancangan kelembagaan atau institusional ini

pun perlu kolaborasi yang disupport oleh kepemimpinan yang mampu menjembatani berbagai pihak. Proses kolaborasi tersebut diharapkan dapat digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun dalam mengelola aset publik.

Dari berbagai literatur, definisi terbaik dari *collaborative governance* dapat diartikan sebagai bentuk baru dari proses tata kelola pemerintah yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan satu sama lain yang bekerja melalui dialog rutin dan interaksi dalam mengejar dari tujuan bersama (Huxham, 2000). Peran utama *collaborative governance* adalah untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan mencampur sumber yang berbeda dan menciptakan pemikiran inovatif melalui negosiasi dan kerjasama (Innes & Booher, 1999)

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh (Healey, 1992) dan (Innes & Booher, 1999) bahwa kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mewakili bagian-lintas organisasi, kelompok kepentingan, dan orang-orang yang peduli terhadap dampak lingkungan. Mereka bekerja untuk mencapai konsensus usulan tentang pemecahan masalah, tujuan yang ingin diwujudkan serta tindakan yang akan dilakukan. Kolaborasi memerlukan komitmen berkelanjutan untuk pemecahan masalah (Gray, 1989); (Selin & Chavez, 1995) (Weber, 2003).

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjamin sinergitas atau kolaborasi antara para pemangku kepentingan, baik *state actor* dan *nonstate actor* dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, maupun evaluasi. Kolaborasi tidak hanya dilakukan untuk tujuan aktor masing-masing, tapi

juga untuk tujuan bersama. Berikut peranan dari masing masing aktor menurut (Suhandy & Fernanda, 2001):

1. Negara/Pemerintah: Negara yang dimaksud disini yaitu meliputi lembaga politik (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan sektor publik. Peranan serta tanggung jawab Negara diantaranya menyelenggarakan kekuasaan dalam bentuk memerintah dan membangun lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan pembangunan;
2. Sektor swasta: Peran swasta dalam pembangunan adalah sebagai sumber peluang untuk peningkatan produktifitas, menyerap tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik serta pertumbuhan ekonomi. Swasta disini mencakup insan usaha yang aktif dalam interaksi sistem pasar seperti industri, perdagangan, jasa, koperasi, perbankan dan sektor informal;
3. Masyarakat (*Civil Society*) diartikan sebagai kumpulan institusi atau organisasi non pemerintah dan sektor swasta dan dapat berupa ruang tempat kelompok -kelompok sosial dapat bergerak. bentuknya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Non Pemerintah, akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain lain.

Pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan dengan menciptakan pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi di perkotaan, terutama masalah lingkungan hidup, mulai banyak dilakukan di beberapa kota di dunia, termasuk di Indonesia, dalam penelitian ini pun akan diterapkan dalam penanganan sampah di Kota Bandung, terlebih perlunya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

2.2.4. Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

Teori tentang pemangku kepentingan secara substansi telah berkembang sejak R. Edward Freeman menulis konsep pemangku kepentingan pada tahun 1984. Definisi klasik Freeman tentang pemangku kepentingan adalah suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan

organisasi (Friedman & Miles, 2006). Sedangkan perkembangan konsep pemangku kepentingan dimaksud adalah meluasnya konsep pemangku kepentingan yang sebelumnya secara eksklusif fokus pada strategi dan moralitas perusahaan menjadi terbuka bagi masuknya berbagai jenis organisasi sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Namun demikian pendekatan yang berbeda dikemukakan oleh Eden & Ackerman, 1998 dalam (Orr, 2014) menyatakan bahwa pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan untuk merespon, bernegosiasi dan mengubah masa depan strategis suatu organisasi.

Orr (2014) mengemukakan paling tidak ada tiga syarat utama suatu kelompok dapat diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan atau tidak, yakni apabila kelompok tersebut mempunyai (1) kekuatan untuk mempengaruhi; (2) legitimasi hubungan dengan perusahaan, dan (3) urgensi terhadap berbagai tuntutan dari pemangku kepentingan. Pendekatan pertama menempatkan pemangku kepentingan sebagai sesuatu yang inklusif. Pendekatan ini menunjukkan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan yang dianggap sebagai kunci yang menciptakan masyarakat berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.

Secara khusus Orr (2014) menghubungkan teori pemangku kepentingan dengan pembuatan kebijakan lingkungan. Pembuatan kebijakan lingkungan adalah suatu tahapan yang tidak sederhana dimana pemerintah memiliki kewajiban dalam pengambilan keputusan-keputusan yang tertuang dalam bentuk payung hukum. Suatu proses yang kompleks dengan beragam kepentingan dari tiap pemangku kepentingan yang terdiri dari komunitas/LSM, kelompok bisnis, akademisi/ilmuwan, media, pejabat politik dan masyarakat setempat, dengan

mengerahkan kekuatan dan pengaruh di setiap tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini ada dua hal penting yang harus dilakukan yaitu menyatukan beragam sudut pandang dalam penyusunan kebijakan lingkungan melalui proses yang lebih inklusif dan partisipatif. Orr (2014) memerinci setidaknya terdapat 17 (tujuh belas) pemangku kepentingan bidang lingkungan yang dimaksud, antara lain:



Gambar 2. 2 Pemangku Kepentingan Lingkungan (Orr, 2014)

Pemangku kepentingan menurut Orr (2014) mempunyai *interest* atau kepentingan yang berbeda, diantaranya:

1. Satu pemangku kepentingan bisa jadi hanya mempunyai kepentingan ekonomi sebagai sesuatu yang paling mendasar.
2. Pemangku kepentingan lain kemungkinan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan profesional demi organisasinya, seperti dalam proses penyusunan kebijakan untuk membangun jaringan yang dapat menguntungkan secara profesional.
3. Individu atau perwakilan dari sebuah organisasi pemangku kepentingan mungkin memiliki kepentingan pribadi yang dapat berpengaruh kepada partisipasinya, hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, keluarga, teman, afiliasi politik, atau nilai-nilai agama.
4. Kepentingan politik seperti kekuasaan, advokasi, dan kampanye pun merupakan sumber motivasi bagi para pemangku kepentingan.
5. Beberapa pemangku kepentingan pun mungkin lebih tertarik kepada kepentingan hukum demi memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum atau etika.

6. Para pemangku kepentingan mungkin pula memiliki kepentingan akademis dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan ini berpartisipasi karena alasan penelitian seperti wawancara atau pengamatan proses kebijakan.
7. Pemangku kepentingan bisa pula mempunyai kepentingan secara geografis karena kehidupannya dipengaruhi adanya kedekatan geografis dengan sumber masalah, contohnya, masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan tempat pembuangan sampah, atau Kawasan konservasi alam, tentu akan memberi perhatian lebih besar terhadap lingkungannya daripada masyarakat lainnya.
8. Pemangku kepentingan lainnya bisa jadi mempunyai kepentingan demografis dikarenakan adanya kesenjangan masalah misalnya seperti ketimpangan jaminan sosial bagi manula.
9. Pemangku kepentingan lainnya bisa dalam hal adanya kepentingan simbolik atau humanistik yang bersumber dari nilai-nilai personal atau kedekatan emosi, sebagai contoh dalam hal menghargai alam menjadi motivasi untuk memelihara kelestarian lingkungan.

Keterlibatan peran aktif pemangku kepentingan inilah yang dapat menjadi suatu gerakan yang diinisiasi warga bersama pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk kepedulian lingkungan hidup di suatu wilayah, sama halnya dalam menangani sampah kota secara bersama demi menjaga lingkungan hidup dari berbagai pencemaran yang mengotori kota. Maka diperlukan sebuah komitmen dan cara pandang dari pemimpin daerah dalam menangani berbagai isu lingkungan hidup—disinilah *green politics* berlaku.

2.2.5. Pentahelix

Pentahelix adalah istilah yang digunakan untuk menyebut partisipasi dan kerjasama dari lima pembangunan elemen, yaitu pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat dan lingkungan. Sebagai sebuah konsep, ide pentahelix adalah kekuatan sinergi antara Akademisi (*Academics*), Bisnis (*Business*), Komunitas (*Community*), Pemerintah (*Government*), dan Media (Baihaki et al.,

2020; Tri Hardianto et al., 2017). Unsur-unsur tersebut disingkat sebagai ABCGM atau model kolaborasi dari berbagai bagian unsur yang diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan keterlibatan.

Penggunaan model pentahelix dapat menjadi sinergi yang hakekatnya berupaya dalam membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif dan kemitraan yang harmonis di antara pemangku kepentingan sehingga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas (Baihaki et al., 2020). Tujuannya untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok agar bisa saling berinteraksi melalui dialog yang konstruktif sehingga menghasilkan keberhasilan bersama. Sinergi ini untuk saling melengkapi perbedaan dan mencapai hasil yang optimal melalui sinergi dalam menghargai perbedaan ide, pendapat dan mau berbagi.

Sinergi pentahelix tidak mementingkan diri sendiri namun juga memikirkan bagaimana untuk saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah dan hasil yang lebih besar dari kolaborasi tersebut. Sinergi ini tentunya mempunyai proses yang harus dilalui oleh masing-masing pihak sehingga membutuhkan waktu dan konsistensi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun rasa saling percaya dan sinergi akan bisa dilakukan bersama-sama terutama dalam mencari solusi.

Menggunakan model Pentahelix akan menghasilkan keberhasilan secara optimal jika semua bersedia dan mampu dalam berkolaborasi. Terutama jika unsur pemerintah dapat merangkul seluruh unsur Pentahelix lainnya yang tidak hanya

sebagai subordinasi dan objek semata tetapi sebagai mitra yang kreatif dan konstruktif dalam berpartisipasi untuk pembangunan. Demikian juga para akademisi dengan keahliannya diharapkan mampu dalam memberikan terobosan-terobosan inovatif, kajian aplikatif termasuk terlibat dalam komitmen dan kepeduliannya termasuk menjadi bagian dari kekuatan kritis konstruktif.

Kunci utama keberhasilan dari kolaborasi pentahelix adalah adanya sinergi dan komitmen yang kuat di antara pemangku kepentingan tersebut. Akademisi bertindak sebagai *drafter* yang didukung oleh investor dan dibantu oleh orang-orang yang mempunyai keinginan dan minat yang sama dalam membangun daerah serta dibantu oleh publikasi dan promosi dari media.

Kehadiran pemerintah daerah mempunyai peran yang penting sebagai pengawas dan pembuat kebijakan yang relevan dengan upaya untuk membangun daerah dan konsep yang sesuai dengan kriteria dan pengembangan daerah tersebut. Adapun dalam membangun suatu daerah membutuhkan kontribusi dan sinergi dari setiap komponen masyarakat.



Gambar 2. 3 Pentahelix dalam pengelolaan sampah

Model Pentahelix sangat berguna dalam mengelola kompleksitas berbasis aktor karena setiap lini mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi di daerahnya (Hidayat et al., 2021), seperti contohnya akademisi yang mempunyai

kekuatan pengetahuan sehingga diharapkan bisa memunculkan konsep pembangunan yang lebih efisien, murah, dan ramah lingkungan. Kemudian kontribusi pemangku kepentingan lainnya juga sangat berperan penting sehingga kerja sama adalah kunci dalam mencapai tujuan yang telah dibuat bersama-sama.

Pada akhirnya pentahelix dapat menjadi kolaborasi antar komponen dalam masyarakat dan setiap komponen mempunyai kontribusi berdasarkan distribusinya (Hidayat et al., 2021). Tetapi masing-masing komponen ini tidak bekerja sendiri-sendiri namun berjalan dengan visi dan misi yang sama untuk mengembangkan dan mengoptimalkan suatu daerah.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Green Politics

Green Politics atau politik hijau pada dasarnya merupakan aliran pemikiran politik terkini. Di satu sisi fokus pada isu-isu yang sangat tua dalam politik dan kajian filosofis, seperti hubungan antara dunia manusia dan non-manusiawi, status moral hewan, 'kehidupan yang baik', dan regulasi etika dan politik inovasi teknologi. Namun di sisi lain, *green politics* ditandai dengan beberapa masalah kontemporer seperti implikasi ekonomi dan politik dari perubahan iklim, masalah konsumsi *oil*, konsumsi yang berlebihan, persaingan sumber daya dan konflik, dan meningkatnya tingkat ketidaksetaraan global dan nasional (Barry, 2014).

Perubahan lingkungan merupakan bentuk *politicised environment*. Menurut Bryant (2000) kerusakan lingkungan dapat dilihat dari sumber politik (*political resources*), kondisi konflik aktor, serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial

ekonomi. Sumber politik masa lalu berupa kebijakan yang sangat sentralistik, antroposentrik dan teknokratik, yang tercermin dari mekanisme perijinan pemanfaatan sumberdaya. Semua harus dari pusat yang memonopoli pengetahuan dan kebenaran, sehingga hal-hal yang berbau lokal dan tradisional diabaikan. Akibatnya masyarakat menjadi tamu di rumahnya sendiri dengan tuan rumah baru yang berasal dari pemilik modal di luar daerah tersebut. Di sinilah otonomi daerah yang mengamanatkan sebuah proses desentralisasi sebenarnya bisa menjadi jalan keluar.

Munculnya isu lingkungan yang semakin beragam ikut mempengaruhi ranah politik mulai dari tingkat lokal sampai internasional, hal ini selanjutnya dikenal dengan sebutan *Green Politics*. Diskusi tentang isu lingkungan selalu terkait dengan pola kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang khususnya dalam pembangunan dan ekonomi. *Green Politics* merupakan isu atau permasalahan baru dalam kajian politik kontemporer yang sudah berkembang hingga kajian internasional (Ardian, 2018). *Green Politics* pada awalnya hadir dalam aksi-aksi yang dilakukan untuk menanggapi atau menentang beragam permasalahan lingkungan hidup (Sri Lestari, 2016).

Menurut Hayward (dalam (Apriwan, 2011), perkembangan *Green Politics* berasal dari fakta yang menunjukkan manusia adalah bagian dari alam, maka mempunyai implikasi bagi perilaku politiknya. Argumen tersebut menunjukkan bahwa teori politik harus selaras dengan teori-teori lingkungan. Artinya, dalam hal ini perlunya penelitian terkait isu lingkungan dikaitkan dengan kajian lintas bidang atau multidisipliner, diantaranya adalah komunikasi lingkungan, komunikasi

politik, dan komunikasi kebijakan. Sebagaimana (Cox, 2013) mengungkapkan bahwa komunikasi lingkungan adalah bagian dari sub bidang ilmu komunikasi yang meliputi beberapa area studi yang berlainan atau interdisipliner.

Ada banyak faktor yang melandasi munculnya gerakan *green politics* di beberapa negara antara lain kerusakan lingkungan alam, fenomena bencana alam yang makin mengancam kehidupan manusia, keserakahan pemerintah yang terlihat dari berbagai peraturan tanpa mendahulukan kelestarian lingkungan, adanya tuntutan globalisasi, mengedepankan pembangunan ekonomi global dan kapitalisme (Sri Lestari, 2016). Lahirnya gerakan lingkungan di berbagai dunia ini diantaranya sangat berdampak pada perubahan lanskap sosial politik sebuah negara. Hal ini memberi kesempatan pada berbagai lapisan masyarakat, baik awam maupun profesional (ilmuwan, komunitas, aktivis, dll) untuk turut memperhatikan lingkungan hidup. Hal inilah yang melahirkan gerakan peduli lingkungan yang berorientasi pada kebijakan politik pemerintah dan dikenal sebagai perspektif *green politics*, dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan pelestarian lingkungan.

Kajian-kajian komunikasi *green politics* atau yang berkaitan dengan konsep atau teori yang berbicara politik lingkungan (*political environmental*) pada dasarnya masih minim dilakukan dalam bentuk penelitian atau riset-riset secara mendalam. Mengacu pada buku (Connelly, J and Smith, 2003) yang berjudul "*Politics and the Environment: From Theory to Practice*", menunjukkan adanya politik lingkungan hidup yang berbeda dengan politik konvensional yang sudah dikenal pada aspek kehidupan lain. Merujuk pada Connelly dan Smith, politik lingkungan hidup

(*environmental politics* atau dengan istilah *green politics*) pada dasarnya bertumpu pada dua pilar utama, yakni adanya pengakuan keterbatasan sumber daya yang ada di bumi, dan adanya dimensi etika dalam hubungan manusia dengan lingkungan alam. Dua pilar ini mendorong kalangan hijau (*green*) untuk mencari, memikirkan dan mengkaji ulang kebijakan dan praktik politik, sosial dan ekonomi yang selama ini berlaku.

Bagian yang paling penting dari tulisan Connelly dan Smith ini adalah fokus pada berbagai isu yang perlu dipahami supaya mudah untuk dirumuskan dan diputuskan kebijakan lingkungan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Ada empat faktor yang perlu dipahami oleh pembuat kebijakan, yaitu persoalan tindakan bersama, putaran atau siklus isu, rasionalitas yang dibatasi, dan penggunaan kekuasaan.

Gerakan *green politics* di Indonesia pun pada awalnya karena adanya kesadaran yang dipicu situasi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang lebih berorientasi pada eksploitasi pertumbuhan dan strategi pembangunan sehingga dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup. Sejak pemerintahan Orde Baru, Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pada era tersebut dalam tulisannya (Salim, 2003) seringkali mengampanyekan model pembangunan alternatif. Paradigmanya tidak pada pemikiran “anti-pembangunan” dan juga bukan pada hidup sederhana secara subsisten, aka tetapi lebih pada pola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Hakekat pembangunan menurut Salim ada pada upaya sustainability atau keberlanjutan kehidupan. Pembangunan berkelanjutan ini memiliki beberapa prasyarat (Salim, 2003), yaitu (1) dapat melampaui lebih dari satu-dua generasi dengan memperhatikan dampak jangka Panjang; (2) sadar akan adanya keterkaitan antar pelaku alam, sosial, dan buatan manusia; (3) terpenuhinya kebutuhan manusia dan kelompok masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan pada generasi berikutnya; (4) hemat dalam menggunakan sumber daya alam, limbah-polusi yang rendah, ruang-*space* yang minim, semaksimal mungkin energi diperbaharui, tanpa energi yang tidak dapat diperbarui, dan memiliki manfaat yang optimal bagi lingkungan, sosial, budaya-politik dan ekonomi; (5) pembangunan diorientasikan pada pemberantasan kemiskinan, kesamaan dan keadilan sosial dalam aspek kualitas hidup, sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Wacana pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini sejak tahun 1980-an memang pasang surut, hal ini sejalan dengan gerakan demokratisasi di tanah air. (Asgart, 2003) menyatakan adanya peran kelompok Ornop (organisasi non-pemerintah) dan masyarakat lainnya yang turut merespon wacana pembangunan berkelanjutan secara dinamis. Sebagaimana Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Walhi, Kehati, Bina Desa, HUMA, adalah beberapa Ornop yang aktif mengampanyekan *green politics* di tanah air dan juga ikut mewacanakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu bentuk gerakan *green politics* ini perlu diarahkan pada partisipasi publik dan hak asasi manusia (Asgart, 2003). Menurut Asgart, pemerintah perlu mendorong pembangunan

berkelanjutan ini berujung pada ‘kemakmuran berkelanjutan’ sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai *enviromentalisme* saja, namun harus diarahkan juga pada nilai-nilai sosial-budaya yang demokratis.

Demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam harus diperhatikan secara serius, sebab pembangunan berkelanjutan akan berkembang manakala demokrasi tersebut juga berkembang. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, demokratisasi perlu diarahkan pada adanya keadilan struktur ekonomi-politik melalui pemberian akses dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat pun harus melalui keterlibatan atau partisipasi dan representasi. Hal ini penting karena pembangunan berkelanjutan bukan sekedar program top-down pemerintah saja, namun masyarakat pun turut serta dalam merancang secara partisipatif.

Partisipasi publik, keterbukaan, musyawarah, serta akuntabilitas pemerintahan dan birokrasi harus mendapat perhatian mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian berbagai program pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan menjadi ‘milik masyarakat’ sehingga dapat memecahkan permasalahan maupun harapan publik secara nyata.

Ketika pembangunan berkelanjutan dijalankan secara seimbang dan harmonis antara kebutuhan pembangunan, kelestarian lingkungan, dengan aspek sosial, maka partisipasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung terciptanya *good enviromental governance*. (Arnstein, 1969) menyatakan bahwa kontrol warga (*citizen control*) adalah partisipasi publik pada level tertinggi dimana masyarakat mempunyai kewenangan dalam memutuskan, melaksanakan, dan

mengawasi pengelolaan sumber daya. Maka pemerintah sudah sewajarnya perlu konsultasi publik terlebih dahulu sebelum melaksanakan berbagai program kebijakan terutama dalam menangani isu-isu lingkungan hidup. Disinilah cara pandang *green politics* dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang pro lingkungan yang dapat melibatkan publik/masyarakat bersama pemangku kepentingan lainnya.

2.3.2. Komunikasi Lingkungan

Komunikasi lingkungan adalah salah satu disiplin ilmu dalam bidang komunikasi, yang di dalamnya meliputi kajian dan teori yang fokus pada komunikasi hubungan manusia dengan lingkungan. Konsep utama komunikasi lingkungan mencakup beberapa asumsi, antara lain cara manusia mempersepsi dan mempengaruhi dunia, juga sebaliknya bagaimana persepsi tersebut membentuk perilaku manusia dengan alam dan hubungan antar keduanya (Cox, 2013). Dalam lingkup akademisi, konsep komunikasi lingkungan merupakan penggabungan antar berbagai ilmu disiplin lain, seperti teori ekofeminisme, ekologi politik, dan di luar teori lingkungan, seperti teori konstruksi sosial maupun teori sistem. Konsep komunikasi lingkungan ini dapat digunakan di dalam sebuah instansi atau perusahaan, beberapa fokus diantaranya menjelaskan dialektika ruang publik tentang lingkungan, termasuk politik, media, budaya dan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan.

Menurut Oepen & Hamacher dalam tulisannya yang berjudul “*Environmental Communication for Sustainable Development: A Practical Orientation*”, komunikasi lingkungan merupakan suatu proses komunikasi dan produk media dalam mendukung efektivitas pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan implementasinya terhadap lingkungan (Oepen & Hamacher, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan dapat digunakan untuk menciptakan kesepahaman tentang permasalahan lingkungan.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, teori yang berbicara tentang komunikasi lingkungan muncul sebagai teori yang berbeda dari teori retorika tradisional di Amerika Serikat pada tahun 1980. Studi retorika dalam proses pengembangan ilmu komunikasi yang menjadikan komunikasi dinilai oleh banyak pihak sebagai multidisiplin, seperti menjelaskan ekonomi politik dan ekologi politik. Banyaknya penelitian tentang komunikasi lingkungan yang menyebabkan beragam tafsiran mengenai konsep ini sehingga menjadi kajian yang menarik. Salah satunya dengan pendekatan postkulturalis, konsep ini membantu dalam merepresentasikan segala pengetahuan duniawi ke dalam sebuah simbol. Sebagai contoh kata ‘lingkungan’ disimbolkan sebagai alam yang banyak terdapat makhluk hidup dan alam serta yang memisahkan makhluk hidup. Hal yang menarik di dalam konsep komunikasi lingkungan ini bahwa komunikasi mampu memediasi hubungan antara manusia dengan alam melalui beragam cara dan orientasi. Salah satunya melihat representasi manusia terhadap alam yang seolah-olah termediasi bagaimana alam ‘berbicara’. Kondisi lingkungan yang selalu dinamis menjadikan konsep-konsep komunikasi lingkungan sebagai bentuk mediasi. Beberapa

akademisi atau para ahli yang mengkritik tentang konsep komunikasi lingkungan dikatakan bahwa konsep ini tidak hanya tentang pemahaman hubungan antara manusia dengan lingkungan ataupun alam, melainkan pada manusia sebagai pelaku dapat menciptakan perubahan lingkungan sosial sekitar secara seimbang.

Cox (2013) mengatakan bahwa komunikasi lingkungan merupakan kajian teori yang memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Teori yang bersifat pragmatis, melalui teori ini membantu para pelaku (aktor) untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan cara memobilisasi, kewaspadaan atau mengetahui batasan-batasan, serta bersifat persuasif.
2. Teori yang bersifat konstitutif, membantu merepresentasikan permasalahan lingkungan serta memposisikannya sebagai subyek. Dengan kata lain juga dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk mendukung suatu kepentingan kelompok/individu dalam konferensi pers, sebagai contoh kampanye tentang cara mengolah sampah dan kepedulian lainnya; atau bagaimana melihat strategi komunikasi Pemkot Bandung melalui program KangPisMan dalam menangani sampah plastik.

Lebih lanjut (Cox, 2013) menyatakan bahwa meskipun studi komunikasi lingkungan mencakup serangkaian topik, pada umumnya penelitian dan praktik komunikasi lingkungan dapat dikategorikan dalam tujuh area, yang secara singkat dipaparkan sebagai berikut:

1. Retorika dan wacana lingkungan; merupakan area paling luas dalam studi komunikasi lingkungan yang mencakup retorika dari aktivis lingkungan, tulisan mengenai lingkungan, kampanye kehumasan bisnis serta media dan website.
2. Media dan jurnalisme lingkungan; merupakan area studi yang fokus pada bagaimana pemberitaan, iklan, program komersial dan situs internet menggambarkan masalah alam dan lingkungan. Area studi ini juga mencakup dampak dari media terhadap perilaku masyarakat hingga agenda-setting dan framing media.
3. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan mengenai isu lingkungan.
4. Edukasi publik dan kampanye advokasi atau disebut juga social marketing; merupakan area studi yang mencakup kampanye-kampanye yang bertujuan

untuk merubah perilaku masyarakat untuk mencapai suatu tujuan sosial atau lingkungan yang diinginkan.

5. Kolaborasi lingkungan dan resolusi konflik; merupakan area studi yang mengkaji model alternatif dalam mengatasi ketidakpuasan terhadap partisipasi publik dan metode resolusi konflik. Aspek penting dalam area studi ini adalah kolaborasi dengan cara mengundang para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi pemecahan masalah dan bukan dalam bentuk advokasi maupun debat.
6. Komunikasi risiko; area studi yang secara tradisional mengevaluasi keefektifan strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi teknis mengenai kesehatan hingga pendekatan yang lebih modern, yaitu melihat dampak dari pemahaman masyarakat terhadap risiko terhadap penilaian publik dalam menerima risiko.
7. Reprerentasi isu lingkungan dalam budaya populer dan green marketing; merupakan area studi yang mengkaji penggunaan gambar, musik, program televisi, fotografi dan iklan komersial dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

Adapun strategi efektif dalam menjalankan komunikasi lingkungan ini, paling tidak harus memenuhi beberapa aspek seperti di bawah ini (Littlejohn, Stephen W and Karren Foss, 2009):

1. Mengidentifikasi permasalahan dan analisa situasi
Salah satu cara untuk mengidentifikasi permasalahan dan analisa situasi adalah dengan menggunakan metode PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) yaitu metode partisipasi yang menghubungkan antar seseorang dalam berbagi, berkenalan atau saling mengenalkan serta menganalisa fakta-fakta sosial ke dalam kehidupan sosialnya termasuk pembangunan.
2. Analisa pelaku dan pengetahuan praktis
Beberapa pendekatan dapat dikategorikan dalam analisa pelaku dan pengetahuan praktis: (1) Segmentasi Audiens, dibutuhkan beberapa instrument dan teknik dalam mengidentifikasi aktor atau pelaku dan hubungan diantaranya, seperti wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), kemudian analisis SWOT; (2) Perilaku kritis sebagai faktor pengaruh kunci, dalam hal ini dapat melakukan pendekatan terhadap para pegiat lingkungan yang perhatian terhadap berbagai isu lingkungan hidup dan kelestarian alam; (3) Pemasaran sosial atau social marketing, dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan kampanye sosial untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial atau perubahan sosial lainnya.
3. Komunikasi yang obyektif, berguna untuk meningkatkan pengetahuan.
4. Strategi pembangunan komunikasi, terkait dengan seberapa banyak perencanaan secara spesifik dan sistematis. Perencanaan didefinisikan

sebagai proses mengidentifikasi permasalahan, aktor atau pelaku, dan berfikir cara mencapai tujuan.

5. Strategi partisipasi grup, strategi ini merupakan elemen yang bersifat krusial sebab sebagai kunci utama terletak pada kepemilikan, dimana proses produksi dan komunikasi bukan untuk atau tentang seseorang melainkan dengan dan oleh dirinya sendiri.
6. Menyeleksi media, memerlukan pemilihan sumber media, akses media, serta jaringan yang terbentuk media itu sendiri.
7. Desain pesan, keefektifan media tergantung pada pemahaman pesan informasi yang ditangkap oleh audiens yang dituju. Maka dari itu perlu diperhatikan ketika mendesain pesan, yaitu: konten atau isi pesan, mencakup keakuratan, kelengkapan, aksesibilitas, dan waktu; penempatan pesan, dapat menciptakan tema yang atraktif dan persuasif sesuai selera audiens.
8. Produksi media dan pre-test, beberapa langkah yang harus diambil adalah: memilah-milah konten, desain, media persuasi dan yang bersifat memoribiltas, membuat rencana yang bermanfaat dari bahan yang terkumpul, melakukan pre-test sebelum produksi, menginformasikan kepada seluruh bagian yang terlibat dalam produksi.
9. Tampilan media dan implementasi program, poin penting dalam proses strategi ini terletak pada manajemen perencanaan yang diambil dari strategi pembangunan sebagai tugas pokok oleh ahli komunikasi.
10. Proses dokumentasi, pengawasan dan evaluasi, strategi ini memfokuskan pada penerapan atau implementasi efektivitas dan relevansi serta dampak maupun pengaruh program secara keseluruhan.

Kaitan antara komunikasi, pemangku kepentingan, dan wacana

sebagaimana dijelaskan oleh Cox (2013) yaitu:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya merupakan aksi simbolis. Keyakinan, sikap dan perilaku kita terhadap isu lingkungan sepenuhnya dimediasi oleh komunikasi. Dengan demikian ruang publik kemudian muncul sebagai sebuah ruang diskursif untuk berkomunikasi tentang lingkungan.
2. Kolaborasi merupakan bentuk komunikasi konstruktif dan terbuka dimana pihak yang terlibat (partisipan) bekerja sama dalam penyelesaian masalah lingkungan dan resolusi konflik. Kolaborasi diwujudkan dalam dialog yang fokus pada tujuan jangka panjang, proses pembelajaran dan pembagian kekuasaan (*power sharing*). Dalam beberapa kasus, partisipan akan berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus sehingga diskusi dan perdebatan tersebut tidak akan selesai hingga masing-masing pihak mengemukakan sikapnya yang berbeda-beda dan menemukan kesamaan.
3. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan istilah kunci (*key term*) yang terkait erat dengan kolaborasi dimana dalam hal ini masing-masing

pihak yang terlibat dalam sebuah perselisihan (*dispute*) memiliki kepentingan yang jelas (*a stake*) dalam pencapaian sebuah hasil (*outcome*). Sebuah kolaborasi yang sukses dimulai dengan duduknya para pemangku kepentingan yang terlibat dalam satu meja yang berarti bahwa para pemangku kepentingan bersedia untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Konsep komunikasi lingkungan menjadi landasan yang mendasari penelitian ini, terutama dalam fokus melihat partisipasi masyarakat dalam menjalankan komunikasi kebijakan penanganan sampah sebagai isu lingkungan diantara pemerintah dan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya sebagai sebuah komitmen yang dibangun bersama demi kelangsungan lingkungan hidup yang lebih baik.

2.3.3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Selain itu, komunikasi politik merupakan wilayah pertarungan yang diwarnai oleh persaingan teori, agenda, dan konsep dalam membangun jati dirinya. Oleh karena itu pula, komunikasi yang membicarakan tentang politik seringkali diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, dan sering dikaitkan sebagai kampanye pemilu (*election campaign*) karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antarkandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye (McQuail dalam Cangara, 2009).

Pada dasarnya komunikasi politik merupakan sebuah proses dari berbagai kepentingan para aktor politik dalam menjalankan sebuah perencanaan politik yang sesuai dengan platform partai atau individu, untuk dikomunikasikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi dasar politik. Seperti apa yang diungkapkan Alfind (dalam Cangara, 2009) melihat bahwa komunikasi merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam politik. Pada dasarnya komunikasi politik adalah area diskusi bagi para aktor politik untuk membahas dan menyampaikan kepentingan masyarakat untuk menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti apa yang diungkapkan oleh McNair (dalam Cangara, 2009:36) menjelaskan bahwa :

“Political communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state reward or punishes)”

McNair mengemukakan bahwa komunikasi politik sebagai murni diskusi tentang alokasi sumber daya pendapatan, tentang otoritas yang dikeluarkan secara resmi oleh aktor politik yang diberi kekuatan untuk membuat keputusan hukum, legislatif dan eksekutif, dan sanksi ketika negara harus memberikan sebuah hadiah atau hukuman. Doris Graber dengan tulisannya *Political Language* (dalam Cangara, 2009: 36) menjelaskan bahwa “Komunikasi politik itu tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik seperti boikot, protes dan unjuk rasa.”

Jika sebuah kiasan yang menyatakan bahwa politik itu hanya sebuah seni dari retorika, Graber menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan aksi dan juga simbol politik yang diungkapkan kepada pemerintah sebagai suara rakyat yang merupakan suara Tuhan yang harus diperjuangkan.

Komunikasi merupakan sebuah proses yang terjadi antara komunikator kepada komunikan, pada dasarnya komunikasi politik diharuskan dalam prosesnya adalah komunikasi *dyadic* bukan komunikasi satu arah, sehingga menjadi sebuah keuntungan kepada dua belah pihak antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu sendiri. Sumarno (dalam Harun, 2006: 5) mendefinisikan komunikasi politik sebagai berikut :

“Suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti, oleh sebab itu komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun bahasan komunikasi politik akan menampilkan karakter sebagai identitas keilmuan, baik sebagai ilmu murni yang bersifat ideal dan berada dalam lingkup “*Das Sollen*” (apa yang seharusnya), maupun sebagai ilmu terapan yang berada dalam dunia empiris dalam lingkup wilayah “*Das Sein*” (kenyataan/ praktik).

Maswadi Rauf seorang pakar politik (dalam Harun dan Sumarno, 2006: 3) menjelaskan tentang komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Disamping itu Maswadi Rauf menempatkan komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkaitan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.

Ada beberapa komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik yang dikemukakan oleh Asep Saeful Muhtadi (2008: 31-34) dalam buku *Komunikasi Politik Indonesia*, antara lain:

1. Komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi.
2. Khalayak komunikasi politik, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya.
3. Saluran-saluran komunikasi politik, yakni setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik.

Sementara Budiardjo (2002:163), dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan, bahwa :

“Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Proses ini merupakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*) dan kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur yang dinamakan sebagai “perumusan kepentingan” (*interest articulation*).

Sementara Cangara (2016: 31-32) menjelaskan unsur-unsur dari komunikasi politik yang lebih lengkap, di antaranya :

1. Komunikator politik. Komunikator politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif.
2. Pesan politik, ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.
3. Saluran atau media politik, ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya.

4. Sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum.
5. Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (*vote*) dalam pemilihan.

2.3.4. Struktur Sistem Politik

Secara terminologis, sistem politik pada hakikatnya terdiri dari unsur-unsur yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian yang disebut supra-struktur dan bagian yang disebut infra-struktur (Kantaprawira, 1988).

Suprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Pihak yang demikian terdiri dari: 1) *Lembaga Tinggi Negara*: Presiden, DPR, MPR, MK, MA, KY; 2) *Lembaga Independen Negara*: KPU, KPI, Komisi Perempuan, dan komisi lainnya; 3) *Lembaga Legislatif*: DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten; 4) *Lembaga-lembaga Pemerintah setingkat Kementerian ke bawah*: Kementerian, Dirjen; Badan, Lembaga, Direktorat; Dinas, Kecamatan, Kelurahan; 5) *UPT-UPT*: misal : Bendungan/pintu air Katulampa; dan 8) *Lembaga-lembaga Parpol*: Parpol yang sudah jadi anggota legislatif.

Sementara Infrastruktur Politik berarti pihak-pihak yang tidak atau tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Lembaga-lembaga seperti ini diantaranya adalah 1) *Lembaga NGo*: LSM-LSM; 2) *Lembaga*

Asosiasi/Serikat-serikat: SBI, FBR dll; 3) Parpol yang belum jadi anggota legislatif seperti kontestan pertama dalam pemilu legislatif; 4) Media Massa (by internet seperti detik.com, kumparan.com, oke zone, dlll; surat kabar; majalah; televisi; radio siaran; dan anggota/tokoh masyarakat, individual atau mewakili kelompok.

Konsep struktur politik sebenarnya masuk ke dalam ranah ilmu politik. Dalam terminologi ilmu politik sendiri, struktur politik sendiri berarti suatu pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu (Kantaprawira, 1988). Struktur, bangunan atau kerangka politik itu sendiri merupakan suatu komponen dalam sistem politik. Sistem politik sendiri mendapatkan banyak rumusan dari berbagai pakar. Dengan mengacu pada pengertian sistem, maka dalam kaitannya dengan konsep politik Kantaprawira (1988) mendefinisikan sistem politik menjadi suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Dahl (1977) mendefinisikannya: “.... *as any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, power, or authority*” (suatu pola yang tetap dari hubungan-hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang).

Definisi lain tentang sistem politik, yakni berasal dari Gabriel A. Almond; Hooderwerf; David Easton. Menurut Almond, sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. A.Hooderwerf mengartikannya bahwa sistem politik adalah seluruh pendirian, kelakuan dan kedudukan, sepanjang bertujuan untuk

mempengaruhi isi, terjadinya dan dampak kebijaksanaan pemerintah. Sementara David Easton mengartikannya sebagai suatu keseluruhan interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian yang diharuskan dari nilai-nilai bagi suatu masyarakat.

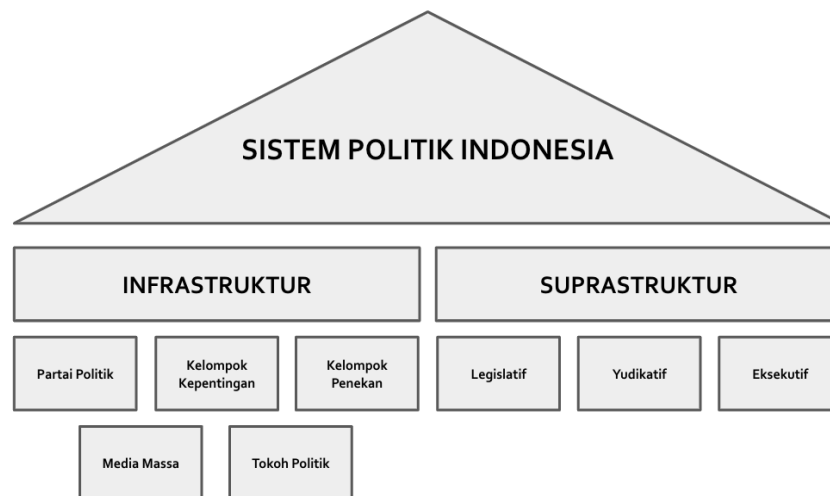
Berdasarkan pengertian sistem politik tersebut diketahui bahwa inti utama dari makna pengertian sistem sebenarnya berkaitan dengan soal nilai. Nilai-nilai dimaksud berkaitan dengan soal pendistribusiannya dalam masyarakat. Dengan demikian makna dari konsep sistem politik sebenarnya dapat disimplikasi menjadi suatu abstraksi menyangkut soal pendistribusian nilai di tengah masyarakat. Berkaitan dengan soal pendistribusian dimaksud, sistem politik mempunyai fungsi bagi sistem politik itu sendiri dan fungsi ini dijalankan oleh struktur politik tadi. Fungsi dimaksud sebagaimana dikatakan para ahli yaitu menyangkut dua fungsi yaitu fungsi input dan fungsi output.

Fungsi input dapat terlaksana dalam sistem politik yaitu melalui aplikasi sejumlah fungsi dalam sistem. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem politik sendiri cakupannya ada tujuh, yaitu: 1) Sosialisasi dan rekrutmen politik; 2) Artikulasi kepentingan; 3) Agregasi (pengelompokan) kepentingan; 4) Komunikasi politik; 5) Pembuatan peraturan; 6) Penerapan peraturan; dan 7) Pengawasan peraturan. Dari ketujuh fungsi sistem politik sebelumnya, maka diantaranya ada yang memerankan fungsi input dan ada yang memerankan fungsi output. Yang termasuk diperankan fungsi input adalah fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Sosialisasi dan rekrutmen politik; 2) Artikulasi kepentingan. 3) Agregasi (pengelompokan) kepentingan; 4) Komunikasi politik.

Sementara fungsi output diperankan oleh fungsi sistem politik dalam tataran fungsi 5) Pembuatan peraturan; 6) Penerapan peraturan dan 7) Pengawasan peraturan. Pemeranan fungsi sistem politik tadi, baik pada fungsi input maupun fungsi output, secara fisik itu dilakukan oleh struktur politik yang terdapat dalam suatu sistem politik.

Struktur politik dalam sistem politik menurut Almond dan Coleman (dalam Kantaprawira 1988) dibedakan menjadi dua yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik berarti struktur politik masyarakat/rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat (*political infrastructures subsets, socio-political sphere*), dan supra struktur politik, yaitu struktur politik pemerintahan sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik pemerintahan (*political suprastructures, surface structures, govermental sphere, formal political machines*), maka pemenuhan tugas dan tujuan masing-masing berbeda pula.

Dengan kata lain, struktur suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur dan infrastruktur politik adalah dua komponen dalam sistem politik yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprakstruktur dan infrastruktur politik memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain.



Gambar 2. 4 Struktur Sistem Politik

Suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga di dalam suprastruktur politik adalah MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok ini bisa berperan sebagai pelaku politik tidak formal dan turut serta membentuk kebijakan negara. Kelompok yang digolongkan sebagai infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik.

2.3.5. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Maka sebenarnya komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan juga bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima tidak hanya berupa informasi, tapi juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), instruksi (*instruction*), atau perasaan-perasaan (*feelings*) yang berkaitan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah (Malone, 1997).

Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya—komunikasikan, yaitu aparatur pemerintah (sebagai internal organisasi) dengan dunia usaha, masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah (sebagai eksternal organisasi), dan sebaliknya (Silalahi, 2004).

Tanpa komunikasi, organisasi pemerintahan tidak akan dapat menjalankan fungsinya maupun tercapai tujuannya, penggunaan sumber daya pun menjadi tidak efektif dan efisien. (Beach, 1975). Peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam organisasi pemerintah—apakah pesan diterima dan dilaksanakan dengan benar, hal ini dapat memungkinkan organisasi pemerintah mencapai tujuannya. Maka dari itu, komunikasi pemerintahan menjadi salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan untuk mengelola staf (*managing staff*) maupun mengelola orang-orang atau publik (*managing people*).

Managing staff dalam komunikasi pemerintahan adalah komunikasi internal organisasi yang memiliki tujuan supaya pegawai/staf mengetahui dan memahami sesuatu yang harus dikerjakan, bagaimana melaksanakannya kemudian pimpinan pejabat memperoleh informasi dari staf mengenai hasil pelaksanaan yang keseluruhan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan efisien.

Managing people dalam komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi eksternal organisasi dengan tujuan menyampaikan informasi terkait berbagai kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi non pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, sekaligus mendapat informasi dari mereka dalam membuat kebijakan dan peraturan, dan juga informasi tentang dampak dari kebijakan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau dimodifikasi.

Komunikasi pemerintahan dalam *good governance* menekankan pada *responsiveness* (ketanggapan), *transparency* (transparansi), *participation* (partisipasi), dan *accountability* (akuntabilitas). Responsif artinya manajemen publik harus fokus terhadap informasi yang disampaikan langsung oleh warga secara konstan, intensif, dan cepat, baik langsung ke birokrasi maupun melalui legislator atau politisi (Denhardt dan Grubbs, 1999: 19; Frederickson, 1984:52); transparansi artinya informasi yang diberikan harus benar, jujur dan adil; partisipasi diartikan sebagai masyarakat yang dilibatkan dalam sebagai pemberi informasi saat membuat kebijakan dan perlunya pengawasan dari masyarakat (kontrol sosial);

sedangkan akuntabilitas mengartikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab akan informasi kebijakan.

Pada hakekatnya, komunikasi pemerintahan eksternal ialah proses penyebaran dan penerimaan informasi oleh pemerintah kepada dan dari publik. Informasi yang disebarluaskan oleh pemerintah pada publik disebut informasi publik, sementara informasi yang diperoleh pemerintah dari publik disebut opini publik. Dikarenakan pesan yang disebar adalah informasi publik maka komunikasi pemerintahan pun dikenal dengan komunikasi publik, kemudian karena informasi publik yang disebar adalah berupa kebijakan maka komunikasi pemerintahan juga dapat dikatakan sebagai komunikasi kebijakan (Dunn, 1998).

Komunikasi pemerintahan secara praktis sangat ditentukan oleh sistem pemerintahan. Komunikasi dalam pemerintahan yang sentralistik tidak akan sama dengan komunikasi dalam pemerintahan yang desentralistik. Sebagaimana komunikasi pemerintahan saat orde Baru yang lebih sentralistik dibanding pasca orde baru yang desentralistik. Komunikasi pemerintahan Orde Baru lebih menunjukkan *downward communication* artinya arus informasi yang satu arah. Implikasi dari komunikasi yang sentralistik ini mengakibatkan arus informasi yang cenderung kaku, lamban, menghabiskan banyak waktu, dan sebagainya. Saat berkomunikasi dengan masyarakat pun pemerintah cenderung tidak personal, tidak bersahabat, pura-pura, dan sebagainya. Komunikasi dalam era pemerintahan orde baru menganggap pimpinan birokrasi (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) adalah pusat seluruh informasi dimana kebijakan dan keputusan tergantung pada ketetapan pemerintahan pusat.

Sedangkan komunikasi pemerintahan pasca orde baru yang sifatnya desentralistik relatif lebih demokratis karena menempatkan bawahan (komunikasi internal) dan masyarakat serta dunia usaha (komunikasi eksternal) sebagai pengirim/*sender*. Dalam pembuatan kebijakannya arus informasi berlangsung secara dua arah. Informasi publik tidak dikuasai lagi oleh pemerintah, pemerintah pun harus menyebarkan informasi publik kepada masyarakat dan memanfaatkan opini publik dari masyarakat, dengan demikian mengurangi adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat (Nazzmuzzaman, 2004).

Melalui sudut pandang komunikasi pemerintahan, penelitian ini akan mencari bagaimana tindakan dan model komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam penanganan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.3.6. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu komunikasi yang terjadi dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai penyampaian pesan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Kebijakan dalam perspektif komunikasi ini dapat dikategorikan sebagai pesan yang disampaikan oleh pemerintah atau institusi tertentu yang ditujukan kepada publik/khalayak/masyarakat. Karena kebijakan sebagai pesan, maka secara sederhana tujuannya adalah agar publik secara sadar bersedia untuk menerima tanpa adanya penolakan (Mani & Guntoro, 2020).

Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua kebijakan dapat diterima begitu saja, banyak pula kebijakan yang diabaikan, ditentang, bahkan ditolak oleh publik. Bagi komunikator dan aktor kebijakan, penting untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penolakan dalam komunikasi kebijakan.

Komunikasi memiliki banyak definisi, diantaranya bahwa komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator dengan tujuan mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku pada komunikan/khalayak/publik. Berdasarkan definisi tersebut muncul sebuah pertanyaan, apakah semua komunikasi yang dilakukan selalu akan berakhir pada perubahan yang terjadi pada khalayak? Jawabannya tidak semua pesan yang disampaikan pelaku atau komunikator dapat menyebabkan perubahan, karena setiap khalayak memiliki motif, kebutuhan, dan orientasi masing-masing di dalam berkomunikasi.

Komunikasi memiliki unsur-unsur yang masing-masing mempunyai potensi kegagalan atau tidak efektifnya sebuah komunikasi. Secara sederhana, unsur-unsur komunikasi tersebut meliputi: komunikator, pesan, media, komunikan, umpan balik, efek, dan konteks (Mani & Guntoro, 2020). Selain itu, komunikasi memiliki bentuk, model, dan media komunikasi yang keberadaannya dapat menciptakan dan mengukur efektivitas komunikasi. Maka, seorang komunikator, agen dan aktor kebijakan publik, harus mampu mengetahui dengan baik bentuk, model, media dan konteks komunikasi sehingga dalam perencanaan dan implementasi komunikasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, komunikasi kebijakan pada hakikatnya adalah suatu proses

diseminasi pesan dari lembaga pemerintah kepada khalayak atau *stakeholder* atau pemangku kepentingan dengan harapan agar khalayak ini dapat menerimanya.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Lembaga-lembaga pemerintah di negara-negara dunia ketiga oada umumnya berkisar pada masalah “relationship” atau hubungan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, hal ini terjadi karena kondisi dan iklim masyarakat dimana segenap Lembaga tersebut bergerak secara dinamis sehingga tak jarang diwarnai perbedaan pemahaman dan kadang-kadang disertai dengan pertentangan secara terbuka antara pemerintah/lembaga dengan masyarakat atau dengan pemangku kepentingan/stakeholder-nya. Maka menjadi hal yang penting untuk mengetahui bagaimana cara pendekatan dan penyesuaian pemahaman yang sama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah. Walaupun sangat sulit, msalah ini merupakan hal penting dalam manajemen pembangunan dan komunikasi kebijakan.

Berbagai lembaga pemerintah, sosial, ekonomi, dan politik, tidak bisa menjalankan tugasnya melayani kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan secara sempurna apabila hubungan kelembagaan dengan masyarakat tidak mempunyai kesamaan pandangan dan keserasian hubungan. Kesamaan dan keserasian hubungan tidak akan terwujud manakala pihak yang terkait tidak mampu memahami faktor yang memengaruhi perubahan pengertian, sikap dan perilaku manusia.

Ada banyak faktor yang mendasari perubahan pengertian, sikap dan perilaku manusia, yaitu faktor komunikasi, diri, dan sosial. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dalam menjalankan komunikasi kebijakan perlu memperhatikan

dimensi budaya atau kebiasaan dan karakter khalayak yang sering kali diabaikan. Eksistensi diri, sosial, dan komunikasi adalah bagaimana mengintegrasikan semua elemen nilai-nilai yang tertanam di publik atau khalayak dapat terjalin saling pengertian, adanya kepercayaan, kerjasama, serta dukungan positif dari masyarakat.

Sama halnya dengan penelitian ini, diperlukan suatu tindakan dan bentuk komunikasi kebijakan dari pemerintah sehingga mendapat respon melalui partisipasi masyarakat untuk bersama-sama secara sadar menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup terlebih sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Bandung.

2.3.7. Komunikasi Publik

Komunikasi publik (*public communication*) merupakan salah satu jenis atau bentuk komunikasi dari segi jumlah atau banyaknya komunikan (audiens) selain komunikasi intrapersonal, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi public dikenal dengan banyak nama atau istilah, seperti urusan publik (*public affairs*), informasi publik (*public information*), public relation atau humas.

Karena jumlah audiens yang banyak, komunikasi publik sering identik dengan komunikasi massa, padahal keduanya berbeda dari segi saluran (*channel*); komunikasi massa adalah komunikasi yang hanya menggunakan media massa (*communicating with media*) seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, website. Sedangkan komunikasi publik lebih luas daripada komunikasi massa, komunikasi

publik menyampaikan pesan kepada orang banyak dapat secara langsung (*non-mediated*) juga dapat melalui media (*mediated*) secara luas.

Komunikasi diartikan sebagai penyampaian pesan (ide, pemikiran, informasi, ajakan, dsb). Publik artinya menunjukkan orang banyak (umum) atau semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Secara praktis, komunikasi publik terjadi ketika individu dan kelompok terlibat dalam dialog di ruang publik untuk menyampaikan pesan kepada khalayak tertentu. Peristiwa berbicara di depan umum (*public speaking*), editorial surat kabar, dan iklan billboard adalah beberapa bentuk komunikasi publik. Saluran komunikasi dalam komunikasi publik dapat melalui media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di website/medsos, e-mail, chat/sms, surat pembaca, reklame, spanduk, atau apapun yang dapat menjangkau publik.

Public communication happens when individuals and groups engage in dialogue in the public sphere in order to deliver a message to a specific audience. Public speaking events, newspaper editorials and billboard advertisements are a few forms of public communication.

Sementara itu Arni Muhammad (Muhammad, 2014) mendefinisikan komunikasi publik dalam konteks komunikasi organisasi; komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, baik secara tatap muka atau melalui media. Komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan, tulisan, dan visual agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien; komunikasi publik yang dilakukan melalui lisan disebut komunikasi pidato, retorika, dan *public speaking*.

Komunikator dalam komunikasi publik dapat dilakukan oleh siapa pun, dapat pula dilakukan oleh seorang komunikator publik profesional, seperti manager atau staf PR/Humas, wartawan, penyiar radio, presenter, *public figure*, dan sebagainya. Kecanggihan teknologi komunikasi saat ini membuat semua orang bisa melakukan komunikasi publik. Sekadar contoh, jika kita memposting sebuah komentar pada sebuah kolom komentar yang dapat diakses banyak orang, maka itu pun termasuk komunikasi publik. Jika kita mengatakan sesuatu di ruang publik yang dapat diakses banyak orang, maka proses tersebut dapat dikatakan komunikasi publik.

Ciri utama lainnya dari komunikasi publik adalah berisi pesan yang penting dan diketahui publik (dikenal dengan informasi publik), yang dikomunikasikan menyangkut urusan publik (*public affairs*) atau yang diharapkan menggugah orang banyak, selain itu komunikasi publik terjadi di tempat umum/publik, misalnya di kampus, tempat ibadah, fasilitas umum dan tempat lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang.

Menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005), komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Adapun tujuan komunikasi publik adalah untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedulian dan mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran.

Sama halnya dengan komunikasi publik yang dikemukakan oleh Judy Pearson dan Paul Nelson (Srisadono, 2018), mereka mendefinisikan komunikasi publik sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna

dalam sebuah situasi dimana sumber mentransmisikan pesan ke sejumlah penerima yang kemudian memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal maupun berupa tanya jawab. Secara sederhana dalam komunikasi publik, terdapat sumber, pesan, penerima dan diantara ketiganya ada yang disebut sebagai gangguan. Sumber akan menyesuaikan pesan yang dikirimkan kepada penerima. Kunci dari komunikasi publik adalah pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diterima secara utuh. Namun, tidak menutup suatu kemungkinan dalam proses penyampaian pesan sering terjadi kesalahpahaman atau gangguan pada pesan yang lebih disering disebut dengan hoax. Komunikasi publik yang efektif akan mampu mengimbangi beredarnya informasi palsu, disinformasi, dan isu yang salah terkait suatu hal. Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan mempersingkat tahap-tahap dari proses komunikasi dengan semakin panjang tahapan yang dilalui oleh pesan maka akan menimbulkan distorsi pesan dalam komunikasi.

Komunikasi publik dapat memfasilitasi masyarakat dengan informasi publik terkait kebijakan program dan kegiatan pemerintah yang sudah, sedang dan akan dilakukan (Indarto dalam (Chandratama Priyatna et al., 2020), hal ini penting bagi kedua pihak, terlebih dalam konteks komunikasi antara Pemerintah maupun masyarakat, upaya ini dilakukan agar jurang antara pemerintah dan masyarakat tidak melebar, sehingga diperlukan upaya dalam bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir hal tersebut.

Pengelolaan komunikasi publik merupakan perwujudan dari pemenuhan hak informasi bagi warga negara. Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu bersama-sama mengelola komunikasi publik untuk menciptakan “*a well-informed society*” untuk memenuhi hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan tiga langkah strategis yang harus dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu: Pertama, perlu dibangun pengaturan sistem komunikasi, kedua pengembangan infrastruktur komunikasi, ketiga komunikasi publik.

Pada poin terakhir dalam langkah strategis tersebut yaitu mengenai pengelolaan komunikasi publik, peraturan yang menaunginya telah lahir sejak tahun 2015, melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Namun Instruksi Presiden ini tidak cukup jika tidak disertai dengan kesadaran dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan membangun komunikasi dua arah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Hal lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas komunikasi dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Direktur Kemitraan Komunikasi, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, diharapkan tidak ada lagi kegiatan komunikasi kehumasan yang mengedepankan ego sektoral. Komunikasi pemerintah perlu satu suara terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Sehingga masyarakat terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi pencapaian mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum dapat dikategorikan dalam komunikasi publik. Program-program dalam komunikasi publik menggunakan komunikasi untuk menginformasikan atau mempersuasi, membangun hubungan, dan untuk mendorong dialog terbuka dalam organisasi atau komunitas terhadap solusi jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan menyusun pesan yang sukses melalui penerapan penelitian, teori, pengetahuan teknis, dan prinsip desain suara. Melalui penelitian ini, pesan-pesan lingkungan yang dirumuskan pemerintah berupa kebijakan maupun program, pada dasarnya dapat dikomunikasikan kepada publik secara luas baik secara langsung maupun melalui media oleh siapapun.

2.3.8. Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Bandung

Bandung, sebagai kota besar seringkali mengalami berbagai persoalan lingkungan. Merujuk pada riset (Cahyana, 2018) permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung dapat dibagi ke dalam 5 (lima) jenis, diantaranya sampah, polusi udara, limbah, alih fungsi lahan, dan meningkatnya suhu kawasan perkotaan (*urban heat island*).

Jika dilihat dari hasil evaluasi DLHK Kota Bandung terkait isu lingkungan hidup di Kota Bandung menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu ditangani, diantaranya adalah (1) masalah kualitas air Kota Bandung, (2) kualitas udara Kota Bandung masih berada pada status “kurang”, (3) cakupan sampah yang dikelola secara *Landfill* masih sangat tinggi, (4) cakupan sampah yang diubah menjadi energi masih sangat rendah, (5) emisi GRK (gas rumah kaca) terlihat ada

penurunan tetapi emisi dari sektor pengolahan sampah dan limbah belum teridentifikasi dengan baik (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, 2018). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pemetaan permasalahan lingkungan hidup Kota Bandung yang diinventarisir pada periode tahun 2018 hingga 2023:

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Isu Lingkungan Hidup di Kota Bandung

No	Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Indeks Kualitas Air Kota Bandung masih berada pada status “waspada”.	<p><i>Faktor Eksternal:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya pencemaran akibat limbah domestik 2. Sebagian pelaku usaha/kegiatan mikro, kecil dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar. 3. Masih terdapat banyak sampah yang dibuang ke sungai 4. Masih banyak sarana septic tank yang merembeskan airnya ke tanah sehingga terjadi infiltrasi bakteri ke sumber air bersih penduduk 5. Masih ada sarana TPS yang berada di pinggir sungai sehingga ada air leachet sampah/limbah B3 rumah tangga yang masuk ke sungai. 6. Berkurangnya kuantitas air permukaan di musim kemarau menyebabkan air menjadi pekat dan kualitasnya menjadi buruk. 7. Terjadinya pendangkalan sungai karena erosi di daerah hulu sehingga air menjadi keruh, kualitasnya menjadi buruk dan sungai menjadi dangkal. <p><i>Faktor internal:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah personel pengawas lingkungan sehingga pelaku pencemaran sungai belum dapat ditindak secara efektif. 2. Masih minimnya produk hukum yang mengatur pengendalian 	Adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi agen penggerak masyarakat di sekitarnya

		kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah.	
2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Bandung masih berada pada status “waspada”	<p><i>Faktor Eksternal:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung masih sangat rendah 2. Kualitas tutupan lahan yang ada masih kurang baik karena masih banyak terjadi perkerasan di RTH yang ada 3. Masih banyak kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi, digunakan untuk pemukiman/usaha 4. Kawasan konservasi yang ada tidak ditata atau dipelihara sehingga fungsi hidrologisnya menjadi hilang. <p><i>Faktor Internal:</i> Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH</p>	Masih terdapat lahan-lahan milik pemkot yang terletak di daerah Bandung Utara yang fungsi hidrologisnya masih dapat dioptimalkan
3	Indeks Kualitas Udara Kota Bandung masih berada pada status “kurang”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran udara oleh kendaraan bermotor semakin meningkat karena jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Bandung semakin bertambah 2. Pencemaran udara oleh asap dari sumber tidak bergerak pun masih terjadi. 	Perbaiki kualitas udara dengan menggunakan tanaman sebagai penyerap masih memungkinkan dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan kegiatan urban farming, Bandung berkebun dan kegiatan sejenis lainnya.
4	Berdasarkan perhitungan, emisi GRK mengalami penurunan, namun kondisi udara di Bandung terasa semakin pengap	Terjadi fenomena Urban Heat Island (UHI) yaitu peningkatan suhu kota yang diakibatkan oleh tingginya aktivitas manusia di perkotaan. Fenomena ini terjadi karena perubahan penggunaan lahan dari vegetasi menjadi daerah beraspal, beton, lahan terbangun, dan lahan terbuka non-vegetasi	Adanya upaya penerapan ecooffice yang dapat memicu dilakukannya penataan bangunan sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat energi.
5	Persentase sampah yang dibuang ke TPA masih sangat tinggi	Masyarakat belum terbiasa memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah sehingga sampah masih dibuang dengan cara dicampur	Saat ini gerakan KangPisman sudah mulai dikenal sehingga dapat mendorong upaya pemilahan sampah dengan lebih baik
6	Persentase sampah yang	1. Bank Sampah yang saat ini sudah banyak dibuat oleh masyarakat	Saat ini gerakan KangPisman sudah mulai

	diolah sejak dari sumber masih rendah	<p>ternyata masih belum bisa menampung sampah recycable dalam jumlah besar dan jenis sampah yang dapat diterimanya pun masih terbatas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku pengelola sampah organik nonformal belum terinventarisir dengan baik sehingga jumlah sampah yang dikelolanya pun belum diketahui dengan pasti 3. Masyarakat belum mengetahui dan belum terbiasa mengolah sampah organiknya menjadi kompos 	dikenal sehingga dapat mendorong upaya pemilahan sampah dengan lebih baik
--	---------------------------------------	--	---

Sumber: DLHK Kota Bandung, 2018.

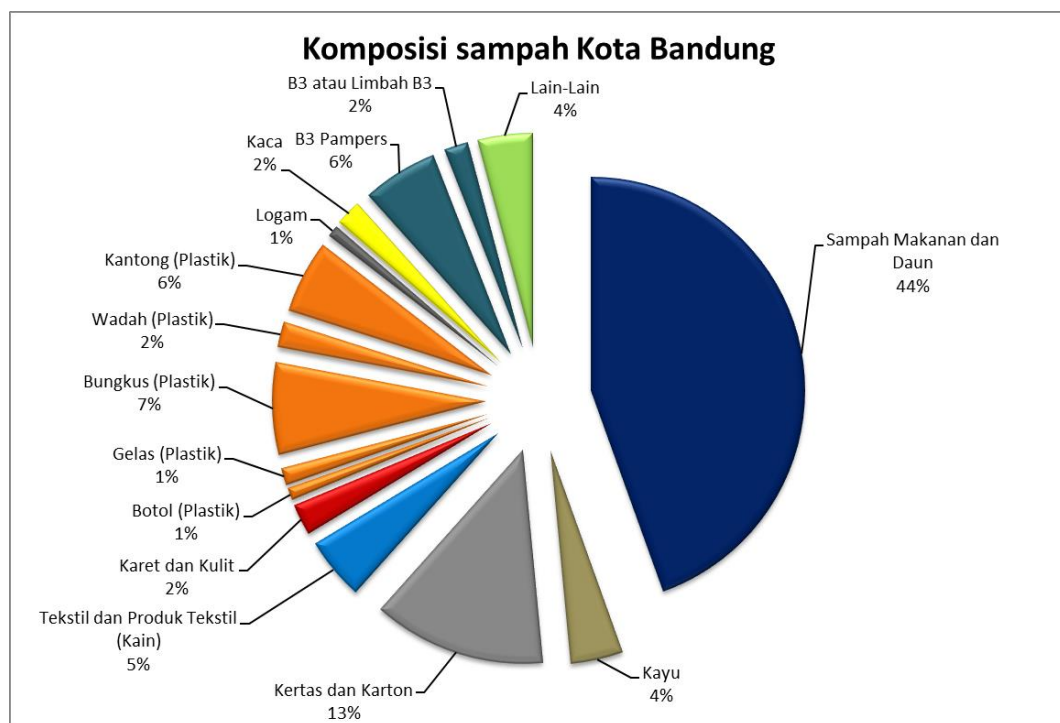
Tabel diatas menunjukkan adanya faktor eksternal dan internal yang mendukung munculnya berbagai permasalahan lingkungan hidup di kota Bandung, diantaranya: *faktor eksternal*, yaitu pemahaman masyarakat di dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan masih sangat kurang, sulitnya mencari lahan kota yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL), TPS dan sarana pengelolaan lingkungan lainnya; ketersediaan sarana baik persampahan maupun pengelolaan limbah masih belum memadai, sarana yang telah ada tidak dipelihara dengan baik, penegakan hukum baik terkait kasus pencemaran maupun pengelolaan lingkungan belum dilakukan dengan konsisten; sementara itu *faktor internal* yaitu terkait jumlah personel pengawas lingkungan hidup yang sangat kurang, ketersediaan sarana pemantauan kualitas lingkungan yang belum memadai, proses komunikasi antar bidang yang belum berjalan lancar, proses transfer pengetahuan terhadap masyarakat yang belum maksimal sehingga teknologi yang sudah ada belum berfungsi dengan maksimal bahkan ada yang akhirnya tidak berfungsi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, 2018).

Salah satu permasalahan paling klasik di Kota Bandung adalah sampah. Bandung yang pernah dijuluki “Kota Kembang” pernah menjelma menjadi kota yang penuh sampah. Data statistik memperlihatkan setiap harinya Kota Bandung memproduksi sampah sebanyak 8.418 m³ dan hanya dapat diolah sekitar 65 %. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah. Akar masalah dari penumpukan sampah ini selain dari gaya hidup masyarakat dengan pengelolaan sampah yang kurang baik juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperlakukan sampah.

Dikutip dari Pikiran Rakyat online (15/11/2018), setiap hari masyarakat Kota Bandung turut menyumbang produksi sampah yang jumlahnya tidak sedikit. Rata-rata dalam satu hari masyarakat Kota Bandung menghasilkan sekitar 1500ton sampah atau setara dengan luas satu lapangan sepak bola. Dengan keadaan seperti ini, dikhawatirkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang menjadi muara sampah-sampah tersebut tidak akan bisa menampung lagi.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Mongabay Indonesia: Situs Berita Lingkungan (2018), menunjukkan produksi sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung mencapai 3.950 ton/hari. Sementara yang bisa diangkut, hanya 2.750 ton/hari. Meski ditunjang label Smart City, Kota Bandung nampaknya masih kesulitan menangani sampah. Rencana menggunakan teknologi insenerator di tempat pembuangan akhir Sarimukti tak kunjung dibangun karena dianggap mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, teknologi biodigester dari Jepang pun digagas, tapi tidak terwujud. Akibatnya, sampah menjadi masalah yang tak kunjung tuntas.

Timbulan sampah di Kota Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun, rata-rata sebesar 1500 ton per hari. Berdasarkan (PD.KebersihanKotaBandung, 2019) komposisi sampah Kota Bandung dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2. 5 Komposisi Sampah Kota Bandung

Hingga saat ini pemerintah kota Bandung terus melakukan inovasi mencari solusi penanganan masalah sampah. Persoalan ini sangat krusial mengingat adanya kemungkinan Bandung menjadi “kota sampah” akan terulang kembali. Berdasarkan riset (Surakusumah, 2008) beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dan dapat menyebabkan Bandung kota sampah jilid kedua, diantaranya adalah:

1. Kesadaran masyarakat Bandung terhadap sampah yang masih rendah.
2. Kemampuan pelayanan operator atau PD kebersihan kota Bandung yang terbatas. Kemampuan pelayanan penanganan sampah sampai saat ini oleh PD kebersihan masih belum optimal, hal tersebut terbukti lembaga ini hanya dapat melayani pengelolaan sampah hanya sekitar 65%.

3. Sampah organik merupakan komposisi terbesar dari sampah kota Bandung. Permasalahan yang terjadi sampah yang dibuang masyarakat tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efisien.
4. Lahan TPA yang terbatas. Luas daerah kota Bandung 16730 ha, hal tersebut menyebabkan tempat penampung sampah akhir yang berada di kota Bandung sangat terbatas. Hal tersebut mengakibatkan lokasi penampung harus ekspansi melalui kerja sama dengan pemerintahan daerah tetangganya. Permasalahan koordinasi merupakan permasalahan utama, apalagi kalau ada konflik dimasyarakat.
5. Penegakan hukum (law inforcement) tidak konsisten. Pemerintah kota Bandung dan DPRD kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah beserta sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya, namun perda tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten.

Selain persoalan sampah, isu lingkungan kota Bandung adalah udara yang semakin kotor efek dari aktivitas warga kota menggunakan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, ini artinya tingkat polusi udara tinggi sehingga semakin banyak warga yang mengalami gangguan pernapasan dan terjadinya hujan asam. Mobilitas kendaraan bermotor yang tinggi dan topografi wilayah Bandung yang berbentuk cekungan sebenarnya merupakan akar permasalahan tingginya polusi udara di Kota Bandung, kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, kemudian topografi wilayah Bandung pun turut memperparah penumpukan polusi udara akibat dari sirkulasi udara yang terhambat oleh cekungan.

Selanjutnya, isu lingkungan lain yang perlu diperhatikan adalah alih fungsi lahan yang marak terjadi di kawasan Bandung Utara, padahal kawasan ini merupakan lahan konservasi resapan air, namun kini beralih menjadi tempat sejumlah villa, apartemen, hotel, bahkan perumahan elit. Berdasarkan riset, kawasan Bandung Utara mempunyai fungsi sebagai wilayah resapan di daerah hulu, dan menjadi kawasan yang dapat menghasilkan air tanah, 60 persen cadangan air

tanah dapat dihasilkan di kawasan ini. Tidak heran jika semakin sering terjadi longsor di wilayah Bandung Utara akibat dampak buruk alih fungsi lahan tersebut, juga semakin berkurangnya luas lahan resapan air ini tentu akan mengurangi ketersediaan atau suplai air tanah di Bandung pada umumnya, hal ini yang menyebabkan ancaman krisis air pada 10 hingga 20 tahun kedepan. Beberapa pakar lingkungan menyarankan bahwa pemulihan kondisi air kota Bandung butuh waktu yang tidak sedikit, dapat mencapai hingga 25 tahun, itupun jika masyarakat mau menghemat air, merehabilitasi hutan, dan mengelola kualitas air tanah dan sungai dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut nampak terlihat banyak pekerjaan rumah bagi para pengambil kebijakan dalam menangani isu lingkungan. Perlu kiranya riset lebih lanjut untuk mencari solusi terbaik berdasarkan pemetaan masalah terkait kebijakan yang pro lingkungan dari berbagai sudut pandang.

Permasalahan sampah pun memang tidak terlepas dari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menyelamatkan bumi. Hal ini diperlukan kesadaran kolektif untuk secara bersama-sama menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih serius dalam membangun dan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup agar tidak terus terjadi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Disinilah pentingnya upaya yang dilakukan dalam komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* yang dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan dengan fokus mengomunikasikan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penanganan sampah.

BAB 3

METODOLOGI

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Paradigma

Paradigma dalam sebuah penelitian, menurut Parson, didefinisikan sebagai suatu pandangan, perspektif umum atau cara untuk memisahkan dunia nyata yang kompleks kemudian memberi arti atau makna dan penafsiran-penafsiran. Dengan kata lain, paradigma biasa disebut juga dengan perspektif atau *worldview* yang menunjukkan cara pandang seseorang mengamati sesuatu. Paradigma terkait pencarian ilmu pengetahuan merupakan hal mendasar yang digunakan peneliti dalam upaya mencari kebenaran atas realitas untuk kemudian menjadi ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu (Hadi, 2020).

Dalam penelitian ilmu komunikasi dikenal tiga paradigma yaitu paradigma klasik atau objektif atau positivis, paradigma konstruktivis atau interpretif, dan paradigma kritis. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruktivis yang berusaha untuk melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna, yang menjadi fokus bukanlah pada bagaimana seseorang mengirim pesan, namun bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi saling memproduksi dan bertukar makna.

Menurut (Denzin & Lincoln, 2018), tujuan penelitian konstruktivisme adalah untuk memahami dan merekonstruksi berbagai konstruksi yang sebelumnya dipegang orang lain dan memiliki keterbukaan untuk interpretasi baru seiring

dengan perkembangan informasi dan kecanggihan. Dalam ilmu sosial, peneliti mengkonstruksi tidak harus berfokus pada analisis struktur karena dunia sosial adalah realitas yang tidak independen dari kerangka pikiran manusia sebagai aktor sosial. Paradigma konstruktivis menitikberatkan pada proses dimana realitas-realitas sosial dipahami dan dilakukan (*acted*) oleh aktor (agen) sosial. Realitas tidak bisa dipahami kecuali dengan mempertimbangkan proses-proses mental dan sosial yang secara terus-menerus mengkonstruksi realitas tersebut.

Cara pandang paradigma konstruktivis adalah: 1) Memandang pengetahuan tidak memiliki sifat objektif dan tetap, tetapi dikonstruksi atau interpretif; 2) Memandang manusia sebagai pencipta keteraturan secara kreatif, karena pada dasarnya dunia dan semua aspek di dalamnya tidak terstruktur; 3) Memandang struktur sebagai konstruksi sosial yang bersifat samar dan dapat dinegosiasikan; 4) Memandang pengetahuan dunia dikonstruksi sebagai proses produksi yang aktif; 5) Memandang realitas sosial adalah suatu kondisi yang cair dan mudah berubah melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari; 6) Memandang manusia bertindak sesuai dengan makna yang diberikan pada lingkungannya; 7) Memandang manusia aktif menafsirkan lingkungannya, bahkan mengubah jika diperlukan dan bebas memilih tindakannya.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis karena peneliti memandang komunikasi kebijakan dan partisipasi masyarakat akan mengkonstruksi bentuk dan tindakan pemerintah bersama pemangku kepentingan dalam menangani sampah di Kota Bandung, dan hal ini diharapkan dapat menghasilkan model komunikasi penanganan sampah di Kota Bandung yang

menjadi acuan dalam pengelolaan permasalahan lingkungan hidup lainnya di perkotaan secara umum.

3.1.1. Jenis Studi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat dibangun atau dikonstruksi sebagai sebuah strategi penelitian yang menekankan kata-kata dibanding kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, juga menitikberatkan pada pendekatan induktif dalam keterkaitan antara teori dan penelitian yang dapat menghasilkan suatu teori. Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif atas dasar beberapa alasan, selain karena untuk mendeskripsikan peristiwa atau realitas sosial, juga untuk mencari dan mengungkap bentuk dan tindakan komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* melalui komunikasi kebijakan yang diimplementasikan pemerintah dengan partisipasi stakeholder.

(Creswell & Creswell, 2018) mengungkapkan bahwa salah satu karakteristik pendekatan kualitatif, diantaranya adalah:

“Pendekatan kualitatif berfokus pada proses-proses yang terjadi atau hasil. Peneliti kualitatif khususnya tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul.”

Berdasarkan pendapat tersebut, pendekatan kualitatif yang dilakukan oleh peneliti akan fokus pada realitas yang sedang terjadi, baik melalui pengamatan pada subjek penelitian dan mencari tahu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, lalu mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi.

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis studi, salah satunya adalah studi kasus. Studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan terus-menerus, terinci serta mendalam tentang suatu peristiwa baik pada tingkat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang sebuah peristiwa (Rahardjo, 2017).

Mengacu pada (Yin, 2018) penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) yang menyatakan bahwa tujuan penelitian studi kasus bukan sekadar menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi bagaimana keberadaan dan mengapa kasus dapat terjadi. Sebagaimana isu persampahan di Kota Bandung masih selalu menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Alasan utamanya karena permasalahan tersebut sangat spesifik dan memiliki pola (ada unsur sengaja dilakukan) padahal berbagai upaya atau program penanganan sampah sudah banyak dilakukan Pemkot Bandung. Maka kejadian ini menjadi sebuah kasus yang layak diteliti. Asumsinya, terdapat cara yang kurang tepat dalam menangani sampah.

Penelitian studi kasus (Yin, 2018) tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tentang apa (*what*) objek yang diteliti, tetapi secara komprehensif tentang bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) objek terjadi dan dapat dipandang sebagai kasus (memiliki pola dan unsur kesengajaan). Stake (2005) membagi penelitian studi kasus berdasarkan karakteristik dan fungsi kasus. Menurutnya, kasus bukan sekadar objek tetapi kasus diteliti karena karakteristiknya yang khas. Penelitian studi kasus bukan bergantung pada metode penelitiannya, tetapi bagaimana memilih kasus yang tepat untuk diteliti. Stake membagi penelitian studi kasus

diantaranya adalah studi kasus mendalam (*Intrinsic Case Study*).

Studi kasus intrinsik merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud meneliti kasus khusus dan unik, yaitu dengan menempatkan sebuah kasus yang mewakili kasus lainnya. Penelitian jenis ini tidak bermaksud membangun teori, tetapi dapat menjadi teori apabila menjadi satu-satunya kasus yang ada di dunia. Kasus intrinsik (*intrinsic case*) merupakan kasus yang dipelajari secara mendalam dan mengandung hal-hal menarik untuk dipelajari yang berasal dari kasus itu sendiri (Stake, 2005). Kasus tersebut sepadan dengan studi kasus mendalam (*intrinsic case study*) yang dilakukan pada suatu kasus dengan memiliki kekhasan dan keunikan yang tinggi. Kasus tersebut serupa dengan studi kasus tunggal (*single case study*) yang hanya melibatkan satu lingkungan tertentu dan pada periode tertentu pula. Satu lingkungan dipilih karena dianggap memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh lingkungan lain (Yin, 2018).

Penelitian studi kasus diarahkan untuk menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu, dalam hal ini yaitu menginventarisir upaya-upaya komunikasi dan kebijakan lingkungan yang terkait penanganan sampah di Kota Bandung, realitas bentuk-bentuk dan tindakan komunikasi yang dilakukan pemerintah dan partisipasi masyarakat bersama pemangku kepentingan dalam menangani sampah di Kota Bandung sebagai bentuk dari komunikasi dalam perspektif *green politics*.

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus berupaya untuk menyelidiki bagaimana dan mengapa peristiwa kontemporer terjadi (Yin, 2018). Dalam konteks ini peneliti akan mengungkap terkait bagaimana dan mengapa tindakan komunikasi tersebut yang dilakukan Pemkot Bandung dalam menangani sampah yang menjadi urusan fundamental dalam isu lingkungan hidup di Kota Bandung, dengan demikian berbagai komunikasi kebijakan dalam mengelola lingkungan perlu didukung dan dipikirkan bersama partisipasi stakeholder sebagai bagian dari pembangunan.

Melalui studi kasus, peneliti akan menyelidiki komunikasi dalam penanganan sampah di Kota Bandung tersebut secara komprehensif, intens, terperinci dan mendalam. Untuk mengeksplorasi suatu kasus, pertanyaan-pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” lebih cocok untuk studi ini. Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tak dapat dimanipulasi. Dalam hal ini peneliti meninjau penelitian terdahulu untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan bermakna mengenai topik yang bersangkutan (Yin, 2018).

Selanjutnya Yin mengatakan bahwa studi kasus dapat dibagi ke dalam *single-case* dan *multiple-case*. *Single-case* merupakan penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus saja, *single-case* ini digunakan jika kasus yang diteliti merupakan kasus ekstrim atau unik, memiliki kesempatan untuk mengobservasi dan menganalisis fenomena yang sebelumnya tidak diselidiki secara ilmiah. Sedangkan *multiple-case* memungkinkan dilakukannya perbandingan di antara beberapa kelompok kasus serupa. Penelitian

multiple-case lebih cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi suatu fenomena yang sama pada situasi yang berbeda.

Jenis studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini ialah *single-case study*, terutama pada kasus komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung bersama partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah. Selain itu, melihat pada tujuan dari penelitian ini, adalah untuk memperoleh informasi menyeluruh, mendalam, dan mendetil mengenai tindakan komunikasi yang bersifat kolaboratif dan partisipatoris melalui proses dialogis dan deliberasi sehingga menghasilkan beragam program kebijakan dalam penanganan sampah dengan kesepahaman sehingga masyarakat mau terlibat dengan penuh kesadaran.

Yin (Yin, 2018) membagi proses penelitian studi kasus sebagai berikut:

1. Mendefinisikan dan merancang penelitian

Peneliti melakukan kajian pengembangan teori atau konsep untuk menentukan kasus atau kasus-kasus dan merancang pengumpulan data. Pada umumnya teori dan konsep digunakan untuk mengembangkan pertanyaan dan proposisi penelitian. Proposisi merupakan landasan bagi peneliti untuk menetapkan kasus pada umumnya dan untuk analisis pada khususnya

2. Menyiapkan, mengumpulkan dan menganalisis data

Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan, pengumpulan dan analisis data berdasarkan protokol penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Pada penelitian studi tunggal, penelitian ini dilakukan pada kasus terpilih dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

3. Menganalisis dan menyimpulkan

Tahapan terakhir dari proses penelitian studi kasus. Pada penelitian studi kasus tunggal, analisis dan penyimpulan dari hasil penelitian digunakan untuk mengecek kembali kepada konsep atau teori yang telah dibangun pada tahap pertama penelitian.

3.1.2. Subjek dan Objek Penelitian

3.1.2.1. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah atau fokus penelitian. Metode penelitian kualitatif berkaitan dengan faktor-faktor kontekstual, dalam hal ini peneliti akan mengambil informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber.

Informan dalam penelitian ini meliputi tiga macam yaitu: (1) informan kunci, (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (B. Suyanto, 2005).

Dari penjelasan tersebut, maka teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, sebagaimana yang disampaikan (Sugiyono, 2017) merupakan teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Informan yang menjadi sumber informasi mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja ini dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan memahami permasalahan terkait.








Purposive sampling dalam menentukan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini key informan ditentukan atas dasar orang-orang yang terlibat atau berhubungan langsung dengan fokus penelitian yaitu yang melakukan upaya-upaya komunikasi lingkungan di Kota Bandung dalam penanganan lingkungan hidup merujuk pada (Orr, 2014) yaitu selain pemerintah itu sendiri juga LSM/kelompok komunitas aktivis lingkungan, kelompok kepentingan/bisnis, akademisi, media, pejabat politik dan (tokoh atau *opinion leader*) masyarakat setempat, maka dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan PD. Kebersihan Kota Bandung sebagai *leading sector* pelaksanaan kebijakan lingkungan dan penanganan sampah;
2. Para pejabat politik, dalam hal ini legislator (Komisi C DPRD Kota Bandung) dan Bapelitbangda sebagai tim perumus penanganan lingkungan hidup di Kota Bandung.
3. Kelompok pemerhati atau komunitas aktivis lingkungan sebagai sebagai pengontrol dan kolaborator terlaksananya kebijakan sampah di Kota Bandung, seperti YPBB, GSSI, dan Forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah).
4. Masyarakat setempat (tokoh masyarakat) dalam wilayah yang menjadi percontohan Kawasan Bebas Sampah dan yang belum menjadi wilayah Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung.
5. Media lokal (Pikiran Rakyat dan detikjabar) yang *concern* dalam memberitakan berbagai isu persampahan di Jawa Barat dan khususnya Kota Bandung.



Berikut adalah Profil Informan yang telah peneliti wawancara sejak pra-riset (tahun 2020) hingga penelitian ini berlangsung (tahun 2023).




Tabel 3. 1 *Profil Informan*

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Profil	Keterangan
1.	<p><i>Dr. Ir. Novrizal Tahar, IPM</i></p> 	<p>Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.</p>	<p>Dr. Ir. Novrizal Tahar, lulusan Teknik Lingkungan ITB, meraih gelar Doktor Ilmu Politik UI, saat ini menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Sampah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia seperti diantaranya diet kantong plastik yang mendorong pengurangan plastik sekali pakai.</p>	<p>Pemerintah / Eksekutif</p>
2.	<p><i>Gun Gun Saptari Hidayat, ST., MBA.</i></p> 	<p>Dirut PD.Kebersihan Kota Bandung (2015-2021), Penggagas / Inisiator KangPisMan, Tim Sukses Pemenangan Cawalkot Bandung Periode 2018-2023</p>	<p>Gun Gun Saptari Hidayat S.T., MBA merupakan salah satu pegiat lingkungan yang terkenal di kota Bandung beliau merupakan lulusan Teknik Lingkungan ITB dan juga Magister Administrasi dan Manajemen Bisnis ITB. Gun Gun Saptari Hidayat juga pernah menjabat menjadi Direktur PD Kebersihan Kota Bandung dari tahun 2015 hingga 2021 setelah dilikuidasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (DLHK).</p> <p>Saat ini Gun Gun Saptari Hidayat menjabat sebagai Direktur di PT. Jabar Bersih Lestari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah dengan hasil pengolahan menjadi energi baru dan terbarukan. Ia juga merupakan Anggota Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Kota Bandung (2021) dan turut menjadi inisiator program Kawasan Bebas Sampah dan gerakan Kang Pisman.</p>	<p>Pemerintah / Eksekutif</p>
3.	<p><i>Dudy Prayudi, ST., MT.</i></p> 	<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (2021-sekarang)</p>	<p>Dudy Prayudi ST, MT merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung periode 2021 hingga sekarang. Sebelumnya Dudy Prayudi menjabat sebagai Kepala Bagian Kerja Sama.</p>	<p>Pemerintah / Eksekutif</p>
4.	<p><i>Deti Yulianti, ST., MT.</i></p>	<p>Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan</p>	<p>Deti Yulianti, ST., MT merupakan Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di DLH Kota Bandung. Saat ini tengah</p>	<p>Pemerintah / Eksekutif</p>

		Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	berfokus dalam menjalankan program-program pengelolaan sampah diantaranya program Kang Pisman dan Kawasan Bebas Sampah (KBS)	
5.	<p>Syahriani, ST.</p>  	Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Syahriani, ST merupakan Kepala Seksi Pengurangan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Salah satu program yang saat ini tengah berjalan adalah Sekolah Kang Pisman yang sudah diresmikan pada Januari 2023 lalu. Sekolah ini tentunya merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah Kang Pisman dan pelaksanaannya dilakukan baik dari berbagai instansi hingga masyarakat.	Pemerintah / Eksekutif
6.	<p>Luthfi Budiman, ST., MBA., Ph.D.</p>   	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Luthfi Budiman, ST. MBA, Ph.D, lulusan Teknik Lingkungan ITB dan Program Doktorat University RMIT Melbourne bidang Marketing Environmental Engineer, merupakan Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda di DLH Kota Bandung. Sebagai penyuluh lingkungan Luthfi Budiman pun masih berfokus untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya mengenai program-program pengelolaan sampah di Kota Bandung.	Pemerintah / Eksekutif
7.	<p>Dang Ridwan, SH.</p> 	Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Dang Ridwan merupakan Kepala Seksi Penegakan Hukum di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Posisinya di DLH Kota Bandung berfokus pada bagaimana tindakan penegakan hukum yang dilakukan mengenai pengelolaan sampah terutama jika terdapat pembuangan sampah tidak sesuai peraturan..	Pemerintah / Eksekutif

8.	<p>Andry Heru Santoso, ST.,MT.</p> 	<p>Perencana Ahli Muda, Sub Koordinator Perencanaan Pengembangan Wilayah di Bapelitbangda Kota Bandung</p>	<p>Andry Heru Santoso, ST., MT, lulusan Planologi ITB, merupakan Perencana Ahli Muda, Sub Koordinator Perencanaan Pengembangan Wilayah di Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Bandung. Beliau terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan dan proses konsultasi publik (musrenbang)</p>	<p>Pemerintah / Eksekutif</p>
9.	<p>M. Candra Nugraha D., Dr. Eng.</p> 	<p>Kepala Divisi Persampahan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung</p>	<p>M. Candra Nugraha D., Dr. Eng. adalah Kepala Divisi Persampahan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Seperti diketahui saat ini Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN). Adapun kawasan ini terdiri dari Kota Bandung dan Kota Cimahi serta kawasan sekitarnya yaitu Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, hingga 5 kecamatan di Kecamatan Sumedang dan kebijakannya sendiri guna meningkatkan pengelolaan pembangunan di lokasi Cekungan Bandung salah satunya termasuk mengenai pengelolaan sampah.</p>	<p>Pemerintah / Eksekutif</p>
10.	<p>Andri Rusmana, S.Pd.I.</p> 	<p>Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, anggota Fraksi PKS Periode 2019-2024, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung, Tim Sukses Pemenangan Pilwalkot 2018-2023.</p>	<p>Andri Rusmana, S.Pd.I merupakan anggota Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) untuk Periode 2019-2024. Andri Rusmana juga merupakan Ketua Badan Kehormatan di DPRD Kota Bandung, ia juga merupakan bagian Tim Sukses untuk Pilwalkot Kota Bandung Periode 2018-2023.</p>	<p>Pemerintah / Legislatif</p>
11.	<p>Tini Martini Tapran S.Si., M.Sos</p> 	<p>CEO GSSI, Tim Forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah), Fasilitator dan <i>The Success Story</i> Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kota Bandung</p>	<p>Tini Martini Tapran S.Si., M.Sos merupakan salah satu aktivis lingkungan yang sangat aktif dalam mengkampanyekan lingkungan saat ini. Ia juga menempuh pendidikan di Fakultas MIPA ITB serta melanjutkan studi magisternya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAR.</p> <p>Ibu Tini merupakan ketua yayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas (GSSI) sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, hingga lingkungan hidup yang dibentuk pada tahun 2010, ia benar-benar aktif mengkampanyekan bagaimana menjaga lingkungan terutama mengelola sampah dengan baik dan benar. Ia sangat berperan bagi perubahan lingkungan di Bandung bahkan juga</p>	<p>NGO/Komunitas</p>

			turut terlibat dalam kegiatan penanganan sampah di Kota Bandung salah satunya Kawasan Bebas Sampah (KBS) yang berkolaborasi dengan DLH Kota Bandung serta Komunitas Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) atau saat ini program KBS disebut dengan “Kang Pisman” (Kurangi, Pisah, dan Memanfaatkan Sampah).	
12.	<p>Ir. Ria Ismaria, MT.</p> 	Koordinator Forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah), Konsultan Kebijakan Persampahan Kota Bandung	Ir. Ria Ismaria, M.T, lulusan Teknik Lingkungan ITB, beliau merupakan Koordinator Forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah) yang dibentuk sejak 2015, forum ini merupakan wadah komunikasi hingga kolaborasi mengenai penanganan masalah sampah khususnya di kota Bandung. Sehingga selain berisi aktivis lingkungan saja namun forum ini juga tergabung diantara birokrat, konsultan, praktisi, akademisi, hingga pihak lain yang memang mempunyai fokus terhadap isu-isu lingkungan. Selain itu, beliau saat ini sebagai <i>Tim Leader Project ISWMP (Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities)</i> UNDP, yang merupakan program berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah yang beradaptasi dengan berbagai kondisi perkotaan yang berbeda di Indonesia dan dapat menjadi contoh <i>good practice</i> bagi daerah lain.	NGO/Komunitas
13.	<p>David Sutasurya</p> 	Direktur Eksekutif YPBB, Penggagas Forum BJBS, Konsultan Kebijakan Persampahan Kota Bandung	David Sutasurya merupakan Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB). YPBB adalah organisasi non-profit dan non-pemerintah yang berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan dalam membantu masyarakat guna mendapatkan kualitas gaya hidup yang tinggi khususnya bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam mendapatkan gaya hidup yang selaras dengan alam. Dalam Yayasan ini salah satu gaya hidup yang dikampanyekan adalah gaya hidup Zero Waste dimana masyarakat bisa menerapkan pola hidup yang organis sambil menjaga alamnya, sejak 2018 YPBB sedang mengkampanyekan program <i>Zero Waste City (ZWC)</i>	NGO/Komunitas
14.	<p>Dr. Siswantini, SE.Ak., M.I.Kom</p>	Dosen Komunikasi Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta	Dr. Yenni Siswantini, SE.Ak.,M.I.Kom atau biasa disapa dengan bu Yenni, berdomisili di	AKADEMISI

		<p>bidang kajian Komunikasi Lingkungan, Tim Forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah), Tim Perumus Kebijakan Persampahan Kota Bandung</p>	<p>Bandung, adalah seorang akademisi, dosen di Universitas Binus Jakarta dengan bidang kajian dan keahlian Komunikasi Lingkungan. Sebagai akademisi sekaligus pegiat lingkungan, Yenni Siswantini juga sering meneliti mengenai berbagai permasalahan persampahan termasuk pengelolaan sampah yang ada di Bandung ia juga turut serta dalam Forum BJBS, dan kontributor perumus Kebijakan Persampahan Kota Bandung.</p>	
15.	<p>Herman Sukmana (Ibo)</p> 	<p>Ketua RW 07 Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung</p>	<p>Herman Sukmana atau akrab disapa Herman Ibo merupakan Ketua RW 07 di Kampung Cibunut, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung. Seperti diketahui Kampung Cibunut dikenal sebagai Cibunut Berwarna, menjadi salah satu kampung padat perkotaan di Kota Bandung yang berhasil mengubah kawasannya dari yang dikenal kumuh dan kawasan preman, berubah menjadi Kawasan Bebas Sampah sejak 2015, atas peran Om Ibo, sapaan Herman Sukmana, dengan pendampingan DLH Kota Bandung dan fasilitator Tini Martini Tapran (GSSD). Saat ini sudah memiliki pengelolaan lingkungan yang baik terutama pengelolaan sampahnya bahkan kampung ini sering dijadikan sebagai percontohan kampung kreatif dan wisata edukasi lingkungan di Kota Bandung.</p>	<p>Kewilayahan / <i>Local Leader</i></p>
16.	<p>Russel</p> 	<p>Ketua RW 07 Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung</p>	<p>Russel merupakan Ketua RW 07 di Cihaurgeulis, Kota Bandung yang juga turut aktif dalam melakukan sosialisasi dan memanfaatkan fasilitas dari DLHK terutama mengenai pengelolaan sampah kepada warga di RW 07 Cihaurgeulis. Adapun kawasan ini sempat 90 persen menjadikan Program Kang PisMan sebagai kegiatan pengelolaan sampah yang bahkan setiap rumah mempunyai Lodong Desa Dapur (Loseda) untuk memanfaatkan maggot.</p>	<p>Kewilayahan / <i>Local Leader</i></p>

17.	<p>Deni Sukirman</p> 	Ketua RW 02 Banjirsari Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung	Deni Sukirman merupakan Ketua RW 02 di Banjirsari Kelurahan Sukamiskin yang turut berpartisipasi menjalankan program pemerintahan Kota Bandung Kang PisMan dalam mengelola sampah di tempatnya. Bahkan kampung RW 02 ini juga mengintegrasikan program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, yaitu Buruan Sae dengan memanfaatkan lahan sebagai urban farming, peternakan ayam, hingga ikan lele.	Kewilayahan / <i>Local Leader</i>
18.	<p>Doddy Iriana Memed</p> 	Ketua RW 09 Antapani Tengah, Kecamatan Antapani Kota Bandung	Pak Doddy merupakan Ketua RW 09 di Antapani Tengah, Kecamatan Antapani yang turut melaksanakan Program Kang Pisman. Adapun juga wilayah ini mempunyai Buruan Sae yaitu konsep ketahanan pangan dalam memanfaatkan pekarangan menjadi lahan yang produktif seperti menanam sayur, ikan, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar.	Kewilayahan / <i>Local Leader</i>
19.	<p>Yanto (Siti Nurhayati)</p> 	Ketua KSM RW 02 Jamaras, Kel. Jatihandap, Kec. Mandalajati, Kota Bandung	Bu Yanto merupakan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jamaras di RW 02 Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. Atas pendampingan fasilitator GSSI (Tini Martini Tapran), bu Yanto mengikuti kelas kehidupan dalam edukasi lingkungan, turut mengubah kawasannya untuk memilah dan mengolah sampah secara mandiri.	Kewilayahan / Kader Lingkungan
20.	<p>Erwin Kustiman</p> 	Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat, Pemimpin Redaksi TuguBandung.id	Pak Erwin Kustiman seorang jurnalis Harian Umum Pikiran Rakyat pernah menjabat sebagai Wapemred di HU Pikiran Rakyat hingga 2021, sejak 2022 hingga saat ini Pemimpin Redaksi TuguBandung.id dan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Jawa Barat	MEDIA
21.	<p>Baban Gandapurnama</p> 	Kepala Redaksi DetikJabar	Kang Baban memulai karir di detikcom sejak 2007. Pada tahun 2022 detik.com serentak membuka regional, salah satunya detikjabar dengan misi detik.com lebih mendekat pada publik di kawasan regional yang mengedepankan isu-isu lokal.	MEDIA

3.1.2.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penanganan sampah Kota Bandung yang ditinjau dari komunikasi lingkungan dalam perspektif *green politics* dengan melihat komunikasi kebijakan dan partisipasi *stakeholder*. Karena pada dasarnya objek penelitian adalah topik permasalahan yang menjadi titik sasaran atau perhatian yang dikaji dalam penelitian (Moleong, 2019). Objek penelitian yang menjadi sasaran atau titik perhatian dalam penelitian ini digali dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

3.1.2.2.1. Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung memiliki luas wilayah sekitar 16,7,31 kilometer persegi. Adapun letak dari Kota Bandung ada di tengah-tengah provinsi Jawa Barat yaitu diantara 107°36' BT dan 6°55' LS. Secara administrasi batas-batas Kota Bandung sesuai dengan RTRW Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Kabupaten Bandung
Sebelah Barat	berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung
Sebelah Timur	berbatasan dengan Kabupaten Bandung

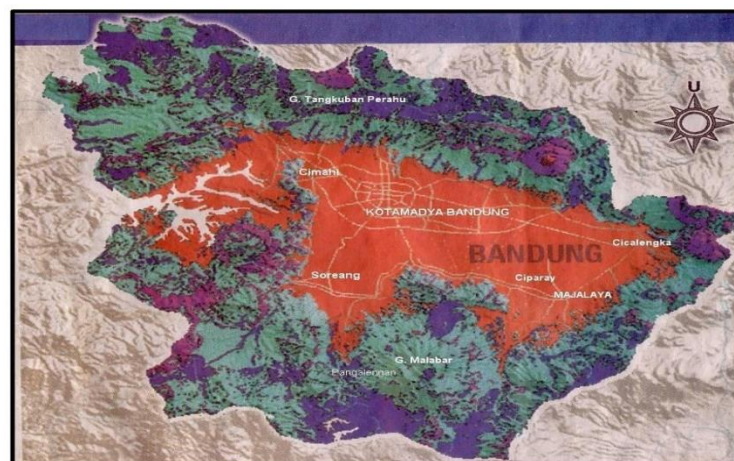
Bandung merupakan Kota Metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dengan kepadatan penduduk mencapai 15.051 jiwa/km².

Kota Bandung sendiri menjadi daerah di Provinsi Jawa Barat yang dikelilingi oleh pegunungan, berada di ketinggian kurang lebih 768 m di atas permukaan laut dan titik tertinggi pada sebelah utara dengan ketinggian 1.050 m di atas permukaan laut dan terendah ada pada sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Iklim yang ada di Kota Bandung sendiri dipengaruhi dengan iklim pegunungan yang lembab serta sejuk. Suhu rata-ratanya 23°C dan curah hujan rata-rata 200,4 mm serta jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan.

Secara geografis Kota Bandung berada dalam kawasan di Cekungan Bandung. Kawasan ini meliputi wilayah perkotaan di sekitar Kota Bandung dan sejumlah kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Dan Kota Bandung menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, budaya, dan ekonomi di Kawasan Cekungan Bandung, yang memiliki polulasi besar dan merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia.

Cekungan Bandung dikelilingi oleh pegunungan, termasuk Pegunungan Tangkuban Perahu di sebelah utara dan Pegunungan Burangrang di sebelah selatan. Kondisi geografis ini memberikan keindahan alam dan iklim yang sejuk di kawasan ini. Selain itu kawasan perkotaan Cekungan Bandung merupakan pusat industri dan perdagangan yang penting di Jawa Barat. Berbagai sektor industri seperti tekstil, pakaian, makanan, otomotif, dan elektronik memiliki keberadaan yang signifikan di kawasan ini. Terdapat juga banyak pusat perbelanjaan, seperti mal dan pasar tradisional, yang menjadi pusat aktivitas perdagangan.

Cekungan Bandung juga dikenal sebagai pusat pendidikan dengan banyaknya perguruan tinggi ternama yang berlokasi di kawasan ini. Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (UNPAD) adalah dua universitas terkemuka di Indonesia yang berada di Cekungan Bandung. Kawasan ini pun memiliki banyak objek wisata menarik. Beberapa tempat wisata populer di kawasan ini antara lain Tangkuban Perahu, Lembang, Kawah Putih Ciwidey, Wisata Alam Pangalengan, dan masih banyak lagi. Wisatawan sering mengunjungi kawasan ini untuk menikmati keindahan alam, berbelanja, dan menikmati kuliner khas daerah. Dengan demikian, sebagai bagian dari kawasan perkotaan Cekungan Bandung, Kota Bandung menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di Indonesia, dan penyangga jalur aktivitas Ibu Kota Jakarta, tidaklah mengherankan jika aktivitas penduduknya menjadi semakin beragam dan sejalan dengan produktivitas timbulan sampah yang dihasilkan terlebih bentuk mangkuk dalam cekungan Bandung ini memerlukan perhatian khusus dalam menangani persampahan.



**Gambar 3. 2 Foto Satelit Cekungan Bandung
(Sumber: RIPS Kota Bandung 2021-2030)**

3.1.3. *Gaining Acces dan Rapport*

Untuk mengumpulkan data di lapangan, perlu dilakukan pendekatan kepada subyek penelitian. Pendekatan tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu akses dan menjalin hubungan komunikasi, Cresswell mengistilahkan dengan *Gaining Access and Making Rapport*” (Creswell & Poth, 2018).

Sebagai tahap awal, peneliti melakukan pendekatan dengan mengikuti berbagai kegiatan Pemkot Bandung yang bertemakan acara program lingkungan hidup, seperti special event, pameran, festival, dialog publik, dan selama *pandemic covid-19* di awal penelitian, peneliti seringkali mengikuti webinar dengan topik isu persampahan, jambore nasional Indonesia juara bebas sampah, dan forum online lainnya. Melalui kegiatan tersebut peneliti memiliki akses untuk bertemu dan meminta kontak person atau narahubung untuk dapat ditindaklanjuti kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, peneliti pun mengontak para aktivis lingkungan yang menjadi admin di akun-akun media sosial bertemakan pengelolaan sampah atau lingkungan. Melalui kontak tersebut peneliti memperoleh informasi terkait orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas mereka.

Demikian pula halnya untuk mengakses key informan, dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung beserta jajarannya, Dirut PD. Kebersihan Kota Bandung, dan Komisi C DPRD Kota Bandung, dihubungi secara formal maupun informal; secara formal peneliti menyampaikan surat pengantar penelitian melalui Sekretariat Dinas ybs, maupun Sekretariat Dewan ybs.; secara informal peneliti menghubungi relasi terdekat key informan ybs dan melalui jaringan pertemanan. dan juga unsur kewilayahan (*local leader/kader*

lingkungan) sesuai arahan dari informan sebelumnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung) yang merekomendasikan beberapa Ketua RW, Lurah, dan Kader Lingkungan di kewilayahan dari Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung.

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan adanya data yang tersusun dan valid. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengamatan

Pengamatan lapangan atau *field observation* adalah sebuah kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan kelengkapan panca indera yang dimiliki. Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peristiwa penelitian. Peristiwa ini mencakup interaksi, percakapan, atau perilaku penanganan sampah, mengamati implementasi sebuah aturan kebijakan yang terjadi, mengamati saluran-saluran komunikasi atau media yang dilakukan pemerintah dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan lingkungan hidup, dan keterlibatan masyarakat dalam ruang publik dimana mereka dapat melakukan dialog atau forum yang bersifat deliberatif dalam pembahasan penanganan sampah dan isu lingkungan hidup lainnya, dan sebagainya. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Observasi yang dilakukan adalah mengamati peristiwa yang dikumpulkan sehingga menjadi sumber data yang dapat mendukung

analisis penelitian. Artinya, observasi yang dilakukan adalah pengamatan terhadap perilaku, kegiatan dan kondisi kebijakan lingkungan yang (sudah) ada, termasuk pesan-pesan berupa isu persampahan yang disebarluaskan melalui media-media sosial, baik pihak *government* maupun *non-government*/komunitas pegiat lingkungan dan juga unsur kewilayahan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer), dan yang diwawancarai (interviewee) (Moleong, 1998). Jenis *interview* yang digunakan adalah *interview* bebas terstruktur. Artinya *interview* tersebut menggunakan kerangka wawancara (pedoman wawancara), tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan sehingga terhindar dari *interview* yang kaku dan kurang terarah. Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar proses dan isi wawancara untuk menjaga agar seluruh pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Jadi *interview* ini bertujuan menggali data dari informan, dalam hal ini wawancara akan diarahkan pada mencari dan mengungkap bentuk dan tindakan komunikasi kebijakan dan partisipasi

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan yang terlibat dalam komunikasi penanganan sampah.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, majalah, agenda, dan sebagainya (Sutrisno, 2000). Metode ini dalam pelaksanaannya adalah dengan cara mengumpulkan dan mencari data-data tertulis yang ada. Dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah dari media-media online surat kabar, literatur, buku, jurnal, poster, spanduk baliho, atau media luar ruang lainnya, dan dari media elektronik/kontemporer berupa situs-situs resmi Pemkot Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dan situs-situs aktivis pemerhati lingkungan hidup Kota Bandung. Selain itu pendokumentasian dalam setiap kegiatan juga sangat penting sebagai bahan tambahan laporan hasil penelitian.

3.1.5. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Patton (Sutrisno, 2000) adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini memerlukan kecermatan dan ketelitian, serta memberikan penjelasan terhadap data-data tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga menjadi bentuk laporan yang baik. (Sugiyono, 2017) mengungkapkan bahwa analisis data penelitian kualitatif

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya.

Teknik analisis data dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang digunakan oleh (Miles & Huberman, 1984). Dalam teknis analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri atas tiga tahapan (Sugiyono, 2017). Tahap pertama adalah reduksi data, tahap kedua display data, dan tahap ketiga kesimpulan dan verifikasi data. Ketiga tahapan teknis analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

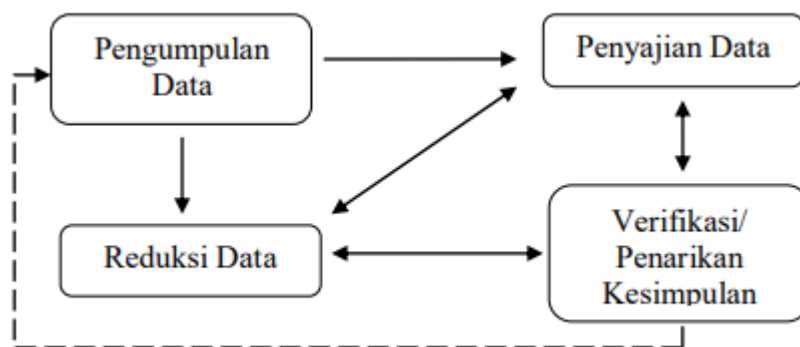
b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, namun yang paling banyak digunakan penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Artinya, display data ini merupakan suatu kesimpulan informasi yang tersusun berbentuk pendeskripsian kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Bila digambarkan ketiga tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Analisis Data Miles dan Huberman (1984)

Melalui tahap analisis tersebut, setiap bagian yang ada di dalamnya saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga terdapat hubungan yang jelas dan terstruktur dari masing-masing tahap tersebut.

3.1.6. Teknik Validitas Data

Pada penelitian ini teknik validitas data yang digunakan adalah dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian validitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu (Sugiyono, 2017). Pada penelitian dengan studi kasus ini, peneliti hanya akan menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji validitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti dan sudah menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut (Sugiyono, 2017).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 1998).

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara atau pengamatan yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Waktu seringkali akan mempengaruhi validitas data. Dalam rangka validitas (pengujian keabsahan) data, dilakukan pengecekan dengan wawancara, studi pustaka atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kedua jenis triangulasi tersebut yang didukung oleh penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga mendapat hasil data yang valid. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan menghubungi pihak-pihak yang dirujuk oleh informan sebelumnya, untuk mengkonfirmasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya atau yang sempat diutarakan informan sebelumnya, seperti halnya berdasarkan arahan dari Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan peneliti sempat mengunjungi Kota Surabaya berdiskusi dengan pegiat lingkungan disana dan Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Surabaya, juga diskusi dengan rekan

sejawat dalam bidang kajian kebijakan publik, komunikasi politik, dan komunikasi lingkungan dari akademisi dan asosiasi Perguruan Tinggi (Aspikom), selain juga berdiskusi dengan jurnalis Pikiran Rakyat dan detikJabar dalam melihat isu-isu persampahan yang menjadi pemberitaan di media massa.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di lokasi informan berada, yaitu di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung di Jl. Sadang Serang Bandung, PD. Kebersihan Kota Bandung Jl. Surapati Bandung (sejak 2021 menjadi Kantor UPT Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandung), kantor DPRD Kota Bandung di Jl. Sukabumi Bandung, Forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah), YPBB, GSSI, Kantor DetikJabar dan komunitas aktivis lingkungan lainnya, dan juga di Kawasan-kawasan bebas sampah seperti Kampung Cibunut Jl. Sunda, Cihaurgeulis, Sukamiskin, Antapani Tengah, serta Jamaras sebagai wilayah yang belum dijadikan Kawasan bebas sampah namun sudah mulai melakukan aksi sebagaimana KBS. Namun dengan situasi pandemi Covid-19 sejak tahun awal tahun 2020 yang lalu, pada akhirnya pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik melalui media *conference* online (zoom meeting) maupun secara langsung dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan. Dan penelitian berlanjut pada 2022 hingga 2023 observasi dan wawancara dengan informan secara langsung.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan dimulai dari tahap persiapan, tahap penelitian (pra-riset, pengamatan, pengumpulan data, wawancara dan analisis data), penyusunan artikel jurnal internasional, penulisan naskah hasil penelitian, hingga tahap ujian naskah disertasi dan sidang promosi yang direncanakan hingga pertengahan tahun 2023.

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

Kegiatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tahap Persiapan dan Penetapan Topik Penelitian					
Pra-Riset dan Mencari Data Awal					
Pembuatan Proposal Penelitian					
Bimbingan Proposal Penelitian					
Sidang Usulan Riset (SUR)					
Menyusun Artikel Jurnal Internasional					
Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi					
Pengumpulan data penelitian					
Analisis data penelitian					
Validitas data					
Pembuatan Naskah Penelitian Disertasi					
Bimbingan Naskah Penelitian					
Ujian Naskah Disertasi					
Sidang Promosi Doktor					